

# MELAWAN GENANGAN AIR: RESISTENSI WARGA KEMUSU TERHADAP PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO 1985-2002

## **SKRIPSI**

Sebagai pertanggungjawaban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh: Eko Santoso NIM 3111414012

ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2019

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Oleh sebab itu, skripsi ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi dari pihak lain; baik sebagian ataupun seluruhnya. Beberapa data, pendapat, maupun temuan dari pihak lain yang dimuat di dalam skripsi ini, dikutip sebagaimana kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.

Semarang, Oktober 2019

Eko Santoso

NIM 3111414012

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh para dosen pembimbing untuk selanjutnya akan díujikan. Disetujui pada:

Hari

: SEHIN, 21 OKOBER 2019.

Tanggal: 21 OKTOBER 2019

Dosen Pembimbing I

Dr. Putri Agus Wijayati, M. Hum

NIP 19630816199032002

Dosen Pembimbing II

NIP 196312151989011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah

Merrab

Dr. Cahyo Budi Utomo, M. Pd.

NIP 195111211986011001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari

: SENIN

Tanggal

: 30 DESEMBER 2019

Penguji I

Drs. Ba'in, M.Hum

NIP.196307061990021001

Penguji II

Dr. Putri Agus Wijavati, M. Hum

NIP. 19630816199032002

Penguji III

Drs. Ibnu Sodig, M.Hum

NIP. 196312151989011001

Mengetahui

Dekan Pakultas Ilmu Sosial

Dr. Mbliv Sblebatol Mustofa, M.A.

MP-19630802198803100

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## Motto

"...sejarah merupakan cermin paling jernih, refrensi terpercaya untuk suatu perubahan..."

- Joesoef Isac, 1995, hlm.viii (ed) "Arus Balik-Pramoedya Ananta Toer"

## Persembahan

Untuk Ibu dan Bapak yang telah berjuang membesarkan diriku dan adikku dalam segala kondisi dengan segala upaya

#### KATA PENGANTAR

Pemilihan topik ini bukanlah tanpa alasan, selain karena sedang maraknya proses penggusuran dengan dalih pembangunan yang marak akhir-akhir ini, juga didasari atas keinginan untuk menghadirkan karya akademik yang meneliti masalah Kedung Ombo dari perspektif Sejarah yang menempatkan korban pembangunan sebagai subyek dalam sejarah. Hal inilah yang pada akhirnya mendasari saya untuk menggeluti topik skripsi ini. Namun dalam pelaksanaanya, saya menemukan beberapa kendala. Selain karena soal kondisi yang mengharuskan saya meninggalkan Semarang selama kurang lebih satu tahun lamanya, untuk menetap di desa, yang berakibat tidak tersentuhnya skripsi ini. Rasa malas meyentuh skripsi saat sedang di rumah dan ketidakmampuan untuk melakukan mobilitas rutinan ke Semarang menemui dosen dalam melakukan bimbingan skripsi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun harus terkatung-katung, setidaknya skripsi ini dapat diselesaikan dengan banyak kekurangan. Selebihnya, saya berterimakasih terhadap banyak pihak yang telah memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan studi ini.

Pertama-tama, saya berterimakasih kepada para informan, terkhusus bapak Jaswadi dan bapak Sadi yang telah sudi selama berhari-hari lamanya menerima saya untuk menggali informasi sekaligus memberikan ijin untuk menetap di rumah mereka. Selain itu, kesedian bapak Jaswadi dalam meminjamkan arsip dan kumpulan foto serta kerelaan bapak Sadi dalam mengantar saya ke beberapa informanlah yang pada akhirnya membuat saya mendapatkan banyak data yang digunakan sebagai sumber utama skripsi ini.

Ucapan terimaksih selanjutnya saya tujukan pada Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum, yang telah dengan sabar membimbing saya, sekalipun sempat tidak bertemu dan bimbingan selama kurang lebih satu tahun, beliau tetap kooperatif menerima saya dan membimbing sampai skripsi ini selesai untuk dikerjakan. Tidak lupa, ucapan terimakasih saya tujukan kepada Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum terutama karena telah mengarahkan saya dan membimbing serta menyetujui pilihan saya memilih topik skripsi ini sejak masih dalam seminar proposal. Selain itu, ucapan terimaksih saya tujukan pada jajaran birokrat dan staff kampus mulai dari Jurusan Sejarah, tingkat Fakultas Ilmu Sosial, hingga ke tingkat Universitas Negeri Semarang.

Selanjutnya saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Ilmu Sejarah angkatan 2014. Selain sebagai teman belajar, mereka adalah orang-orang yang hadir selama lebih dari 4 tahun menjadi keluarga saya di Semarang. Selain itu ucapan terimakasih saya tujukan pada teman-teman kelompok studi dalam Komunitas Kalamkopi yang menjadi wadah bagi saya untuk berdiskusi, bertukar pikiran, memfasilitasi bahan bacaan hingga bereksperimen melakukan banyak hal, hingga terlahirlah Kooperasi Moeda Kerdja. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya tujukan untuk teman-teman di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Universitas Negeri Semarang yang sejak awal perkuliahan menjadi wadah untuk melakukan banyak kegiatan, seperti diskusi hingga bersilaturahmi dengan para alumni PMII antar periode yang banyak berprofesi sebagai dosen. Mereka adalah teman-teman yang selalu saya repotkan, minimalkan untuk mendengarkan dan berdilaog soal ide hingga penyelenggaraan

suatu kegiatan. Apresiasi mereka atas perbedaan cara berpikir yang akhirnya

membuat saya nyaman di organisasi tersebut hingga hari ini.

Saya juga berterimaksih kepada orang-orang terdekat dalam hidup saya

seperti Ibu, Bapak, Adek dan Mas Wahyudi. Setiap mengingat mereka saya selalu

mengingat betapa sungguh kerdilnya kehidupan ini bila tidak berbuat apa-apa

untuk kebermanfaatan orang lain. Ucapan terimakasih juga saya tujukan untuk

guru spiritual saya, Ki ageng dan Pakde Nur yang pada akhirnya menyadarkan

saya agar menjalani sisa hidup di dunia ini dengan sebuah tujuan. Terakhir

terimakasih kepada Nida Sayidatul Izza yang telah membantu saya dalam

memvisualisasikan beberapa peta, meskipun lewat pihak ketiga. Terimakasih juga

karena telah mau mendengar banyak hal soal harapan-harapan di masa

mendatang.

Semarang, Oktober 2019

Eko Santoso

viii

#### **SARI**

Santoso, Eko. 2019. *Melawan Genangan Air: Resistensi Warga Kemusu Terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo 1980-2002*. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum dan Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum.

## Kata Kunci: Pembangunan, Resistensi, Kedung Ombo, Kemusu

Pada tahun 1980-1990an, seiring dengan berkembangnya paradigma developmentalisme di berbagai negara yang dipelopori oleh lembaga internasional, ditransferkan ke negara-negara berkembang dalam wujud pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan waduk yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan listrik di dunia industri dan perumahan, irigasi untuk mengintensifikasi hasil pertanian serta menjadi cadangan air saat musim kemarau. Hal serupa dilakukan pula oleh Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto. Salah satunya adalah Pembangunan waduk Kedung Ombo yang menggusur masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut.

Penelitian ini membahas tentang sejarah pembangunan Waduk Kedung Ombo, terutama terkait perjuangan para korban penggusuran yang memilih bertahan di lokasi pembangunan waduk. Penelitian ini berkonsentrasi di sepanjang tahun 1985-2002 ketika sebagian besar warga menolak pembangunan waduk hingga proses relokasi para korban pembangunan yang masih bertahan. Penelitiaan ini mengambil satu lingkup spasial yang terjadi di Kabupaten Boyolali tepatnya di Kecamatan Kemusu. Lebih lanjut penelitian ini mencoba melihat alasan warga Kemusu dalam melawan pembangunan waduk sekaligus melihat bagaimana bentuk resistensi warga yang memilih bertahan di lokasi penggenangan air waduk.

Selama proses Pembangunan Waduk Kedung Ombo berlangsung, banyaknya warga yang masih bertahan dan tidak mau digusur menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, selain karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan waduk, pendekatan pemerintah yang koersif serta tindakan aparat yang cendrung melakukan tindakan intimidasi, membuat warga tidak simpatik. Hal ini diperparah dengan rendahnya ganti rugi atas lahan bagi warga terdampak. Tatkala waduk telah digenangi, mereka bertahan hidup secara nomaden dengan memilih daerah yang tak tergenangi. Pemerintah justru menyikapi kondisi semacam ini dengan sikap yang arogan dan merasa kebijakan ini paling benar, sebelum pada akhirnya muncul desakan dari berbagai pihak agar pemerintah kooperatif dengan mengakomodir warga yang bertahan. Pemberian kuasa atas lahan perhutani di sekitar lokasi waduk untuk dijadikan permukiman dan tempat tinggal baru bagi yang masih bertahan di area penggenangan waduk Kedung Ombo, setidaknya mencairkan kondisi dan mulai diterima oleh sebagian warga.

#### **ABSTRACT**

**Santoso, Eko.** 2019. Fighting Puddles: Resistance of Kemusu Residents to The Development of Kedung Ombo Reservoir in 1980-2002. History Department FIS UNNES. Mentor Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum and Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum.

## Keywords: Development, Resistance, Kedung Ombo, Kemusu

In the 1980s, along with the development of the paradigm developmentalisme in various countries pioneered by international institutions, transferred to developing countries in the form of infrastructure development. One of them is the construction of reservoirs that will hopefully meet the needs of electricity in the world of industry and housing, irrigation to intensify agricultural products and become reserves of water during the dry season. It was also done by Indonesia under the Suharto administration. One of them is the construction of Kedung Ombo Reservoir that displacing the people who have inhabited the region.

This study discusses the history of the development of Kedung Ombo Reservoir, especially related to the struggle of the burnt victims who chose to survive at the site of dam construction. The study concentrated throughout the years 1985-2002 when most of the villagers refused to build the reservoir until the process of relocation of the victims of the development. This research took a spatial scope that occurred in Boyolali district precisely in Kecamatan Kemusu. Furthermore, this research is trying to see the reason of Kemusu residents in resisting the construction of the reservoir and see how the resistance form of residents who choose to survive at the location of the reservoir water.

During the construction of Kedung Ombo Reservoir, the number of residents who still remain and do not want to be displaced into historical facts that can not be denied, other than because of the community in the formulation of reservoir development policy, A cohersive government approach as well as an action apparatus that nudge acts intimidation, making citizens unsympathetic. This is compounded by the low losses on land for affected citizens. As the reservoirs have been flooded, they survive on a nomadic basis by choosing an unflooded area. The Government is addressing this kind of condition with an arrogant attitude and feel this policy is most correct, before the end appears insisting from various parties so that the Government is cooperative to accommodate the residents who survive. The granting of power to the land around the reservoir site to be used as a settlement and new residence for surviving in the area of the reservoir of Kedung Ombo, at least dilute the condition and began to be accepted by some citizens.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	vi
SARI	ix
ABSTRAK	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR DAN PETA	xii 
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Tinjaun Pustaka	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB 2 PEMBANGUNAN VERSUS PENGGUSURAN	20
A. Kuasa Politik Orde Baru	20
B. Tatanan Masyarakat yang Terusik	26
C. Ramalan yang Berkembang	33
D. Kondisi Geografis	38
BAB 3 ANCAMAN EKSISTENSI RUANG DAN KEHIDUPAN	41
A. Entitas yang Terabaikan	41
B. Menolak Ganti Rugi	44
C. Detik-detik Penggenangan	52
BAB 4 PERLAWANAN TANPA KEKERASAN	59
	59 59
A. Mencoba Tidak Menyerah  B. Kepedulian Ormas hingga LSM	73
C. Kebijakan Pemerintah yang Melunak	83
BAB 5 KESIMPULAN	99
DAFTAR PUSTAKA	102
I AMDIDAN	102

## DAFTAR GAMBAR DAN PETA

## Gambar dan Peta

1.	Peta Kemusu sebelum penggenangan waduk Kedung Ombo dan jumlah KK	
	yang mendiami pada tahun 1984	33
2.	Peta wilayah Kecamatan Kemusu	39
3.	Gambaran wilayah Kecamatan Kemusu yang bakal tergenangi air waduk	
	Kedung Ombo 1987	43
4.	Perintah kepada warga untuk meninggalkan wilayah yang terkena genangan	
	waduk 1989	55
5.	Gethek menjadi alat transportasi bagi warga yang bepergian 1989	61
6.	Potret warga yang bergotong-royong membangun rumah mereka di dataran	
	yang lebih tinggi 1989	62
7.	Warga memanfaatkan air genangan untuk memindahkan kayu-kayu guna	
	membangun rumah di tempat lain 1989	64
8.	Foto anak-anak yang belajar di sekolah darurat	66
9.	Rumah-rumah yang tenggelam oleh air waduk 1990	68
10.	Aksi KSKPKO yang diamankan oleh aparat 1989	76
11.	Sekolah yang dibentuk oleh para relawan 1990	80
12.	Peta kawasan perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungmulyo 1991	87
13.	Peta kawasan perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungrejo 1991	87

## **DAFTAR TABEL**

1.	Jumlah penduduk di Kemusu menurut mata pencaharian tahun 1983	27
2.	Produksi pertanian di Kemusu dari tahun 1980-1984	28
3.	Jumlah penduduk Kemusu sebelum pembangunan waduk Kedung Ombo	
	Ombo 1980-1984	30
4.	Jumlah KK yang terdampak beserta status kepemilikan tanah warga yang	
	bertahan sampai Desember 1988	52
5.	Jumlah KK dan arah perpindahan penduduk Kecamatan Kemusu dan	
	wilayah waduk Kedung Ombo lain sampai dengan 23 Maret 1989	70
6.	Jumlah KK yang bertahan dan tidak bersedia menerima ganti rugi uang	
	sampai dengan 23 Maret 1989	72
7.	Anggaran pelaksanaan kegiatan di Kedung Ombo tahun 1998-2002	91

#### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu diskurs yang sakral dalam tertib politik Pemerintahan Soeharto (1966-1998). Pada masa itu program pembangunan diberlakukan dengan sistem *top-down planning*, pemerintah bertindak sebagai pencipta, perencana dan pelaksana pembangunan, sedangkan rakyat diposisikan sebagai konsumen. Siapapun yang bersebrangan dengan program pembangunan pemerintah, akan menanggung konsekuensi berhadapan pada mesin-mesin represi negara.

Sebagaimana dikatakan oleh Huskens, dalam peristiwa yang terpapar dalam catatan sejarah, di bawah pemerintahan Soeharto, negara sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di tingkat lokal maupun nasional. Sementara itu, para pejabatnya cendrung menciptakan hukumhukum sendiri demi melayani kepentingan-kepentinganya sendiri pula.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3S, 1986), hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Samuel Gultom, *Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>R. W. Hefner, "Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia", dalam buku *Soeharto Sehat* Asvi Warman Adam (ed), yang dikutip oleh Baskara T Wardaya, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 167. Dalam istilah Henfer, dengan pendekatan kekerasan itu pemerintah Soeharto telah menjadikan Indonesia layak untuk disebut sebagai negara yang "tak beradab". Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa, proses pembangunan yang dilakukan selama 32 tahun turut pula disertai dengan berbagai macam tragedi kemanusian yang memakan korban tak sedikit. Mulai dari tragedi G 30 S, Peristiwa Malari, Operasi khusus, penggusuran pembangunan waduk-waduk di berbagai daerah, peristiwa Tanjung Priok dan Kasus Trisakti.

Kasus Kedung Ombo merupakan refleksi dominasi negara atas masyarakat dalam konteks pembangunan. Pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, diimplementasikan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat setempat, bahkan terbilang koersif.<sup>4</sup>

Pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana proyek pengembangan wilayah sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana). Proyek ini merupakan proyek lapar tanah yang membutuhkan lahan luas. Luas genangan waduk Kedung Ombo bila ketinggian air mencapai elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha luasan tanah yang mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek waduk Kedung Ombo. Areal itu terdiri dari 2.230 Ha tanah sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan.

Luas areal lahan, sebagaimana yang terpapar di atas mencakup tiga wilayah kabupaten yakni, Grobogan, Sragen dan Boyolali.<sup>7</sup> Di Kabupaten Boyolali, proyek waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan tanah seluas 1.503,6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa tersebut diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam Kecamatan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Gultom, *loc. cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo*, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm.7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>World Bank, Recent Experience With Involuntary Resettlement Indonesia-Kedung Ombo, (World Bank, 1998), Report No. 17540, hlm. 2.

Kemusu.<sup>8</sup> Penduduk yang terkena proyek pembangunan waduk Kedung Ombo secara keseluruhan berjumlah 5.391 kepala keluarga. Lebih dari separuh diantaranya, yaitu 3.006 KK, berada di wilayah Kemusu.<sup>9</sup>

Jumlah keseluruhan biaya pembangunan waduk Kedung Ombo, termasuk anggaran untuk pembebasan tanah, bangunan rumah dan tanaman (karang kitri) milik penduduk yang dikeluarkan untuk merealisasikan megaproyek tersebut tercatat sekitar Rp 495,52 miliar.<sup>10</sup> Biaya ini berasal dari dana pinjaman Bank Dunia Nomor 2543-IND sebesar USD \$ 156 juta dan Bank Exim Jepang sebanyak USD \$ 25,2 juta.<sup>11</sup> Dengan demikian dana pinjaman dari dua lembaga itu berjumlah USD \$ 181,2 juta atau kira-kira RP 453 miliar (kurs rupiah terhadap dolar saat itu Rp 2.500/ dolar AS).<sup>12</sup>

Proyek ini diklaim pemerintah akan membawa keuntungan dan keberhasilan. Proyek waduk Kedung Ombo selain untuk pengendali banjir, bertujuan juga untuk menciptakan pembangkit listrik sebesar 22, 5 megawatt yang akan menerangi 59 ribu rumah warga, mengairi areal persawahan seluas 87.000 hektar, dan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan industri di Ibukota Jawa

<sup>9</sup>*Ibid*., hlm. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Stanley, *loc. cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Isdiyanto, *Menyelami Kedungombo: Investigasi Wartawan*, (Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2002), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul Muntholib, "From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of Kedung Ombo Reservoir for Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia", *The Social Science II*, 2016, Volume 13, hlm. 3341.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Isdiyanto, *loc. cit.* 

Tengah Semarang. Waduk Kedung Ombo akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Namun demikian, proyek ini justru diwarnai dengan penolakan sebagian besar warga terdampak khususnya di wilayah Kemusu. Mereka menolak ganti rugi yang diberikan pemerintah atas lahan yang bakal terkena dampak pembangunan waduk. Beberapa tokoh di Kemusu bahkan pernah menggabungkan diri dalam sebuah gerakan dan bertekad bulat untuk menolak pendataan tanah, ganti rugi maupun program transmigrasi. Hal serupa ditulis oleh Karmono, yang mengungkapkan bahwa penolakan warga terhadap pembangunan waduk tidak terlepas karena tidak dilibatkannya warga dalam perumusan kebijakan untuk penentuan besaran kompensasi ganti rugi tanah. Alhasil, yang terjadi adalah ketetapan besaran ganti rugi yang dipatok oleh pemerintah kepada warga jauh di bawah harga tanah pada umumnya di Boyolali dan sekitarnya pada waktu itu. 15

Di sisi lain, selain soal ganti rugi tanah yang rendah, penolakan warga terhadap pembangunan waduk dilatarbelakangi juga oleh nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti pemahaman bahwa tanah kelahiran adalah tumpah darah yang sekaligus sebagai tempat tinggal sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Irene Hadiprayitno, *Hazard Or Right? The dialectics Of Development Practice and The Internationally Declared Right to Development, With Special Reference to Indonesia*, (Oxford: Intersentia, 2009), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Imron Rosyid Taufikkur Rahman, "Protes Petani di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (1985-1993)", *Skripsi* pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sebelas Maret, 1998, hlm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Karmono, "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)", *Tesis* Jurusan Hukum Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 61.

perlu dipertahankan hingga tumpah darah. Sebagaimana disampaikan oleh Wijayati yang meminjam dari pendapat Sudargo, bahwa persoalan tanah merupakan persoalan yang peka dan untuk itulah dipertaruhkan jiwa. <sup>16</sup>

Perlawanan warga sebagai upaya memperjuangkan hak-hak atas tanah dan ruang hidup terhadap proses pembangunan waduk yang dilakukan pemerintah dengan dalih kepentingan umum, masih terus berlangsung hingga hari ini. Hal itu tidak lepas dari arogansi pemerintah yang mengalienasi ruang hidup warga tanpa memperhitungkan kelayakan hidup jangka panjang bagi mereka yang terdampak. Oleh sebab itu, persoalan ini masih menarik dan relevan untuk dibahas.

#### B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah mengapa sebagaian besar warga Kemusu melakukan perlawanan terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo. Dari permasalahan pokok ini diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan penelitian.

- 1. Apa alasan waga Kemusu melakukan penolakan terhadap pembangunan waduk?
- 2. Bagaimana bentuk perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan?

<sup>16</sup>Putri Agus Wijayati, "Pemilikan dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur)", dalam *Forum Ilmu Sosial*, 2008, Volume 13, Nomor 1, hlm. 75.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan sebagian besar warga Kemusu dalam melakukan perlawanan, begitu pula dengan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan, serta meninjau bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba untuk menghadirkan historiografi sejarah Kedung Ombo yang menempatkan korban penggusuran sebagai subyek dalam sejarah. Perlawanan masyarakat Kemusu yang menjadi korban pembangunan waduk Kedung Ombo adalah fakta historis yang tak boleh diabaikan dan penting dicatat dalam sejarah.

## D. Ruang Lingkup

Seperti produk akademik lainnya, penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup, baik spasial dan juga temporal. Secara spasial, penelitian ini difokuskan di daerah yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Kemusu. Hal ini pun masih dibatasi pada desa-desa di Kemusu yang wilayahnya terkena dampak pembangunan waduk. Dari 13 desa yang secara administrasi masuk wilayah Kemusu, terdapat sembilan desa yang terkena dampak pembangunan waduk. Sembilan desa tersebut yakni, Desa Wonoharjo, Nglanji, Genengsari, Ngrakum, Watugede, Klewor, Bawu dan Sarimulyo. Adapun secara temporal, penelitian ini mengambil rentan waktu antara tahun 1985 hingga 2002. Batasan waktu awal dipilih, sebab pada tahun tersebut sebagian besar masyarakat menolak ganti rugi dan memilih bertahan di wilayah pembangunan waduk. Mereka menolak besaran uang ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek pembangunan waduk

karena dianggap jumlahnya tidak sebanding dengan harga tanah di sekitarnya pada waktu itu. Tahun 2002 dipilih sebagai batas akhir waktu dalam ruang lingkup temporal penelitian ini, sebab pada tahun tersebut upaya perlawanan masyarakat Kemusu mereda. Hal ini ditandai dengan adanya relokasi sebagian besar warga yang semula bertahan di lokasi genangan waduk. Pelunakan sikap ini tidak terlepas dari adanya kebijakan akomodatif pemerintah dengan melakukan program aksi di Kedung Ombo bagi mereka yang masih bertahan. Program ini berlangsung selama empat tahun dengan menggunakan anggaran mulai dari APBD, APBN, hingga bantuan luiar negeri. Program ini dilakukan untuk menunjukan kepedulian pemerintah terhadap warga yang bertahan di lokasi genagan air waduk.

## E. Tinjauan Pustaka

Persoalan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan isu yang seksi di tahun 1990-an. Mulai dari prosesi pembebasan lahan yang bermasalah hingga terjadinya penolakan yang ditandai dengan bertahannya sebagian warga di lokasi penggenangan waduk. Persoalan ini kemudian berimbas pada kritik terhadap pemerintahan Soeharto hingga pihak investor yang mendanai proyek ini yakni, World Bank dan Bank Exim Jepang. Pihak-pihak ini dianggap yang bertanggungjawab atas penderitaan warga Kedung Ombo yang tidak terakomodir hak-hak hidupnya.

Akibat kondisi demikian, maka hingga kini banyak literatur yang memuat persoalan Kedung Ombo dengan berbagai macam latar belakang dan perspektif.

Dalam perspektif hukum, sebagaimana yang ditulis oleh Nusantara dan Budiman Tanuredjo.<sup>17</sup> Titik berat isi buku mereka lebih kepada peninjauan aspek hukum pengambilan keputusan Mahkamah Agung mengenai ganti rugi lahan warga Kedungpring yang tergusur oleh pembangunan waduk Kedung Ombo. Persengketaan warga Kedungpring di peradilan menjadi fokus dalam kajian ini dan terutama analisis mereka tentang putusan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung.

Perspektif yang berbeda dibangun oleh Aditjondro dalam tulisannya yang berjudul *The Media as Development "Textbook": A Case Study on Information Distortion in The Debate about the Soscial Impact of an Indonesian Dam*, yang melihat persoalan konflik di Kedung Ombo dibangun oleh peran media sebagai penyokong wacana dari pemerintah dalam upaya mengaburkan dan memutarbalikkan fakta-fakta mengenai dampak sosial yang diterima masyarakat sebagai korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Dalam tulisannya yang berbeda, berjudul *Large dam Victions and Their Defenders: The Emergence of an Anti-dam Movement In Indonesia*, yang melihat persoalan konflik di Kedung Ombo dari perspektif wacana pembangunan dan kepentingan umum. Pembangunan dan kepentingan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *loc. cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>George Junus Aditjondro, "The Media as Development "Textbook": A Case Study on Information Distortion in The Debate about the Soscial Impact of an Indonesian Dam dalam Cornel University", *Disertasi* pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Pemerintahan di Cornel University, 1993, hlm. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>George J. Aditjondro, "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia", dalam Philip Hirsch and Carol Warren (eds.), *The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources and Resistance*, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 29-54.

kecemburuan sosial antara mereka yang dijadikan korban pembangunan dengan mereka yang mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Orang-orang yang tanahnya diminta untuk pembangunan waduk, karena kesusahan yang mereka alami, menganggap bahwa pembangunan dengan jargon kemakmuran adalah mitos belaka. Bagi mereka ternyata yang menikmati adalah orang-orang yang berada di bawah waduk, sementara mereka yang berkorban alih-alih mendapatkan kesejahteraan, yang dialami justru sebaliknya—menjadi tumbal pembangunan.

Karya lain yang mengupas mengenai waduk Kedung Ombo adalah karya Stanley berjudul *Seputar Kedung Ombo*, mengetengahkan pula persoalan konflik antara warga dengan pemerintah dalam proyek pembangunan waduk Kedung Ombo.<sup>20</sup> Stanley berupaya membangun tulisannya dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial, sekalipun persoalan politik yang paling mendapatkan tekanan utama. Dari berbagai data yang diungkapkan terlihat tulisan Stanley mengakomodasi konflik di Kedung Ombo hingga sekitar tahun 1990-an.

Kajian yang juga mengulas persoalan konflik waduk Kedung Ombo adalah karya Prasetyohadi yang berjudul, *Democratic Actors in The Kedung Ombo Land Rights Struggle*.<sup>21</sup> Dari judulnya titik tekan yang diketengahkan adalah aktor-aktor yang terlibat dalam perlawanan masyarakat di Kedung Ombo. Beberapa aktor yang ia analisis diantaranya LSM, Rama Mangunwijaya, media

<sup>21</sup>Prasetyohadi, *Democratic Actor in The Kedung Ombo Land Right*Struggle (2004) http://democracyandpeace.blogspot.com/2004/11/democratic-

Struggle (2004), http://democracyandpeace.blogspot.com/2004/11/democratic-actors-in-kedung-ombo-land.html (diakses 9 Juli 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Stanley, *loc. cit.* 

massa dan mahasiswa. Cukup menarik dari tulisan ini bukan hanya membedah apa peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor tersebut, tetapi juga melihat nilai-nilai yang dipegang oleh aktor-aktor tersebut. Analisanya terhadap tiap aktor pada dasarnya menggunakan konsep gerakan sosial baru. Persoalan seperti kesempatan politik, *framing* dan analisis budaya masing-masing aktor berusaha untuk dibaca. Meskipun demikian, kajian ini bersifat deskriptif semata dengan tidak mengambil kesimpulan atas gejala pelaku-pelaku yang bermain dalam gerakan perlawanan Waduk Kedung Ombo.

Berbeda dengan itu, tulisan lain yang mengangkat persoalan Kedung Ombo adalah karya Emha Ainun Najib yang berjudul, *Gelandangan Di Kampung Sendiri: Pengaduan Orang-orang Pinggiran.*<sup>22</sup> Dalam memahami konflik yang terjadi di Kedung Ombo antara pemerintah dengan masyarakat, Najib mengartikulasikan gagasannya ke dalam sebuah istilah yang disebut *lingsem. Lingsem* menurutnya adalah kondisi psikologi sosial, dimana telah terjadi peralihan objektivitas persoalan ke dalam subyektivitas sosial. Subyektivitas yang dimaksudkan adalah ego yang menyangkut harga diri. Persoalan Kedung Ombo telah beralih dari kepada masalah harga diri daripada persoalan rill yang dihadapi, yaitu konflik pembebasan tanah. Akhirnya yang muncul adalah kondisi ingin saling menang, keinginan untuk mengalahkan yang satu terhadap yang lainnya. Dengan kata lain, penyelesaian masalah pada dasarnya adalah *zero sum game*, bukan sebuah solusi konkret atau *win-win solution* yang mungkin bisa dicapai.

<sup>22</sup>Emha Ainun Najib, *Gelandangan Di Kampung sendiri: Pengaduan Orang-orang Pinggiran*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2015), hlm. 5.

Konsep *lingsem* yang Najib bangun pada dasarnya adalah akibat berkelanjutan, dimana pangkal konflik di Kedung Ombo terletak pada pendekatan pemerintah yang tidak simpatik terhadap masyarakat. Menurutnya permasalahan di Kedung Ombo sebenarnya dapat diatasi sejak awal jika pemerintah mau melakukan perundingan kepada masyarakat atas standar ganti rugi, tetapi dengan cara sportif dan demokratis. Karena tidak terjadinya pendekatan yang demikian menyebabkan terjadinya konflik yang berbuntut pada *lingsem*. Oleh sebab itu, sekalipun Emha Ainun Najib melihat persoalan dari kacamata kognisi, tetapi variabel budaya yang berupa keengganan penduduk untuk pindah tidak mendapatkan sorotan olehnya.

Naskah akademik lainnya yang mengangkat persoalan Kedung Ombo adalah kajian Abdul Muntholib. Dalam papernya yang berjudul From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of Kedung Ombo Reservoir For Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia, 23 Abdul Muntholib mengungkapkan ada perubahan sosial-budaya yang dialami masyarakat Wonoharjo akibat pembangunan waduk Kedung Ombo. Dari makalah ini penulis terbantu untuk melihat bagaimana perubahan sosial-budaya itu berlangsung. Meskipun paper ini terbatas pada pembahasan perubahan sosial-budaya dari pertanian lahan kering ke model karamba dan kurang mencakup perubahan sosial kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Menggunakan perspektif yang sama, dengan mengambil wilayah yang berbeda dilakukan oleh Ardhi Setyawan Novandi<sup>24</sup>, menurutnya

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muntholib, *loc. cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ardhi Setyawan Novandi, "Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten

dampak pembangunan waduk secara sosial dan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat Grobogan, utamanya bagi kalangan petani.

Guntur Arie Wibowo<sup>25</sup> juga melakukan penelitian terhadap persoalan Kedung Ombo. Fokus penelitian itu terletak pada upaya para petani di Kecamatan Kemusu untuk melakukan pemberontakan. Sayanganya makna pemberontakan hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat reaktif dan abai untuk mengungkapkan bentuk-bentuk pasif dari penduduk Kemusu sebagai bentuk protes. Penelitian ini juga terbatas pada tahun 1990-an sehingga tidak mampu menghadirkan bagaimana kehidupan mereka yang masih melakukan protes hingga tahun-tahun berikutnya.

Penulis memakai pula laporan World Bank yang berjudul *Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience*. <sup>26</sup> Laporan ini memuat tentang pengalaman pembangunan bendungan-bendungan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia yang sebagian proses pembangunannya di danai oleh World Bank. Dari sini penulis terbantu, contohnya laporan ini memuat jumlah jiwa yang terdampak atas pembangunan waduk. Tak berhenti disitu dijabarkan pula bagaimana upaya relokasi yang dilakukan dan seperti apa realisasinya di lapangan.

-

Grobogan Tahun 1989-1998", dalam *Skripsi* di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Guntur Arie Wibowo, "Pemberontakan Petani Di Kecamatan Kemusu-Boyolali 1985-1993" *Journal Seunneubok Lada*, 2014 Volume 1, Nomor 1, hlm. 8-14.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>World Bank, "Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience", dalam *Precis*, World Bank, 2000, Number. 194, hlm. 4.

Dalam perspektif dialektika mengenai dampak positif maupun negatif terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo dikaji oleh Irene Hadiprayitno.<sup>27</sup> Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ada perdebatan antara pihak donatur pembangunan yakni, World Bank dengan berbagai Media maupun LSM yang mencoba menceritakan fakta lapangan. Perdebatan ini dapat dilihat dari klaim sepihak World Bank dan pemerintah Indonesia yang menganggap problem di Kedung Ombo telah selesai. Namun demikian, munculnya pemberitaan yang menarasikan masalah Kedung Ombo sebagai sebuah proyek yang gagal dalam mengakomodir hak-hak warga yang terdampak oleh media dan LSM, menjadi sebuah kritik terhadap pemerintah selaku pihak pelaksana proyek dan sekaligus terhadap donatur proyek tersebut.

Dari berbagai macam kajian di atas, minim literatur yang mengkaji persoalan waduk Kedung Ombo, khususnya di Kemusu dalam perspektif sejarah yang menempatkan korban pembangunan waduk Kedung Ombo sebagai subyek sejarah. Selain itu, dari lingkup temporal berbagai literatur di atas, belum ada yang mengkaji mengenai tema resistensi warga di Kemusu dalam menghadapi pembangunan waduk Kedung Ombo pada rentan waktu 1985 hingga 2002. Berbagai penelitian di atas lebih banyak berkonsentrasi pada tahun 1990-an. Tulisan Stanley memang mengetengahkan masalah yang terjadi di Kedung Ombo, tetapi pembahasan mengenai warga Kemusu yang bertahan hanya sebatas sebagai salah satu fakta pelengkap dalam kajiannya yang memiliki ruang lingkup lebih luas (Kedung Ombo). Selain itu juga terbatas pada sisi temporal tahun 1990-an.

<sup>27</sup>Hadiprayitno, *loc. cit.* 

Demikian juga tulisan Guntur Arie Wibowo, yang sekalipun mengkaji permasalahan Kedung Ombo dengan mengambil lingkup spasial di Kemusu, namun terbatas di sisi temporal pada 1990-an sehingga tidak menghadirkan sisi kehidupan setelah tahun itu yang sebenarnya banyak terjadi peristiwa penting, yang sayang bila tidak dihadirkan dalam penulisan sejarah. Demikian juga tulisan Aditjondro, Abdul Muntholib, Nusantara dan Budiman Tanurejo, serta Emha Ainun Najib, dimana mereka membangun tulisannya berdasarkan perspektif mereka masing-masing seperti telah diuraikan di atas. Kalaupun tulisan ini ada singgungan dengan kajian-kajian di atas, hal itu sebatas penggunaan fakta. Oleh sebab itu, sekalipun banyak penulis menjadikan konflik Kedung Ombo sebagai tema kajiannya, tetapi tulisan ini berbeda dengan kajian-kajian tersebut.

#### F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada empat langkah yang digunakan dalam penelitian ini: pengumpulan sumber (heuristik), pengujian sumber (kritisisme), interpretasi dan penceritaan atau penyajian (sinthese dan penulisan).<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm. 89. Penjelasan mengenai metode penelitian sejarah juga disebutkan dalam dua buku Kuntowijoyo lainnya yang berjudul *Metodologi Sejarah* dan *Penjelasan Sejarah*. Lihat juga Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Panitia Pengadaan Buku Ajar Gugus Pengembangan Mutu Akademik Pusat Penjamin Mutu Universitas Negeri Semarang dan Penerbit Unnes Press: 2007), hlm. 9.

#### 1. Heuristik

Secara umum sumber yang digunakan dalam penelitian terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan.

#### a. Sumber Tertulis

Ada dua jenis sumber tertulis yang digunakan, yaitu sumber primer kearsipan dan sumber sekunder<sup>29</sup> yang meliputi berbagai macam karya yang terkait dengan masalah Kedung Ombo. Pencarian kedua sumber ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dalam berbagai tempat. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali maupun Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, banyak didapatkan arsip-arsip yang terkait dengan masalah Kedung Ombo. Salah satunya adalah arsip soal relokasi penduduk yang berada di wilayah perhutani dan surat keputusan soal ganti rugi lahan bagi warga terdampak pembangunan waduk Kedung Ombo, sedangkan salah satu dokumentasi yang didapatkan adalah potret masyarakat yang berjuang melawan genangan air waduk.

Sumber arsip lainnya juga diperoleh dari koleksi perorangan, maupun instansi lain. Tokoh-tokoh Kedung Ombo yang saya temui memberikan sumbangan besar koleksi arsip mereka dan beberapa kliping dari surat kabar dan majalah. Dalam konteks gerakan di Kedung Ombo, mereka adalah orang-orang yang memainkan peran aktif, salah satu tokohnya adalah Bapak Jaswadi.

Banyaknya surat kabar yang membahas mengenai pembangunan waduk Kedung Ombo dengan berbagai hal yang menyertainya menjadi salah satu sumber

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Louis Gottschalk, *Understanding History: a primer of historical method*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto dengan judul *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 35.

primer yang juga saya gunakan. Mencuatnya berita-berita tersebut pada tahuntahun 1989-1990 di berbagai surat kabar ternama seperti, *Suara Merdeka*, *Kompas*, *Kedaulatan Rakyat*, *Wawasan*, *Suara pembaharuan*, *Forum Keadilan* membatu saya untuk mendapatkan data dan menganalisis persoalan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo. Berbagai majalah juga menjadi rujukan dalam mencari berbagai informasi terkait Kedung Ombo. Diantaranya seperti Majalah *Tempo*, *Radar* dan *Editor*.

Literatur-literatur kepustaaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti menjadi sumber tertulis sekunder yang juga digunakan. Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan berguna sebagai bahan pembanding, pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan yang dibahas.

Buku-buku yang dipakai diantaranya karya Stanley berjudul Seputar Kedung Ombo, buku berjudul Dua Kado Hakim Agung buat Kedung Ombo: Tinjauan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo yang ditulis oleh Abdul Hakim Garuda Nusantaraa dan Budiman Tanuredjo dan beberapa buku lainnya yang terkait. Sedangkan untuk jurnal yang dipakai adalah yang memuat karya Abdul Mutolib dan George Junus Aditjondro.

### b. Sumber Lisan

Sumber lisan dapat dikatakan sebagai informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang dituturkan oleh orang sebagai pelaku (primer) ataupun orang yang mendengar tentang peristiwa (sekunder).<sup>30</sup> Untuk masalah Kedung Ombo yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

banyak didapatkan informasi dari orang-orang yang secara langsung berhubungan dengan masalah Kedung Ombo. Informasi lisan diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan wawancara. Pencarian sumber lisan dalam penelilitian ini dibantu oleh beberapa narasumber antara lain, Jaswadi, Sadi, Widarti, Jimin, Darsono, Karmono, Senen, Tulus, Suroto, dan Parno.

#### 2. Kritik Sumber

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah kritik sumber. Ada dua kritik yang dilakukan, yaitu kritik eksternal dan internal. Dalam tahap ini saya melakukan penilaian mana yang relevan untuk dimasukan refrensi dan sumber mana yang tidak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesahihan sumber dan data penelitian.

## 3. Interpretasi

Kuntowijoyo mengatakan jika pada tahap ini adalah biangnya subyektivitas penulis yang masuk dalam tulisan mereka.<sup>31</sup> Ada dua hal yang sebenarnya dapat dipahami atas subyektivitas penulisan. Pertama, karena adanya kepentingan dan tendensi. Kedua, subyektivitas sebagai interpretatif akademik. Untuk hal yang disebut pertama, sebuah karya ilmiah sudah semestinya dapat melepaskan diri dari berbagai macam kepentingan, prasangka dan emosi pribadi penulis. Satu-satunya yang dibela adalah kebenaran itu sendiri. Tentunya saja kebenaran yang dimaksud adalah interpretasi subyektif penulis yang didasarkan pada data dan konsep yang dipegang. Dalam kategori kedua ini, maka penulisan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 100.

sejarah secara akademik adalah sah, sebab mendasarkan diri kepada metodologi. Pada tahap ini saya pun mulai melakukan praktik menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang telah diseleksi.

## 4. Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, dimana saya melakukan penulisan sejarah yang terejawantah dalam tulisan ini. Penulisan yang dipakai menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Beberapa istilah lokal juga dipakai untuk memeperjelas pemahaman masyarakat yang bersangkutan, tetapi disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku.

Dari segi penulisan, penyajian narasi yang dipakai berbentuk tematik. Namun demikian, hubungan antar bab dalam tulisan ini sebisa mungkin dibangun berdasarkan hubungan waktu agar aspek perubahan yang membangun kontinuitas antar bagian dapat dipahami dengan baik.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dari pembahasan yang ada di dalam tulisan ini. Penulisan dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang isinya memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang tertuang dalam Bab Satu. Penulisan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penjabaran watak pemerintahan Soeharto yang berkuasa secara politis dan menerapkan pembangunan secara otoriter. Watak ini

salah satunya termanifestasikan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo. Pembahasan ini tertuang dalam bab dua. Dalam bab tiga, memuat alasan-alasan warga dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan waduk. Alasan ini terkait dengan kompensasi besaran ganti rugi yang dinilai masyarakat tidak sepadan dengan harga tanah di sekitaran Kemusu. Pembahasan di bab selanjutnya lebih mengarah pada berbagai bentuk upaya masyarakat Kemusu yang bertahan dalam menghadapi genangan air waduk yang semakin naik pasca pintu waduk ditutup. Realitas ini kemudian menimbulkan kepedulian dari mahasiswa, ormas hingga LSM. Beberapa diantaranya mengunjungi lokasi Kemusu dan juga mengadakan aksi untuk menyuarakan penderitaan yang dialami masyarakat di lokasi genangan. Akhirnya, berbagai kampanye itu mampu untuk membuat pemerintah mulai mengakomodasi keinginan masyarakat dan diwujudkan dengan kebijakan yang kooperatif bagi sebagian warga yang masih bertahan di lokasi waduk. Penulisan penelitian ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang tertuang dalam bab lima.

## BAB 2 PEMBANGUNAN VERSUS PENGGUSURAN

#### A. Kuasa Politik Orde Baru

Soeharto merupakan presiden Republik Indonesia yang kedua setelah menggantikan Soekarno pasca melalui tragedi kemanusian luar biasa pada 1965, yang kemudian dikenal sebagai gerakan G 30 S.¹ Pada pemerintahan Soeharto atau yang akrab dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru segala aktivitas politik dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah dengan dalih menjaga stabilitas nasional, hingga tak ada satupun partai yang mampu menyaingi Golkar, selaku kendaraan politik Soeharto dan semua rakyat dibuat bungkam olehnya.² Di Bidang Ekonomi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peristiwa G 30 S dianggap banyak pihak sebagai bagian dari Kudeta Merangkak Soeharto. Peristiwa ini disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), namun karena kepentingan politik Seoharto, maka selama masa pemerintahanya peristiwa ini lazim disebut sebagai G30S/PKI 1965. Tiga kekuatan politik utama bangsa yang kala itu diwakili partai dan ideologi PNI, Partai Islam, dan PKI harus saling serang dan membantai pada peristiwa gerakan G30S. Terlepas dengan segala kontroversinya peristiwa ini menyisakan konflik dan dampak yang berkepanjangan. Tentu dalam hal ini PKI menjadi perhatian karena dianggap sebagai dalang atas hilangnya nyawa 7 Jenderal waktu itu dan dicap sebagai pihak yang akan melakukan pemberontakan. Namun seiring banyaknya studi dan penelitian mulai banyak yang berdalih bahwa, dalam berbagai kesimpulan justru mengungkap PKI hanyalah kambing hitam guna melanggengkan posisi Soeharto untuk naik ke puncak singgasana dengan CIA (Amerika Serikat) berada dibelakangnya. Lihat: Herman Dwi Cipta, Kontroversi G 30 S, (Jakarta: Palapa, 2013), hlm.176. Lihat juga Baskara T Wardaya, Membongkar Supersemar Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno, (Yogyakarta: Galang Press, 2009).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kuasa posisi politik Soeharto semakin kentara tatkala pada 1975 pemerintah dengan berani melakukan perampingan partai menjadi hanya tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Pembangunan (PDI). PPP adalah fusi dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Sedangkan PDI adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia), Murba. Lihat: Phil Gustiana IM, Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam, (Jakarta: RM books, 2012), hlm. 86.

melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Soeharto mulai membuka keran penanaman modal asing dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki saham 5% dalam sektor strategis yang semula pada masa pemerintahan Soekarno ditutup. Setahun berselang, kebijakan ini kembali dilonggarkan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 yang mana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi 49% sebagai upaya untuk menggenjot pembangunan di tanah air.<sup>3</sup>

Kebijakan penanaman modal asing jelas menjungkirbalikkan semangat dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). Hal ini dapat dipahami mengingat, masuknya kapital atau modal yang mengusung semangat pembangunan akan membutuhkan ruang, terkhusus adalah lahan. Lahan diperlakukan sebagai komoditas di bawah kapitalisme yang berfungsi menggerakkan arus modal untuk menghasilkan akumulasi nilai.<sup>4</sup>

UUPA merupakan produk revolusioner perundang-undangan yang mengatur distribusi lahan di tanah air yang semula sempat lahir di masa pemerintahan Soekarno pada 24 September 1960, namun sayangnya belum sempat dilaksanakan sama sekali. Undang-undang ini antara lain mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh

<sup>3</sup>Syamsul Hadi dkk, *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hlm 18.

<sup>4</sup>Neil Smith, *Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space*, (Oxford: Ideas – Basil Blackwell (1991)), hlm. 94-96.

hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Lahirnya UU Penanaman Modal Asing yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya pula UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, akan berdampak terhadap status suatu lahan atau tanah yang rentan untuk menjadi sebuah komoditas yang diperebutkan. Hal ini kemudian memicu banyaknya konflik perampasan tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sekaligus menjadi bukti pengkhianatan terhadap mandat UUPA.<sup>5</sup>

Kebijakan di atas bagi pemerintah adalah sebuah langkah yang ditempuh untuk merealisasikan paradigma developmentalisme yang dianut oleh pemerintah Orde Baru. Developmentalisme sendiri merupakan sebuah diskurs pembangunan yang diciptakan negara-negara maju untuk mendominasi negara-negara berkembang. Mereka menggunakan alasan untuk memecahkan masalah keterbelakangan yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua. Setelah dilontarkan diskurs pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi ekonomi pada negara dunia ketiga, tetapi diskurs pembangunan itu sendiri justru menjadi media penghancur segenap gagasan alternatif rakyat Dunia Ketiga terhadap kapitalisme.<sup>6</sup>

Dalam paradigma demikian, pemerintah menerapkan konsep Trilogi pembangunan yang dipandang sebagai kata kunci untuk merealisasikan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hendri F. Isnaeni, *Reforma Agraria: Konflik Agraria Terjadi Karena UUPA Tidak Dijalankan*, (Jakarta: Historia, 2012), hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2011) hlm. 186.

kemakmuran masyarakat. Ada tiga hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis; terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi; dan terjadinya pemerataan pembangunan.<sup>7</sup> Konsep ini termanifestasikan dalam bentuk program Replita 5 tahunan yang menjadi payung hukum dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan.<sup>8</sup>

Segala kebijakan tentang pembangunan kemudian diperkuat dengan model pemerintahan yang sentralistik, yang mana segala kebijakan diatur, direncanakan, serta dikontrol oleh pusat. Pada pemerintahan orde baru, rakyat tak mampu berbuat banyak hal, kecuali tunduk pada segala keputusan pemerintah. Wajah pemerintahan saat itu lebih banyak sebagai manifestasi dari penguasa yang otoriter, tidak kompromistis dan menentukan segalanya. Di lain hal, dalam kondisi saat itu tak ada satupun kekuatan poltis di tanah air yang mampu mengintervensi kebijakan Soeharto.<sup>9</sup>

Kebijakan pembangunan proyek-proyek kemudian berimbas pada eksploitasi pemanfaatan lahan yang meningkat. Pemerintah gencar melakukan pembebasan lahan demi memperlancar proyeknya. Saat itulah terjadi banyak

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Trilogi ini ini sering dikenal sebagai stabilitas, pembangunan, dan pemerataan. Dalam penerapannya pemerintah ode baru beranggapan bahwa dalm menciptakan stabilitas negara dibutuhkan satu ideologi dalam segala bidang. Kehidupan politik dan konflik ideologi yang tinggi pada masa orde lama dinilai tidak kondusif dalam menciptakan berjalannya pembangunan bangsa. Lihat: Sulastomo, *Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Baskara T Wardaya, "Menengok Kembali Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Secara Kritis", dalam *Soeharto Sehat*, Asvi Warman Adam (ed), (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Samuel Gultom, *Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 13.

gejolak perampasan tanah. Kasus Tapos pada 1971 dalam pembuatan lapangan golf, yang mana PT Rejo Sari Bumi (RSB) yang sebagian besar sahamnya dimiliki anak-anak Soeharto merampas lahan petani Desa Cibedug dan desa lain di sekitarnya untuk mewujudkan obsesi Soeharto memiliki *ranch*. Tanah seluas 31,6 hektare itu dibuldoser untuk pembangunan lapangan golf Cibodas. Petani penggarap dan buruh dipaksa menerima uang ganti rugi sebesar Rp 30 per m2. Kasus perampasan semacam itu juga terjadi di belengguan Situbondo, kasus pariwisata di Parang Gupito, kasus di Majalengka hingga kasus di Sumenep. 10

Tindakan serupa diterapkan pemerintah tatkala Soeharto membangun berbagai proyek waduk atu bendungan di Jawa.<sup>11</sup> Mulai dari perencanaan waduk Jipang di Jawa timur, waduk Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa tengah, serta bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.<sup>12</sup> Di Jipang, waduk ini

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, (Jakarta: KPG bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation, 2001), hlm. 8.

bendungan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam pelaksanaannya diterbitkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Empat (1984/1985-1988/1989). Tujuan pembangunan waduk maupun bendungan ini dijelaskan dalam Bab I yang memuat Tujuan dan Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan waduk ditujukan untuk menanggulangi kekurangan air pada musim kemarau seperti: kebutuhan air minum, pertanian, serta penyediaan air industri dan kelistrikan, penggelontoran drainase kota dan pengendalian banjir. Program pembangunan waduk ini kemudian masuk dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang setiap tahunnya diserahkan Presiden kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Lihat: Kepres Nomor 21 tahun 1984 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) 1984/85-1988/89.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>George J. Aditjondro, "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia", dalam Philip Hirsch and Carol Warren (eds.), *The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources and Resistance*, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 29-54.

menenggelamkan 7.000 Ha tanah yang dihuni 50.000 jiwa. Hal serupa terjadi di Wonogiri, pembangunan waduk Gajah Mungkur yang berlangsung sejak 1978 harus diterima warga dengan hanya mendapat ganti rugi Rp 280 per m², padahal harga pasaran Rp 500 per m². Di Mrica Banjarnegara juga terjadi hal yang sama, pembangunan bendungan untuk PLTA yang dimulai pada 1982 ini berakhir dengan kekalahan rakyat yang harus rela digusur negara. Begitupun yang terjadi di Saguling dan Cirata Jawa Barat di tahun yang sama. 4

Dalam kasus Kedung Ombo yang sebagian besar dana pembangunannya merupakan pinjaman Bank Dunia dan Bank Exim Jepang misalnya, rakyat diminta

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Laporan-laporan ini ditulis oleh George Junus Aditjondro pula dalam sebuah kata pengantar untuk buku *Seputar Kedung Ombo* yang ditulis oleh Stanley. Pengantar ini cukup panjang karena termuat dalam 20 halaman. Stanley, *Seputar Kedung Ombo*, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 17-37.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Selain didukung oleh kebijakan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan ideologi pembangunan, program pembangunan waduk merupakan aplikasi dari Revolusi Hijau yang berorientasi untuk mencapai intensifikasi hasil pertanian. Revolusi Hijau sendiri pertama kali tercetus di Meksiko ketika pakar agronomi asal Amerika Serikat, Norman Borlaug, berupaya membawa konsep pertanian modern Amerika Serikat ke Meksiko guna merubah konstelasi pangan dan pertanian di negara tersebut. Feeding the worlds growing population, adalah semboyan optimisme yang dibawa program Revolusi Hijau untuk dikampanyekan ke berbagai negara di dunia melalui U.S Agency for International Development (USAID). Di Indonesia program itu deiterjemahkan ke dalam apa yang disebut sebagai Panca Usaha Tani, yang antara lain berisi: (1) Pengunaan bibit unggul; (2) Pemupukan; (3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara bercocok tanam. Bendungan/ waduk sendiri merupakan terjemahan atas program tersebut pada poin 4 dan mendapat prioritas dalam Program Replita pada masa Orde baru. Namun demikian, perlu diingat bahwa Revolusi Hijau bukanlah sebentuk kemajuan IPTEK yang sama sekali bebas kepentingan, realitasnya istilah Revolusi Hijau kerap dilawankan dengan istilah "Revolusi Merah" yang mana pada dekade 1950-an hingga 1960-an hampir separuh rezim di dunia mengatasnamakan diri berpijak di atas nilai-nalai marxisme. Wahyu Budi Nugroho, "Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru", dalam Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness, 2018 Volume 12, Nomor 1, hlm. 56-62.

pindah dari tanah-tanah miliknya yang akan dipakai untuk keperluan proyek.<sup>15</sup> Dengan dalih Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pemerintah merasa legal dalam memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya terhadap pemerintah sebagai obyek pembangunan.<sup>16</sup> Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali harus bertransmigrasi atau pindah ke permukiman baru. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menawar atau mewakili diri mereka dalam proses musyawarah, karena langsung disodori surat pernyataan untuk kesedian menerima ganti rugi uang sebesar yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

# B. Tatanan Masyarakat yang Terusik

Mayoritas penduduk Kemusu yang terkena dampak pembangunan waduk Kedung Ombo bermata pencaharian sebagai petani. Ada petani penggarap sendiri dan buruh tani. Terdapat 8.398 orang yang menjadi petani penggarap sendiri dan 7.491 orang bekerja sebagai buruh tani, sedangkan lainnya bekerja sebagai buruh industri sebanyak 796 orang, buruh bangunan jumlahnya ada 2258 jiwa. Terdapat pula pedagang yang bisa dibilang sebagai matapencaharian minoritas di Kemusu

<sup>15</sup>Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Karmono, "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)", *Tesis* Jurusan Hukum Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Isdiyanto, *Menyelami Kedung Ombo*, (Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2003), hlm. 4-5.

yakni 130 orang, sedangkan jumlah pegawai di Kemusu terdapat 517 orang atau jiwa. Data selengkapnya bisa dilihat dalam tabel 1 yang disajikan di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah Penduduk di Kemusu Menurut Mata Pencaharian 1983

Desa	Petani Sendiri	Buruh Tani	Buruh Industri	Buruh Bangu- nan	Peda- gang	Pega- wai
1. Kamuman	720	860	365	330	15	36
2. Kendel	1412	552	142	150	-	69
3. Bawu	752	1517	38	180	-	21
4. Klewor	560	482	28	67	10	45
5. Sarimulyo	335	327	-	216	17	19
6. Watugede	341	87	6	25	-	12
7. Ngrakum	521	87	35	67	28	32
8. Genengsari	257	35	41	212	36	127
9. Kemusu	772	642	16	312	13	37
10. Lemahireng	212	335	86	324	-	12
11. Guwo	360	174	7	125	2	64
12. Nglanji	875	1800	32	145	3	11
13. Wonoharjo	1281	773	-	107	6	32
Jumlah	8398	7491	796	2258	130	517

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1983, BPS Boyolali

Banyaknya jumlah petani di Kemusu tidak terlepas dari kondisi kesuburan wilayah tersebut. Hal ini berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian di Kemusu. Dengan menggunakan data di tahun 1983 terdapat 8.398 petani penggarap, mereka mampu menghasilkan 7.075 ton padi sawah, 607 ton padi ladang, 7.700 ton jagung, 5.717 ton ketela pohon, 150 ton kacang tanah, 179 ton kedelai. Artinya bila kita rata-rata satu petani penggarap di kemusu dalam jangka satu tahun dapat menghasilkan 0,85 ton padi sawah; 0,073 ton padi ladang; 0,92 ton

jagung; 0,68 ton ketela pohon; 0,02 ton kacang tanah; 0,02 ton kedelai. Hasil ini bahkan lebih dari cukup untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka juga menghasilkan buah-buahan seperti pisang, nangka dan lain-lain. Hasil pertanian ini selain digunakan untuk konsumsi pribadi dan sisanya umumnya dijual ke kota atau wilayah lain. 19

Tabel 2. Produksi Pertanian di Kemusu dari tahun 1980-1984

Tahun	Padi sawah (ton)	Padi Ladang (ton)	Jagung (ton)	Ketela Pohon (ton)	Kacang Tanah (ton)	Kedelai (ton)
1980	6.029	-	4.570	9.721	263	158
1981	8.884	1.350	7.848	14.412	560	192
1982	9.196	-	1.427	4.539	167	222
1983	7.075	607	7.700	5.717	150	179
1984	8.306	749	6.459	9.030	369	353

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali dalam angka `1980-1984

Menurut penuturan Senen mereka terkadang menjual hasil buah-buahan seperti pisang sampai ke pasar Legi di Solo. Meskipun jauh, menurutnya ini adalah cara agar mendapatkan keuntungan lebih, karena harga di pasar Solo jauh lebih tinggi bila dibandingkan di sekitaran Boyolali. Tak hanya hasil buah, dia bahkan menjual bambu pula. Perjalanan dari Kemusu ke Solo ditempuh dengan jalan kaki.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Angka-angka ini merupakan hasil kalkulasi penulis dengan mengacu pada data laporan BPS Kabupaten Boyolali di tahun 1983. Angka-angka kalkulasi ini mnejadi penting untuk menunjukan seberapa jauh hasil pertanian di Kemusu waktu itu. Produktivitas ini menjadi penting untuk menilai seberapa jauh tingkat perekonomian di Kemusu sebelum dibangunnya waduk.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Stanley, op. cit., hlm. 45

Perjalanan tersebut membutuhkan waktu sampai dengan 8 jam. Senen berangkat sekitar jam setengah 5 setelah menunaikan shalat Subuh. Selama perjalanan mereka bisa sampai beristirahat 3-5 kali tergantung dengan beratnya barang dagangan yang mereka bawa. Sampai di Solo, orang-orang Kemusu seperti Senen menginap di rumah saudara sebelum keesokan harinya kembali lagi ke Kemusu.<sup>20</sup>

Secara ekonomi, penduduk Kemusu bila dilihat dari tingkat penghasilan yang diperoleh dapat dikatakan cukup besar. Misalnya di desa-desa di lingkungan proyek Kedung Ombo, seorang buruh tani dapat menerima upah Rp 500,- per hari untuk 4 jam kerja. Para buruh tani biasanya bekerja pagi mulai jam 7 hingga jam 11. Mereka kemudian kembali bekerja pukul 2 sampai jam 5, artinya dalam sehari seorang buruh tani bisa mendapatkan penghasilan sampai Rp 800,-. Seorang tukang kayu dapat memperoleh Rp 750,- untuk 1 hari kerja. Seorang pembuat anyaman bambu dapat memperoleh penghasilan rata-rata Rp 600,- per hari. Melihat realitas demikian pembangunan waduk akan berdampak pada kemapanan kehidupan para warga di Kemusu, khususnya para petani yang menggantungkan kehidupannya pada sisi pertanian. Penghasilan tersebut bisa dibilang di atas rata-rata Upah Minimum Kerja (UMK) nasional yang kala itu pada tahun 1980 dipatok sebesar Rp 600/hari. <sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Senen pada 20 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Nusantara, op. cit., hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Stanley, op. cit., hlm. 45

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Angka ini diambil dari penelitian Tim LPU Universitas Kristen Satya Wacana tahun 1981. Sebagai perbandingan, harga beras per kilo pada tahun 1981 adalah Rp 196,8. Harga beras rata-rata per kg ini adalah untuk menengah di Kota Semarang pada bulan Juni 1981.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa sebelum dibangunnya waduk Kedung Ombo, masyarakat di Kemusu memiliki kemandirian ekonomi dan pekerjaan petani yang menunjang kebutuhan hidup keseharian mereka. dibangunnya waduk Kedung Ombo yang menggusur 3.006 KK di Kemusu justru akan berdampak terhadap tatanan kehidupan ekonomi yang telah terbangun. Mereka akan kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan pendapatannya dari sektor pertanian akibat ditenggelamkannya tanah sawah dan tegalan mereka.

Tabel 3: Jumlah Penduduk Kecamatan Kemusu Sebelum Pembangunan Waduk Kedung Ombo 1980-1984

Tahun	Jumlah Penduduk
1980	40.489
1981	41.535
1982	42.362
1983	42.923
1984	43.498

Sumber: Data diolah dari laporan BPS Kabupaten Boyolali dari tahun 1980-1984

Sementara itu, jumlah penduduk Kecamatan Kemusu, sebagaimaan ditunjukan oleh tabel 3, di tahun-tahun sebelum prosesi pembangunan waduk Kedung Ombo berlangsung, jumlah penduduk terbilang stabil. Pada tahun 1980 jumlah penduduk sebanyak 40.489 jiwa. Setahun berselang jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 41. 535 atau dengan kata lain terjadi pertumbuhan penduduk diatas 1.000 jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah penduduk terus meningkat menjadi 42.362 jiwa. Mulailah pada tahun 1983 dan 1984 pertumbuhan jumlah penduduk sedikit menurun yakni 42.923 dan 43.498 jiwa. Namun demikian, jumlah pertumbuhannya selalu di atas angka 600 jiwa. Artinya, angka-angka ini

menunjukan bahwa jumlah penduduk di Kemusu relatif stabil dan belum terjadi mobilitas perpindahan penduduk secara masif, sekalipun isu pembangunan waduk Kedung Ombo sudah dibicarakan.<sup>24</sup>

Sebagian besar penduduk di Kemusu menganut agama Islam. Selain itu, terdapat pula pemeluk agama Prostestan dan Katholik, seperti Desa Juwangi dan Pilangrejo. Juga agama Hindu dan Budha seperti yang ada di Jerukan, Juwangi dan Pilangrejo. Selain menjadi penganut agama resmi, sebagian besar orang-orang menjalani gaya hidup dan keyakinan *kejawen*, seperti orang Jawa pada umumnya. Ada beberapa tempat yang masih dikeramatkan oleh penduduk, seperti sebuah pohon beringin dan sendang di dekat bukit Juwangi. Sendang Jolotundo yang berada di dekat bukit Juwangi, yang pernah menjadi tempat pertapaan Raja Pakubuwono X, ramai dikunjungi orang pada hari raya Idul Fitri dan malam satu suro. Menurut kepercayaan, orang yang mandi di Sendang Jolotundo pada hari tersebut akan awet muda. Selain itu, penduduk juga masih melakukan berbagai upacara yang berhubungan dengan penghormatan leluhur seperti *Punggahan*, *Nyadran*, atau *Apitan*. Pangahan, atau *Apitan*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>World Bank, "Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience", dalam *Precis*, World Bank, 2000, Number. 194, hlm 4.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Stanley, op. cit., hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa kejawen bukanlah sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai keagamaan, tapi menunjukan suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Jawaisme. Kejawen dianggap hanya suatu sikap khas terhadap kehidupan yang mampu mengatasi perbedaan agama. Lihat: N. Mulder, *Pribadi Dan Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 43.

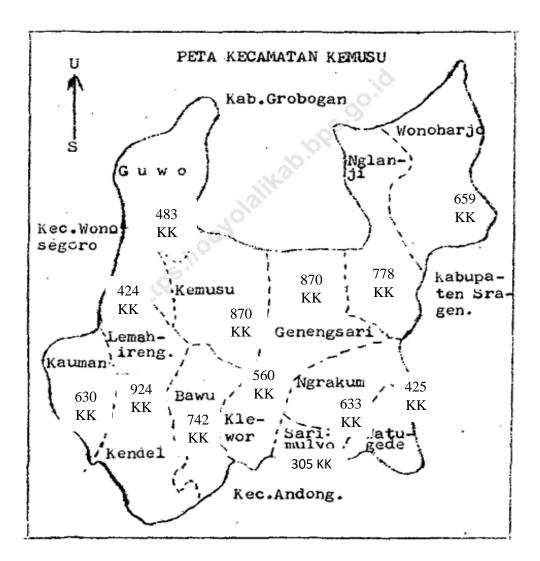
<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Nusantara, *op.cit*, hlm. 9-10.

Upacara-upacara seperti *nyadran dan apitan*, adalah bentuk penghormatan terhadap jasa leluhur yang telah berjuang sejak jaman penjajahan mempertahankan tanah kelahiran yang mereka diami. <sup>28</sup> Mereka juga mempercayai bahwa tanah yang mereka tinggali merupakan warisan leluhur ini masih memiliki ikatan sakral. Hal inilah yang menjadi alasan tersendiri bagi sebagian penduduk menolak ganti rugi berupa uang maupun tanah pengganti di tempat lain tatkala pemerintah ingin membangun waduk Kedung Ombo dan menggusur penduduk Kemusu. Selain itu, penduduk yang sebagian besar tanahnya merupakan warisan, dipesan oleh nenek moyangnya untuk tidak dijual. Usaha pembebasan yang disertai ganti rugi berupa uang dianggap sebagai pengkhianatan tehadap pesan orang tua.<sup>29</sup> Proyek pembangunan waduk Kedung Ombo mengundang kekhawatiran penduduk karena selain dengan pemberian ganti rugi berupa uang yang jauh dibawah harga standar, pemerintah juga memaksa penduduk pindah ke tempat lain, dengan adanya transmigrasi atau perpindahan penduduk akan membuat putusnya hubungan kekerabatan yang selama ini dijalin dalam ikatan yang kuat.<sup>30</sup> Berikut dalam gambar 1 ditampilkan peta wilayah Kemusu sebelum digenangi oleh air waduk Kedung Ombo beserta jumlah KK yang mendiami.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Hasyim Hasanah, "Implikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru (Tinjaun Filsafat Sejarah Pragmatis)", dalam *Wahana Akademika*, 2016 Volume 3. Nomor 2, hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Stanley, op. cit., hlm. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Jaswadi dari Desa Kedungmulyo 15 Juli 2018.



Gambar 1. Peta Wilayah Kemusu sebelum Penggenangan waduk Kedung Ombo dan Jumlah KK yang Mendiami pada Tahun 1984.
Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1984, BPS Kabupaten Boyolali

# C. Ramalan yang Berkembang

Sebelum pembangunan waduk Kedung Ombo berlangsung, di Kemusu berkembang mitos bahwa akan ada tregedi besar. Sebagaimana penuturan warga,

mitos itu digambarkan dengan ungkapan *Geger Serang Kaping Telu*. <sup>31</sup> Mitos tersebut dilukiskan oleh penduduk seperti berikut,

Bedahe Serang kang kaping telu kuwi geger tundung. Perange, perang brandal. Ana Mangut mangan manggar. Ora ketang sak eyupe payung, Serang kuwi dibedah ping pitu ora bakal bisa bedah.".....<sup>32</sup>

Kalimat kutipan di atas ditafsirkan masyarakat setempat sebagai keadaan akan adanya genangan air besar yang akan menenggelamkan kehidupan mereka. Penenggelaman akan mengusir warga karena air akan datang dan semakin naik secara cepat untuk memporak-porandakan desa-desa beserta para penghuninya. Sementara perang berandal diartikan sebagai permainan yang tidak memakai caracara jujur, mirip tingkah laku para berandal yang mana rakyat diintimidasi oleh oknum aparat. Baik militer maupun sipil.<sup>33</sup>

Adanya ikan yang bisa makan buah kelapa (mangut mangan manggar) diartikan oleh orang Kemusu dan penduduk sekitar waduk Kedung Ombo bahwa pada saat setelah penggenangan, naiknya permukaan air genangan yang telah menenggelamkan pohon kelapa akan membuat buahnya dapat dimakan oleh ikan.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Geger Serang yang pertama dan kedua sebelumnya telah terjadi. Orangorang di Kemusu menyebut pertempuran antara Panembahan Notoprojo melawan Belanda sebagai *Geger Serang Sepisan*. Sedangkan pertempuran Nyi Ageng Serang dalam membantu Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa sebagai sebuah *Geger Serang Kaping Loro*. Wawancara dengan Jaswadi, 15 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Terjemahan; "Terjadinya Geger Serang yang ke tiga nanti akan mengusir penduduk dari tempat tinggalnya sendiri. Perangnya perang brandal. Ada ikan mangan buah kelapa. Meskipun tinggal selembarpayung, bumi serang tidak akan terbelah walaupun setiap harinya dibelah tujuh kali." Sumber: Senen, Desa Kedungrejo, Wawancara 16 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Penjelasan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Jaswadi.

Hal tersebut akan diikuti dengan tenggelamnya sebagian kekayaan orang-orang di kawasan Serang.<sup>34</sup>

Pesan tersebut memiliki makna semacam peringatan agar semua orang berkumpul dengan anak cucuknya masing-masing pada saat terjadi keributan. Bila terjadi dan melihat keributan dihimbau agar hanya menengoknya dari lubang jendela saja. Artinya penduduk Kemusu tidak perlu pindah dari tanahnya, meskipun terjadi sebuah keributan besar.

Kehidupan masyarakat juga ditunjang kuatnya nilai budaya yang mengakar dan dipercayai oleh penduduk bahwa tanah yang merupakan warisan nenek moyang yang ditempati dan digarap secara turun-temurun adalah sah milik penduduk sehingga harus dijaga sampai kapanpun. Ungkapan *sedhumuk bathuk senyari bumi* 

<sup>35</sup>Menurut Mbah Suroto cerita-cerita yang dia sampaikan merupakan ramalan yang disampaikan secara turun temurun. Pengetahuan yang dia miliki terkait mitos dan ramalan ini dahulu merupakan warisan dari orang tua dan

kakeknya yang biasanya diceritakan malam hari sebelum mereka tidur.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Mbah Suroto, Desa Wonoharjo, wawancara 14 Juli 2018.

ditohi nganti pecahing dada wutahing ludiro<sup>36</sup> mengobarkan semangat untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang dimiliki ketika ada pihak, tak terkecuali pemerintah, yang ingin mengusir warga Kemusu dari tanah kelahirannya.<sup>37</sup>

Semboyan di atas dahulunya sengaja dimunculkan oleh orang Jawa untuk mengobarkan semangat dalam mempertahankan tanahnya dalam peperangan melawan Kolonial Belanda. Filosofi *mangan ora mangan asal ngumpul*, <sup>38</sup> juga muncul dalam kepercayan banyak pihak. Pada jaman penjajahan Belanda ungkapan seperti itu ditanggapi dengan sinisme yang ditafsirkan sebagai sebuah filosofi dari kaum pribumi (Jawa) yang pemalas. Filosofi ini sebenarnya muncul tatkala terjadi peperangan yang berlarut-larut antara raja Jawa yang berniat mengusir Belanda dari tanah Jawa melawan Kolonial Belanda yang dibantu beberapa Pangeran Jawa, peperangan tersebut mengakibatkan penderitaan pada rakyat jelata dan kekurangan pangan. Rakyat sipil yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi, hanya bisa bersikap pasrah.

Pada saat itulah para kerabat enggan berpisah untuk mencari selamat sendiri-sendiri, karena di mana-mana situasinya sama saja. Mereka bertekad untuk terus berkumpul, meskipun untuk itu berarti mereka bakal *ora mangan* karena persediaan pangan yang tinggal sedikit akan cepat habis bila dimakan banyak

<sup>36</sup>Soedargo, "Hukum Agraria Dalam Era Pembangunan", dalam Putri Agus Wijayati, *Forum Ilmu Sosial*, 2008, Volume 13, Nomor 1, hlm. 75. Putri Agus Wijayati mengutip Soedargo dalam penelitiannya yang berjudul *Pemilikan dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur)*.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Pakpahan, *Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo*, (Jakarta: Forum Adil Sejahtera, 1990), hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Stanley, *op. cit.*, hlm. 101.

orang. Dalam anggapan rakyat yang sedang menderita saat itu, persatuan jauh lebih penting dan menguntungkan dibandingkan persoalan makanan terutama untuk memperkuat semangat dan optimisme untuk terus hidup dan menghadapi musuh serta marabahaya secara bersama-sama. Optimisme hidup dan ancaman kematian yang datang hanya bisa dihadapi dengan cara bersama dan saling tolong.

Sementara itu dalam konteks historis, masyarakat berasumsi bahwa perjuangan warga Kemusu dalam mempertahankan tanah kelahiran serta menolak pembangunan waduk acapkali bertaut kelindan dengan perjuangan panembahan Notoprojo, yakni seorang bupati di Serang yang menolak Perjanjian Giyanti<sup>39</sup> dan memilih tetap berjuang mengusir Belanda dari bumi Mataram. Namun sayangnya perjuangan Panembahan Notoprojo ini harus gugur karena ditumpas oleh Belanda dan mengakibatkan RA Kustiah atau dikenal sebagai Nyi Ageng Serang dibuang

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) adalah buah dari politik adu domba pihak Kolonial Belanda untuk ikut campur dalam kerajaan Mataram dan memanfaatkan perselisihan di internal kerajaan untuk mendikte salah satu pihak demi menumpas segala bentuk perlawanan yang ingin mengusir Belanda dari Mataram. Dalam konflik di internal Mataram, Panembahan Notoprojo (Bupati Serang) membela Pangeran Mangkubumi yang bergabung dengan Raden Mas said untuk bersama-sama dalam berperang melawan Sunan Pakubuwono II yang dianggap mendapatkan tahta Mataram dengan tidak sah. Dalam perang ini Sunan Pakubuwono II yang mulai kewalahan kemudian dibantu oleh Belanda. praktik perang Gerilya yang diapakai oleh Mangkubumi dan Raden Mas Said benar-benar membuat pakubuwono kewalahan hingga tewas karena sakit sehingga kemudian tahta Mataram dipegang oleh pakubuwono III. Akhirnya agar Mataram tidak jatuh ke tangan Mangkubumi dan Raden Mas Said, muncullah inisiasi untuk membuat Perjanjian Giyanti, dimana VOC Belanda menjadi inisiator dan dimediator. Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua wilayah. Pertama adalah Kesunanan Surakarta di bawah pemerintahan Pakubuwono dan kedua adalah Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Mangkubumi. Dari sinilah Mangkubumi dijinakan oleh Belanda dengan memberi kekuasaan di Yogyakarta. Sedangkan Raden Mas Said dengan di dukung oleh Panembahan Notoprojo merasa kecewa atas hasil perjanjian ini. Joko Darmawan, Mengenal Budaya Nasional Trah Rajaraja Mataram di Tanah Jawa, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 67.

ke Yogyakarta. Selesai masa pembuangan itu, Nyi Ageng Serang kemudian kembali terlibat dalam perjuangan melawan Belanda bersama dengan pangeran Diponegoro pada Perang Jawa (1825-1830).

Selama bergerilya melawan Belanda, Nyi Ageng Serang ditengarai pernah singgah di beberapa wilayah di Kecamatan Kemusu yang kemudian di abadikan menjadi nama desa dan tempat, seperti Nglanji, Ngrakum, Mlangi, Guyuban, Kedungiyu dan Kemusu itu sendiri. Bahkan, sungai yang melewati Kemusu pun juga dinamai Sungai Serang. Cerita ini kemudian mneybar dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat Kemusu dari generasi ke genarasi yang pada akhirnya menjadi salah satu motivasi warga Kemusu untuk memilih mempertahankan tanah kelahiran dan berjuang menolak pembangunan Waduk Kedung Ombo.

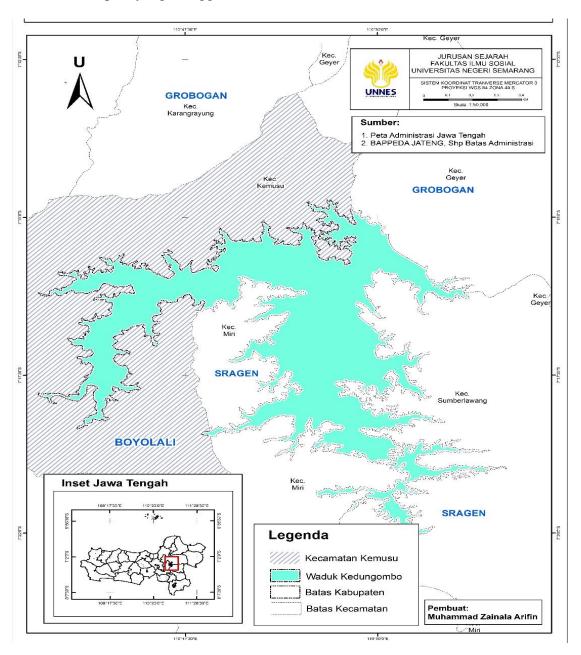
## D. Kondisi Geografis

Daerah genangan waduk Kedung Ombo, terutama yang ada di Kabupaten Boyolali tepatnya di Kecamatan Kemusu mempunyai tanah yang cukup subur. Hal ini disebabkan karena di sebelah selatan terdapat Gunung Berapi yang masih aktif. Sebagian besar material yang keluar bersamaan dengan aktifnya kerja Gunung Merapi, menjadi lapisan penyubur tanaman. Lapisan ini dilarutkan oleh air hujan menuju sungai utama yaitu sungai Serang. Kemudian menumpuk di daerah lembah Sungai Serang, terutama di daerah Ampel dan Suruh.<sup>40</sup>

Sekalipun secara administrasi Kecamatan Kemusu merupakan wilayah Boyolali, namun demikian, secara geografis wilayah ini justru lebih dekat dengan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Stanley, op. cit., hlm. 43.

Kecamatan Geyer dan Karangrayung yang masuk dalam wilayah Grobogan serta Kecamatan Miri dan Sumberlawang yang masuk dalam Kabupaten Sragen.<sup>41</sup> Berikut adalah peta yang menggambarkan kondisi Kemusu.



Gambar 2: Peta Wilayah Kecamatan Kemusu Sumber: Koleksi pribadi Muhammad Zainal Arifin

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Kecamatan Kemusu dalam Angka 1984.

Luas Kecamatan Kemusu kurang lebih 99,08 km2 atau 9,76% dari seluruh luas kabupaten Boyolali dan terletak pada 110° .22'-110° bujur timur dan 7°.36'-70°,71' lintang selatan. Kecamatan Kemusu memiliki ciri-ciri fisik alam dengan sebelah selatan dan barat dikelilingi pegunungan kapur yaitu pegunungan Kendeng Selatan, dengan sungai besarnya Sungai Serang yang membelah Kecamatan Kemusu menjadi wilayah utara dan selatan.

Sebagian besar wilayah tersebut terdiri dari pegunungan kapur dengan kondisi tanah termasuk jenis litosol, regosol dan margalit gromosol serta crumosol. Berada di atas ketinggian 75 sampai 400 M diatas permukaan laut, sehingga pola pertanian yang dimiliki sebagian besar adalah sawah dan tegalan yang biasa ditanami palawija.<sup>42</sup>

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pembangunan waduk di Kemusu akan menenggelamkan areal lahan yang subur. Hal ini tentu berdampak terhadap areal pertanian yang secara otomatis berkesinambungan dengan kehidupan masyarakat di Kemusu secara luas. Kehilangan lahan pertanian, mata pencaharian ataupun sumber perekonomian, dan juga harapan hidup adalah beban yang harus diterima oleh warga Kemusu yang terdampak oleh pembangunan waduk Kedung Ombo.

<sup>42</sup>Kecamatan Kemusu dalam Angka tahun 1984.

#### BAB 3

#### ANCAMAN EKSISTENSI RUANG DAN KEHIDUPAN

## A. Entitas yang Terabaikan

Proyek besar Kedung Ombo merupakan proyek lapar tanah sehingga membutuhkan lahan yang amat luas. Luas genangan Waduk Kedung Ombo bila ketinggian air mencapai elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha luasan tanah yang mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek Bendungan Waduk Kedung Ombo.¹ Areal itu terdiri dari 2.230 Ha sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan. Waduk Kedung Ombo menenggelamkan 37 desa di empat Kecamatan dalam tiga kabupaten.²

Di Kabupaten Boyolali, Proyek Waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan tanah seluas 1503, 6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa tersebut diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Kemusu.<sup>3</sup>

Kebutuhan lahan yang luas, sebagaimana penjelasan di atas tidak terlepas dari besarnya waduk Kedung Ombo yang dibangun. Bangunan waduk itu berbentuk seperti tapal kuda. Terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, *Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo*, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm.7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdul Muntholib, "From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of Kedung Ombo Reservoir for Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia", *The Social Science II*, 2016, Volume 13, hlm. 3342.

bangunan pelipah, bangunan penyadap, pembangkit listrik tenaga air dan terowongan penggelak. Waduk Kedung Ombo memiliki daya tampung air sebesar 65 juta meter kubik, dengan luasan permukaan waduk sekitar 47 Km persegi. Ketinggian permukaan air minimal 64,50 meter dan maksimal 90 meter. Ketinggian air normal 7,50 meter. Air waduk akan meluap apabila permukaan air mencapai elevasi 95 meter.<sup>4</sup>

Besarnya bangunan waduk yang memiliki daya tampung air besar pula, akan menenggelamkan kawasan hutan, sawah, tegalan hingga permukiman warga. Artinya pembangunan waduk ini akan menghilangkan ekosistem di kawasan-kawasan tersebut dan juga mengancam entitas penduduk yang sudah terlebih dahulu tinggal di lokasi calon genangan air waduk.

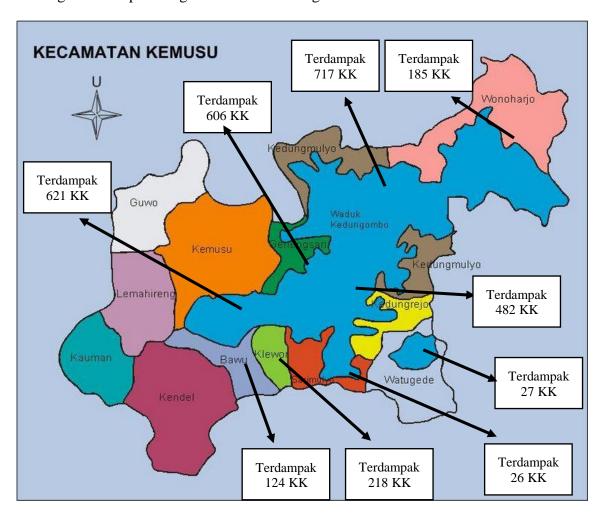
Penduduk yang terdampak atas proyek pembangunan waduk Kedung Ombo secara keseluruhan berjumlah 5.268 kepala keluarga. Lebih dari separuh diantaranya yakni, 3.006 KK di wilayah Kecamatan Kemusu. Bila satu KK ratarata memiliki 5-6 anggota keluarga maka, jumlah penduduk di Kemusu yang terkena dampak atas pembangunan waduk adalah sekitar 15.000 jiwa.<sup>5</sup>

Pembangunan ini akan menggusur warga Kemusu dari ruang kehidupannya, yang berarti memaksa mereka untuk meninggalkan segala yang mereka punya. Lepasnya hubungan kekerabatan antara sanak saudara dan tetangga hingga kerelaan mereka untuk tidak lagi bisa menjalani ritus kebudayaan yang biasa mereka jalani

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Irene Hadiprayitno, *Hazard Or Right? The dialectics Of Development Practice and The Internatonally Declared Right to Development, With Special Reference to Indonesia*, (Oxford: Intersentia, 2009), hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Stanley, *op. cit.*, hlm. 44.

seperti, ziarah kubur, sedekah bumi, *slametan*, dan lain-lain. Segala bangunan sosio-cultur yang semula berkembang akan hilang dan tergusur oleh keberadaan waduk. Tak hanya berdampak pada kehidupan warga Kemusu yang harus digsusur, namun pembangunan waduk juga akan membuat mereka kehilangan sumber kehidupan utama yang di dominasi oleh petani.<sup>6</sup> Gambar 3 di bawah ini menunjukan berapa saja jumlah KK di 9 desa Kecamatan Kemusu yang harus digusur oleh pembangunan waduk Kedung Ombo.



Gambar 3. Gambaran wilayah Kecamatan Kemusu yang Bakal Tergenangi Air waduk Kedung Ombo 1987.

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1987, BPS Kabupaten Boyolali

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Nusantara, op. cit., hlm. 8.

Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk Kedung Ombo berakibat tergusurnya kehidupan penduduk di Kemusu, mereka harus kehilangan lahan yang lumayan luas sebagaimana yang dialami oleh Sadi Dwiyowiyoto dari Dusun Guyuban, Desa Genengsari, tanahnya yang terkena waduk menurutnya ada 2 Ha. Hal serupa dialami oleh Parno dari Dusun Kedungpring, Desa Nglanji yang juga harus kehilangan 1 Ha lahannya. Menurutnya, lahan, rumah, semua habis tak tersisa dan tidak ada simpanan apa pun ketika semua ditenggelamkan oleh air waduk. Tak hanya kehilangan harta benda, tetapi baginya pembangunan waduk adalah sebuah tindakan yang mencabut dirinya dari pekerjaannya sebagai petani yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya.

Bergeser ke Desa Ngrakum, hal serupa dialami oleh Senen. Dirinya kehilangan tempat tinggal dan sawah seluas 1 hektare karena terendam oleh waduk Kedung Ombo. Posisi rumahnya memang hanya berjarak beberapa meter dari bibir waduk, sehingga masuk area *greenbelt* atau sabuk hijau yang harus bersih dari permukiman. Dia terpaksa mencari tempat tinggal baru.

## B. Menolak Ganti Rugi

Proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan waduk Kedung Ombo dilakukan dengan cara membentuk Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Jumlah ini merupakan hasil wawancara dengan Sadi dan Parno pada 13-14 Juli 2018. Menurutnya jumlahnya memang bervariasi, tapi bila melihat data besaran kepemilikan lahan di kemusu pada tahun 1988, rata-rata setiap warga di Kemusu memiliki jumlah kepemilikan lahan sebedsar 0,62 Ha.

diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15/1975<sup>8</sup> yang melibatkan Pemerintah Daerah serta ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan Proyek Induk BBWS Jratunseluna. Tidak ada masalah dalam pembebasan tanah milik PT Perhutani Unit I Jawa Tengah maupun 382 ha tanah bengkok/kas desa, karena hakikatnya, adalah negara membebaskan tanah negara. Persoalan baru muncul ketika pemerintah harus membebaskan tanah penduduk sekitar lokasi waduk yang terdampak pembangunan. 10

Proses pembebasan tanah untuk pembangunan waduk dimulai sejak tahun 1985.<sup>11</sup> Penduduk Kemusu diundang ke balai desa untuk mendengar penjelasan rencana pembangunan waduk. Di Ngrakum, Nglanji dan Genengsari aparat desa langsung melakukan tanpa penjelasan lebih dahulu. Di dusun Kedungcemplung dan Kedunglele, penduduk langsung disuruh membubuhkan tanda tangan atau cap jempol dan dipaksa menerima ganti rugi.<sup>12</sup>

Panitia Pembebasan tanah mengaku bahwa sudah melakukan musyawarah dengan sejumlah warga, setidaknya melalui perangkat desa, hingga beberapa kali.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wawancara dengan Karmono pegawai BPN Boyolali pada 22 Juli 2018. Pemerintah berpedoman pada tatacara pembebasan tanah yang berlaku saat itu, yaitu Permendagri No 15/Tahun 1975 jo Permendagri No 1/Tahun 1975 jo Surat Mendagri No ba.2/384/2/75 tanggal 24 Februari 1975.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Isdiyanto, op. cit., hlm. 19.

 $<sup>^{10}</sup>Ibid$ .

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Proses pembebasan tanah diawali dengan proses pendataan tanah penduduk yang terkena proyek kedung Ombo. di Boyolali intruksi mengenai pendataan tanah penduduk disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Boyolalai, M. Hasbi kepada Camat Kemusu melalui surat tertanggal 28 Agustus 1985. Keterangan lebih lanjut lihat lampiran.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>"Hari-hari Penting Menuju Kasasi", *Forum Keadilan* Nomor 8, Tahun III, 4 Agustus 1994, hlm. 102. Penjelasan mengenai proses awal

Panitia juga mengundang atau menghubungi para pemilik tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek, panitia juga mengaku sudah mengundang warga untuk datang ke berbagai pertemuan/musyawarah, dilain pihak sebagian warga menolak atau tidak menyepakati hasil musyawarah. Hal ini berbeda dengan pengakuan warga, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya tidak ada musyawarah dalam penetapan ganti rugi karena cendrung dilakukan sepihak.<sup>13</sup>

Menurut sebagian warga yang menghadiri undangan di balai desa mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas persoalan ganti rugi tanah dan harta benda milik penduduk. Mereka justru hanya mendengarkan penjelasan petugas dari Dinas Transmigrasi tentang kemungkinan bertransmigrasi ke luar Jawa bagi tanahnya yang terkena proyek pembangunan waduk Kedung Ombo. Pada pertemuan tersebut juga diedarkan daftar hadir sebagai bukti memenuhi undangan. Penduduk yang hadir diminta membubuhkan tanda tangannya, atau cap jempol bagi yang tidak bisa membuat tanda tangan. Sebagaimana dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, daftar hadir warga bahkan beberapa kali dimanipulasi. 14

Pertemuan-pertemuan tersebut juga turut mengundang beberapa orang yang diklasifikasikan pemerintah sebagai ET. Mereka dipaksa untuk menandatangani/cap jempol blanko-blanko kesedian ikut bertransmigrasi ke luar Jawa. Apabila mereka sedia ditransmigrasikan, predikat ET yang disandangnya dijanjikan akan dihapus. Orang-orang yang berpredikat ET tersebut akhirnya

<sup>13</sup>Stanley, op.cit., hlm. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Tulus pada 17 Juli 2018.

dihadapkan pada situasi yang tidak ada pilihan lain kecuali ikut bertransmigrasi.<sup>15</sup> Menurut Sadi Dwijowiyoto dari Guyuban, Desa Genengsari yang bekerja sebagai Guru PNS, dirinya bahkan diancam di skorsing dan tidak digaji bila dirinya tidak mau pindah dari lokasi genangan.<sup>16</sup>

Cara yang dipakai oleh pemerintah untuk membebaskan tanah warga adalah dengan kebohongan dan membodohi warga setempat, pada awalnya penduduk selalu diundang untuk mengikuti suatu pertemuan guna membahas soal ganti rugi, namun ketika warga mendatangi pertemuan tersebut, ternyata digunakan untuk menekan dan memaksa agar segera menandatangani persetujuan ganti-rugi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Posisi warga yang pada saat itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tunduk atau bertahan membela diri.<sup>17</sup>

Pembebasan lahan yang tak selesai inilah pada akhirnya menimbulkan masalah karena warga masih bertahan disaat proses penggenangan dan peresmian waduk telah berlangsung. Pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, justru memunculkan berbagai praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah Daerah dibebani untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan sebagai areal genangan tidak berjalan lancar. Hal ini tak lain karena warga yang tinggal di area waduk cendrung mempertahankan tanah yang

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>"Menggapai Keadilan di Kedung Ombo", *Forum Keadilan* Nomor 8, Tahun III, 4 Agustus 1994, hlm. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Wawancara dengan Sadi yang sekarang tinggal di Permukiman Kayen, 13 Juli 2018. Sebelum memutuskan untuk mengambil pilihan pindah ke Kayen, Sadi tinggal di Desa Genengsari.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Wawancara dengan Senen pada 20 Juli 2018.

dimiliki, sehingga aparat pemerintah dengan bantuan militer menggunakan berbagai cara agar usaha pembebasan tanah segera selesai. 18

Ketetapan besarnya uang ganti rugi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah I Jateng No.593/135/1986 tertanggal 25 Agustus 1986. Besaran ganti rugi sebesar Rp 380,- per meter persegi untuk sawah, sedangkan tanah pekarangan dihargai sebesar Rp 633,- per meter persegi. 19

Di masyarakat jusru banyak beredar lembaran fotokopi yang sebenarnya berlainan tanggal penetapannya, menambah kebingunan masyarakat terhadap kesimpangsiuran besar uang ganti rugi yang disediakan pemerintah. Apalagi dalam tanggapan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam atas pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI pada rapat kerja tanggal 25 November 1987 menyebutkan besaran ganti rugi yang disediakan pemerintah untuk pembebasan tanah proyek Waduk Kedung Ombo sebesar Rp. 3000,- per meter persegi. Tanggapan Mendagri tersebut, beserta kliping dari sebuah koran yang memuatnya beredar secara meluas di masyarakat.<sup>20</sup>

Tidak lama kemudian muncul lagi Surat Mendagri Soepardjo Rustam tertanggal 13 Januari 1988 No. 592.2/464/SJ yang berisi bantahan. Bantahan itu menyatakan, pemerintah tak pernah menetapkan ganti rugi sebesar Rp 3.000,- per meter persegi untuk tanah yang terkena proyek Kedung Ombo. Dalam

<sup>20</sup>"Gubernur Akui Ada Oknum "Sunat" Uang Ganti Rugi", Kedaulatan Rakyat 28 November 1987.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>"Tak Perlu Kekerasan untuk Tangani Kedung Ombo" *Suara Merdeka*, 25 Januari 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Stanley, op. cit., hlm. 86

penjelasannya, pemerintah menyatakan hanya mengacu pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593.8/105/1988.<sup>21</sup> Acuan ini menetapkan besaran ganti rugi Rp. 322-805/m2 untuk tanah/sawah dan Rp 2.472,5-8.487/m2 untuk bangunan/rumah. Peningkatan jumlah besaran ganti rugi ini tidak lepas dari banyaknya warga yang masih menolak besaran ganti rugi berdasarkan ketetapan sebelumnya.<sup>22</sup>

Beberapa surat keputusan lain yang muncul belakangan, yang menyangkut besar ganti rugi atas tanah yang terkena proyek, betul-betul tidak lagi dipercayai lagi oleh masyarakat. Apalagi harga ganti rugi tanah resmi pemerintah dianggap masyarakat sangat rendah untuk harga sepetak tanah yang subur, keadaan semakin memburuk tatkala terjadi praktek-praktek kekerasan dan intimidasi terhadap warga. Hal ini membuat masyarakat merasa resah. Mereka tak bisa membayangkan harus melepas tanah dan rumah, juga makam leluhur maupun budaya masyarakat setempat untuk ditenggelamkan air waduk, hanya dengan ganti rugi sebesar sebungkus rokok untuk setiap m2.<sup>23</sup> Akibatnya ada beberapa warga yang terpaksa tidak memperpanjang KTP-nya karena diancam dibubuhi ET pada KTP barunya. Mereka akhirnya tidak bisa leluasa bepergian. Misalnya dalam mengurus surat-surat administrasi di kelurahan juga dipaksa meneken persetujuan ganti rugi.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>"Selebaran di Kedung Ombo", *Tempo* 15 April 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Untuk soal ganti rugi harga yang ditetapkan pemerintah memang berubahubah. Sedari awal saat musyawarah tidak ada kesepakatan antara warga dengan pihak panitia pembebasan tanah. Melaui SK Gubernur, pemerintah telah mematok harga terlebih dahulu tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat. Untuk kejelasan soal ganti rugi dan perubahannya, lihat SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593.8/105/1988 di lampiran.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>"Selebaran di Kedung Ombo", *Tempo* 15 April 1989.

Bahkan, sempat pula tersebar isu, yang membangkang akan di petrus-kan (dibunuh dengan cara ditembak seperti para gali dulu waktu 1965).<sup>24</sup>

Tekanan-tekanan itu ternyata dilawan oleh masyarakat. Kendati diancam, mereka serentak menolak hadir setiap kali diundang aparat. Setiap kali tim pembebasan tanah datang, mereka tak menanggapinya. Mereka juga tidak memperpanjang KTP dan ada 25 orang Kemusu yang lari ke hutan karena dituduh anggota PKI. Perlakuan pemerintah yang sewenang-wenang semakin jelas terlihat yaitu dengan memberikan stigma *mbalelo* untuk warga yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, warga yang menolak direlokasi dianggap sebagai simpatisan PKI. Ketika warga melakukan protes atas stigma ini dan menolak ganti rugi dengan alasan apapun, aparat desa maupun kecamatan mengimbuhkan kode ET (Eks Tahanan Politik) pada KTP-KTP warga yang dianggap *mbalelo*. Padahal kode ET sebelumnya hanya diberikan kepada tahanan politik yang semuanya bekas anggota/simpatisan PKI atau terlibat dalam G30S. Sebelum ada proyek pembangunan waduk, tidak ada seorangpun warga yang tinggal di area

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Stanley, op. cit., hlm. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Wawancara dengan Jimin pada 18 Juli 2018. Jimin merupakan anak dari Jaswadi. Menurutnya ketika mendekati magrib, mereka sudah bersiap untuk pergi ke hutan. Aparat biasanya datang waktu malam dan masuk ke setiap rumah warga untuk menandatangani persetujuan ganti rugi. Akhirnya bagi mereka yang menolak ganti rugi, biasanya setiap malam pergi ke hutan dan kembali ke rumah pada keesokan harinya. Jimin sendiri waktu itu masih berumur belasan tahun, dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jaswadi, bapaknya.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>"Mereka Mencoba Tidak Menyerah", *Tempo* 26 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> "Hari-hari Penting Menuju Kasasi", Forum Keadilan 4 Agustus 1994.

pembangunan waduk Kedung Ombo di Kemusu yang pada KTP-nya tertera kode ET. Pemberian stigma *mbalelo* inilah yang menimbulkan reaksi berlebih.<sup>28</sup>

Bagi penduduk yang bertahan, proyek pembangunan waduk Kedung Ombo yang harus membebaskan tanah yang dimiliki untuk kepentingan penggenangan air waduk dipahami sebagai tindakan yang tidak berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kuatnya nilai budaya yang mengakar dan dipercayai oleh penduduk dimana tanah yang merupakan warisan nenek moyang yang ditempati dan digarap secara turun temurun adalah sah milik penduduk sehingga harus dijaga sampai kapanpun.<sup>29</sup>

Secara umum ada dua model pola perolehan kepemilikan tanah di wilayah yang terkena pembangunan Waduk Kedung Ombo. Pertama, mereka yang memiliki tanah dari hasil jual-beli. Pola perolehan kepemilikan tanah yang kedua adalah mereka yang mendapatkan hak atas tanahnya dari warisan orang tua secara turun temurun.<sup>30</sup>

Data yang dihimpun penulis menunjukan bahwa mereka yang menolak relokasi dan memilih bertahan di wilayah genangan waduk Kedung Ombo sebagian

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>"Menunggu Sang Air Meyentuh", *Tempo* 25 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Wawancara dengan Jaswadi pada 15 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Pemilikan perorangan turun temurun (*Erfelijk Individueel Grondbezit*) merupakan suatu bentuk pemilikan tanah secara kekal yang dapat diserahkan kepada ahli warisnya. Lazimnya mereka tidak akan melepaskan sawahnya kepada orang lain karena sangat menjunjung tinggi hak milik sebagai barang warisan yang akan diberikan kepada keturunanannya. Lihat: Putri Agus Wijayati, "Pemilikan dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur)", *Forum Ilmu Sosial*, 2008, Volume 13, Nomor 1, hlm. 76.

besar merupakan warga yang memiliki tanah dari warisan leluhur. Dari hasil analisis data yang di dapat dari BPN Kabupaten Boyolali dan dari pihak Kecamatan Kemusu, sebagian besar penduduk di Kecamatan Kemusu mendapatkan hak atas tanah mereka melalui hasil warisan. Dari 1.916 KK yang memilih bertahan di lokasi pembangunan waduk, sebanyak 73,17 % KK memperoleh hak atas tanahnya dari warisan leluhurnya.

Tabel 4. Jumlah KK yang Terdampak Beserta Status Kepemilikan Tanah Warga yang Bertahan Sampai Desember 1988

Kecamatan	Jumlah KK yg terdam- pak	Sumber Perolehan Tanah Warga Yang Bertahan			
		Jumlah Perolehan Peroleh		Perolehan	
		KK yang	tanah dari	tanah dari jual	
		bertahan	warisan/	beli	
			hibah		
Kec. Kemusu					
1. Wonoharjo	185	0	0	0	
2. Nglanji	717	364	223	141	
3. Kemusu	621	486	349	137	
4. Genengsari	606	320	227	93	
5. Ngrakum	482	448	380	68	
6. Watugede	27	6	6	0	
7. Klewor	218	191	142	49	
8. Bawu	124	99	73	26	
9. Sarimulyo	26	2	2	0	
Sub total	3.006	1.916	1.402	514	
		(67,74 %)	(73,17%)	(26,82%)	

Sumber: Analisis dari Laporan BPN Kabupaten Boyolali mengenai data kepemilikan lahan warga Kecamatan Kemusu.

# C. Detik-Detik Penggenangan

Target Pemda Boyolali untuk menyelesaikan secara tuntas masalah pembebasan tanah yang terkatung-katung sekali lagi harus mundur, dari akhir maret

menjadi Juni. Target bulan Juni 1988 yang sebenarnya tak bisa ditawar lagi, ternyata mundur lagi tanpa kepastian. Ketergesaan penyelesaiaan pembebasan tanah tersebut sebenarnya berkaitan dengan dana pinjaman luar negeri dari Bank Exim Jepang, yang akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan pembebasan tanah apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.<sup>31</sup> Untuk wilayah Sragen dan Grobogan yang masih terdapat banyak masalah dan ketidakpuasaan dari penduduk yang tanahnya terkena proyek secara resmi dianggap telah tuntas.<sup>32</sup>

Meskipun pemerintah bertekad untuk tidak melakukan penundaan penggenangan lagi ataupun menaikkan uang ganti rugi dan menyatakan tidak akan memaksa penduduk untuk pindah keluar dari daerah genangan, aparat pelaksana masih mencoba melakukan upaya akhir untuk mengosongkan daerah genangan. Berbagai upaya akhir yang coba dilakukan aparat pemerintah daerah adalah dengan tidak lagi menggunakan tekanan atau intimidasi.<sup>33</sup> Mereka mendekati penduduk

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama. Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988. Lihat "Warga Masih Tolak Ganti Rugi", *Suara Merdeka*, 22 Juni 1988. Namun kenyataannya batas waktu tersebut diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan sistem konsinyasi.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Penduduk di Sragen pernah mencoba mengangkat kasus pembebasan tanah dengan menuntut Kanwil Departemen PU dan Pemda Tingkat I Jateng lewat bantuan LBH Semarang. Namun terjadi hambatan-hambatan seperti undangan sidang yang tak pernah sampai pada penduduk Sragen. LBH Semarang pada akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatannya karena penduduk Kedung Ombo di Sragen yang menjadi kliennya dinilai memberikan keterangan yang tidak benar. Lihat *Suara Merdeka*, 25 Desember 1987. Penduduk di wilayah Sragen juga pernah meminta bantuan LBH Jogja, DPC PDI, DPD PDI, hingga DPP PDI.

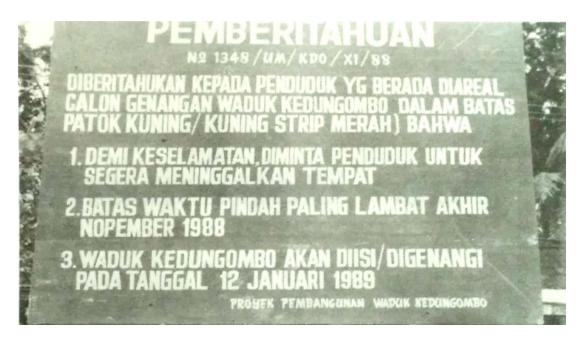
<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Tapi upaya aparat yang berkesan simpatik ini hanya berlangsung sebentar, yaitu antara pertengahan bulan November 1988 sampai dengan peresmian

yang belum mau pindah dari daerah genangan dengan mendatangi penduduk dari rumah ke rumah untuk dibujuk agar bersedia pindah. Aparat penerangan membuat pertunjukan-pertunjukan rakyat seperti ketoprak dengan titipan pesan-pesan pembangunan. Pihak Pemda membuat selebaran-selebaran dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa, pengumuman dengan mobil-mobil keliling yang berisi himbauan kepada penduduk yang belum mengambil uang ganti rugi agar segera mengurus dengan jalan menghubungi perangkat desanya masing-masing. Aparat juga meminta kepada penduduk yang telah mengambil uang ganti rugi agar segera pindah.<sup>34</sup>

Pada bulan November, pihak proyek pembangunan waduk Kedung Ombo mengeluarkan pemberitahuan bernomor 1348/UM/KDO/XI/88. Pengumuman itu menghimbau pada penduduk yang berada di areal genangan dalam batas patok kuning (daerah bahaya) dan kuning strip merah (daerah bahaya I) agar segera meninggalkan lokasi paling lambat akhir November 1988. Papan-papan besar yang memuat pemberitaan tersebut dibuat dan dipasang dijalan-jalan strategis, disetiap pertigaan dan mulut desa. Palang-plang yang dipasang tersebut memuat tiga poin pemberitahuan. Pertama, demi keselamatan, diminta penduduk untuk segera meninggalkan tempat. Kedua, batas waktu pindah paling lambat akhir November 1988. Ketiga, waduk Kedung Ombo akan diisi/digenangi pada tanggal 12 Januari 1989. Gambar 4 menunjukan bagaimana papan-papan tersebut dipasang sebagai pemberitahuan agar warga segera meninggalkan lokasi genangan.

penggenangan, di mana Kedung Ombo dinyatakan sebagai daerah tertutup, kembali tekanan dan intimidasi dipergunakan. Lihat: Stanley, *op. cit.*, hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Stanley, *op. cit.*, hlm. 113.



Gambar 4: Perintah Kepada Warga untuk Meninggalkan Wilayah yang Terkena Genangan Waduk 1989 Sumber: *Tempo*, 25 Maret 1989

Setelah upaya akhir untuk memindahkan penduduk dari daerah genangan tidak banyak membuahkan hasil, Muspida Boyolali membentuk tim khusus yang kemudian mengerahkan dua belas orang jurusita dari Pengadilan Negeri setempat. Para Jurusita tersebut ditugaskan untuk menghubungi dan meminta penduduk agar bersedia menerima ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekali lagi, usaha tersebut tidak banyak membuahkan hasil.<sup>35</sup>

Pihak Komisi A DPRD Tingkat 1 Jateng yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek waduk Kedung Ombo pada tanggal 14 Desember 1988 menemukan data baru. Mereka terkejut dengan masih adanya 1.916 KK yang berada di lokasi genangan.<sup>36</sup> Komisi A DPRD Tingkat 1 Jateng meminta agar

<sup>36</sup>Lihat: "Menunggu Sang Air Meyentuh", *Tempo* 25 Maret 1989. Data ini di berbagai media disebutkan dengan jumlah yang beragam. Hal ini mungkin terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Wawancara dengan Karmono pegawai BPN Boyolali.

pemerintah segera mendirikan pos Komando terpadu beserta barak-barak penampungan dan perahu karet. Seruan pihak DPRD ini ditanggapi oleh pihak Pemda lewat rapat tanggal 10 Januari 1989 di Makodim Boyolali. Rapat memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) 0724 di bawah koordinasi Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso.<sup>37</sup>

Tanpa sebab-sebab yang jelas, tanggal 12 Januari 1989 yang menurut rencana akan dilakukan peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo, ternyata ditunda. Menurut sumber resmi, penundaan tersebut dikarenakan tidak sinkronnya jadwal acara Gubernur Jateng HM Ismail dengan menteri PU Ir Radinal Mochtar. Sedangkan isyu yang muncul di daerah genangan, penundaan itu disebabkan penduduk yang tetap enggan pindah.<sup>38</sup>

Penduduk di daerah yang bakal tergenang menyambut berita penundaan upacara penutupan pintu air waduk dengan berjingkrak-jingkrak. Mereka yang tampaknya tidak mengetahui bahwa penggenangan tersebut hanya ditunda dua hari itu, merasa gembira dan optimis bahwa peresmian penggenangan memang akan ditunda sampai masalah relokasi selesai.<sup>39</sup>

karena beberapa warga yang bertahan bisa saja jumlahnya berubah setiap hari, mengingat tidak adanya pendataan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Sementara itu seiring menaikknya air genangan, warga tidak bisa diprediksi perpindahannya. Media massa menyebut jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang menyebut 1.698 KK (*Kompas*, 4 Januari 1989) dan ada yang menyebut jumlah 1.916 KK (*Wawasan*, 5 Januari 1989).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Ibid*,.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>"Penggenangan Waduk Kedung Ombo Diundur 1 Hari", *Suara Merdeka* 13 Januari 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid*...

Tetapi harapan penduduk agaknya sia-sia saja, karena tanggal 14 Januari 1989 pukul 09.55 tepat, Menteri PU Ir Radinal Mochtar didampingi Gubernur Jateng HM Ismail, Ketua DPRD Jateng Ir Soekorahardjo, Ketua Komisi V DPRRI dan tiga bupati yang daerahnya terkena proyek pembangunan waduk, melakukan peresmian penggenangan. Peresmian dilakukan dengan cara menimbun tubuh bendungan dan pelepasan balon, yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda ditutupnya pintu terowongan waduk oleh Gubernur HM Ismail.<sup>40</sup>

Dalam sambutannya, Menteri PU Ir Radinal Mochtar menyatakan terimakasih kepada pemerintah atas keberhasilan pembangunan proyek Kedung Ombo yang telah memakan waktu cukup lama dan pengorbanan sangat besar. Hal itu telah membutktikan mantapnya jalinan koordinasi Pemda Jateng dan jajaran dibawahnya, dengan pihak proyek Jratunseluna. Sedangkan Gubernur Jateng HM Ismail menyatakan, bahwa sudah sepantasnya apabila para penduduk dari Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan yang termasuk daerah genangan waduk Kedung Ombo, yang telah merelakan dan mengorbankan tanahnya digelari "Pahlawan Pembangunan". 41

Beberapa wartawan yang mencoba meliput peresmian penggenangan ditangkap oleh petugas keamanan, karena dianggap memasuki kawasan tanpa pengenal yang dikeluarkan panitia. Sedangkan beberapa wartawan yang mencoba

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Stanley, *op. cit.*, hlm. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Bernadette Whitelum, "Rhetoric And Reality in the World Bank's Relations with NGOs: an Indonesia Case Study", *A thesis* submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Australian National University, 2003, hlm 272.

menelusuri daerah genangan untuk mengetahui perkembangan situasi terakhir, mendapat peringatan. Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso, selaku Komandan Satgaspam waduk Kedung Ombo memberlakukan daerah genangan sebagai daerah tertutup semenjak peresmian penggenangan. Setiap orang yang hendak memasuki daerah genangan harus memperlihatkan surat keterangan yang hanya dikeluarkan Korem 074/Warastratama Surakarta.<sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>"Menunggu Sang Air Meyentuh", *Tempo* 25 Maret 1989.

#### BAB 4

#### MELAWAN TANPA KEKERASAN

### A. Mencoba Tidak Menyerah

Keputusan pemerintah untuk melakukan peresmian penggenangan tanggal 14 Januari 1989, dinilai banyak pihak sebagai suatu keputusan yang tergesa-gesa, terlepas dari kemungkinan utang dan malu yang harus disandang pemerintah Indonesia apabila terjadi penundaan lagi. Kesan tergesa-gesa nampak dari masih bertahanya kurang lebih 1.916 KK di lokasi genangan.

Bulan Januari, ketika dilakukan penutupan pintu waduk dan peresmian, merupakan saat musim hujan turun. Hujan deras yang turun di daerah hulu Sungai Serang, juga di kota-kota seperti Sragen, Boyolali, dan Salatiga, segera mengisi anak sungai-anak sungai. Hanya dalam waktu seminggu setelah penutupan pintu waduk, ketinggian permukaan air telah mencapai elevasi 57, 20 meter. Genangan air telah menenggelamkan sejumlah dukuh di Kelurahan Wonoharjo seperti Dukuh Kedung Uter, Kedung Lele, Jetis dan Cermai. Keadaan ini melesat dari ramalan semula, yang diperkirakan hingga akhir Maret 1989 elevasi air baru akan mencapai 60-65 meter.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>"Menunggu Sang Air Meyentuh", *Tempo* 25 Maret 1989. Data ini di berbagai media disebutkan dengan jumlah yang beragam. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa warga yang bertahan bisa saja jumlahnya berubah setiap hari, mengingat tidak adanya pendataan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Sementara itu seiring menaikknya air genangan, warga tidak bisa diprediksi perpindahannya. Media massa menyebut jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang menyebut 1.698 KK (*Kompas*, 4 Januari 1989) dan ada yang menyebut jumlah 1.900 KK (*Wawasan*, 5 Januari 1989).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>"Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo Capai 56,59 meter", *Suara Merdeka* 20 Januari 1989.

Sungai Serang yang dibendung sudah tak tampak lagi, genangan air semakin melebar menggenangi apa saja. Mulai pepohonan pisang, kelapa, hingga jalan-jalan di daerah-daerah yang cukup tinggi. Jalan antar desa terputus. Sarana transportasi seperti sepeda dan mobil tidak bisa dipergunakan lagi. Anak-anak yang akan bersekolah harus menempuh perjalanan secara berputar-putar untuk menuju ke sekolahnya. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menghindari genangan air. Satuan tugas pengamanan juga tidak mengira naiknya gengangan air akan secepat itu, segera melakukan sejumlah persiapan. Sejumlah perahu karet dan peralatan SAR didatangkan guna berjaga-jaga menghadapi musibah yang sewaktu-waktu muncul.<sup>3</sup>

Akibatnya, penduduk yang semula berkeyakinan bahwa air tidak bakal pernah sampai pada rumah mereka, mulai dihinggapi kecemasan. Mereka membuat *gethek-gethek* dari bambu dan batang pisang untuk bepergian.<sup>4</sup> Hal itu ditunjukan dalam gambar 5, yang dengan jelas memperlihatkan bagaimana seorang ibu dengan anak-anak kecil naik *gethek* menyebrangi genangan air waduk. Terlihat pula seorang pria berdiri dengan memegang *gethek* sambil membantu mengarahkan laju *gethek*.

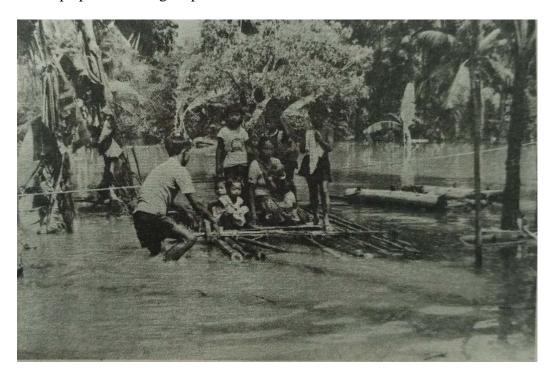
Kepungan air di daerah pemukiman yang semakin meninggi membuat penduduk berubah sikap. Kalau tadinya banyak penduduk yang bersikeras untuk

<sup>4</sup>"13 Dukuh Mulai Tergenang; Penduduk Membuat "Gethek", *Suara Merdeka* 25 januari 1989.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>"Soal Waduk Kedung Ombo Masih Hadapi Kesulitan", *Suara Merdeka* 3 Maret 1989.

bertahan di tanah-tanah mereka, pada saat kepungan air mencapai elevasi 59 meter beberapa penduduk segera pindah.<sup>5</sup>



Gambar 5: *Gethek* Menjadi Alat Transportasi Bagi Warga yang Bepergian 1989 Sumber: *Suara Merdeka*, 25 Maret 1989

Para penduduk bekerja bakti menyelamatkan rumah dan barang-barang yang berada di Daerah Bahaya I.<sup>6</sup> Dengan cara bergotong royong, kaum laki-laki bekerja membongkari rumah warga yang paling dekat dengan genangan air. Kemudian diangkat ke tempat yang lebih tinggi untuk disusun lagi menjadi sebuah tempat tinggal darurat. Cara yang lain adalah dengan membongkari rumah yang paling dekat dengan genangan air. Genting, papan, kayu tiang rumah ditumpuk di tepi jalan, ditempat yang agak tinggi agar tidak hanyut. Barang-barang tersebut kemudian diangkati ke tempat yang lebih tinggi, dimana telah menunggu sejumlah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>"Genangan Air Makin Meninggi", Suara Merdeka, 25 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Daerah bahaya I terletak pada elevasi 50-65 meter.

warga yang siap menyusunnya kembali. Sedangkan kaum wanita lebih banyak bekerja di daerah yang tanahnya tinggi. Pada gambar 6 di bawah ini menunjukan bagaiamana beberapa warga bergotong royong membangun rumah di dataran tinggi yang tidak tergenangi air waduk. Beberapa pria dewasa menyusun genteng dan *usuk*. Terdapat juga wanita yang membawa rumput pakan ternak yang digendong dalam keranjang. Mereka mencari rumput untuk makanan ternak, membuat dapur umum, membantu memasang dan membuat kayu *usuk* dari bambu untuk atap rumah.



Gambar 6: Potret Warga yang Bergotong Royong Membangun Kembali Rumah Mereka di Dataran yang Lebih Tinggi 1989. Sumber: *Termpo*, 15 April 1989

Beberapa warga kemudian mulai menyerah, tidak sedikit pula dari penduduk yang secara sukarela meninggalkan tanahnya dan pindah ke daerah diluar

<sup>7</sup>"Selebaran di Kedung Ombo", *Tempo* 15 April 1989 .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>"Mereka Mencoba Tidak Menyerah", *Tempo* 25 Maret 1989.

genangan yang mana sanak keluarga mereka tinggal. Sebagian ada yang mendaftar untuk mengambil uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan di pengadilan tinggi terdekat atau mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi. Menyerahnya beberapa warga yang semula bertahan ini tidak terlepas dari kesaksian mereka yang melihat secara langsung bagaimana air sampai di bubungan rumahnya. Pada akhir Februari, ketika ketinggian air mencapai elevasi 76,23 meter lebih, penduduk yang bertahan masih ada sekitar 1.786 KK. 10

Berbagai cara dilakukan penduduk untuk menyelamatkan harta bendanya seperti yang dilakukan oleh bapak Juwahir, yang tinggal ditepian Sungai Serang dukuh Ngerapak. Seluruh bekas bongkaran, termasuk perabotan rumah dihanyutkan lewat aliran Sungai Serang. Bapak enam anak tersebut berbagi tugas dengan teman-temannya. Yang hulu bertugas menghanyutkan, sedang yang hilir bertugas menangkap barang-barang yang dipindahkan. Mulai dari almari, meja, atap rumah, dan sebagainya yang bisa berjalan sendiri terapung-apung sampai ratusan meter jauhnya. Pada gambar 7 di bawah ini menunjukan bagaimana penduduk memanfaatkan air genangan waduk untuk memindahkan perabotan rumah seperti kayu dengan cara menghanyutkannya. Mereka sambil berenang kemudian mengikuti kayu ataupun barang yang mereka hanyutkan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Stanley, op. cit., hlm. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>"Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 meter" *Suara Merdeka* 28 Februari 1989.

 $<sup>^{11}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>"Mereka Mencoba Tidak Menyerah", Tempo 25 Maret 1989.



Gambar 7: Warga Memanfaatkan Air Genangan untuk Memindahkan Kayu-Kayu Guna Membangun Rumah di Tempat Lain 1989 Sumber: *Tempo*, 25 Maret 1989

Keadaan seperti ini memaksa masyarakat yang bertahan fokus untuk bertahan hidup, sehingga sawah-sawah tidak terurus dan hewan ternak menjadi kurus. Pemiliknya sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing. <sup>13</sup> Di beberapa desa, warga tetap berusaha menghidupkan suasana desa yang pernah ada. Pasar yang telah tergusur tetap digunakan warga untuk tempat transaksi jual-beli. Atau tukar-menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan sebagian benda berharga yang dimiliki. <sup>14</sup>

Budaya menggeser rumah di daerah dataran tinggi di lingkungan daerah genangan terus dilakukan penduduk yang bertahan di tanah kelahiran mereka. Cukup banyak jumlah penduduk yang nekad tidak akan keluar dari daerah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>"Menunggu Sang Air Menyentuh", *Tempo* 25 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Stanley, *op. cit.*, hlm. 128.

genangan. Sebuah rumah yang baru saja digeser, ada kemungkinan seminggu kemudian sudah harus digeser lagi untuk menghindari air yang terus naik.<sup>15</sup>

Memasuki awal bulan Maret, menurut pendataan terakhir yang dilakukan oleh Pemda Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 10 Maret 1989 jumlah warga yang masih bertahan di area genangan tinggal 1.684 KK. Ketika saat itu, ketinggian air mencapai elevasi 76,23 meter lebih. Mereka berasal dari berbagai desa yang berlainan, banyak berkumpul di bukit-bukit dan membentuk permukiman baru. Panyak rumah tenggelam tidak terselamatkan oleh pemiliknya.

Banyak pula anak usia sekolah yang tak bisa bersekolah. Selain jalan-jalan telah terputus oleh genangan air yang terus melebar, gedung-gedung sekolah banyak juga yang tenggelam. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar 8 di bawah ini, didirikan sekolah-sekolah darurat di pingggir genangan waduk untuk mengakomodir anak-anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah secara efektif karena gedung sekolah mereka tenggelam oleh air waduk. Sekitar puluhan anak usia sekolah berkumpul untuk belajar bersama.

<sup>15</sup>Stanley, op.cit., hlm.128.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>"Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 meter" *Suara Merdeka* 28 Februari 1989.



Gambar 8: Foto Anak-Anak yang Belajar di Sekolah Darurat Sumber: *Tempo*, 25 Maret 1989

Terlantarnya anak-anak usia sekolah banyak diberitakan oleh media massa, dibantah oleh Ka. Depdikbud Boyolali Drs Moh Said. Sementara itu, satu setengah bulan semenjak penggenangan dilaksanakan mengakibatkan daerah genangan yang sebenarnya subur, harus terendam dan tenggelam oleh air waduk. Genangan air yang semakin meluas mulai membentuk waduk Kedung Ombo seperti tapal kuda. <sup>18</sup> Daerah-daerah yang berada dibagian sebelah dalam tapal kuda menjadi daerah terpencil. Misalnya dukuh Kedungpring, Banger, Ngrakum, Ngrapah. Di daerah-daerah terisolir tersebut, selain rawan pangan muncul beberapa wabah penyakit

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>"Yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat", *Tempo* 25 Maret 1989.

kulit dan muntaber. Kesulitan lain adalah langkanya air bersih, karena mata air yang menjadi sumber air minum telah tertutupi oleh genangan air waduk.<sup>19</sup>

Untuk pergi ke kota terdekat yang dulunya hanya sekitar lima kilometer dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, menjadi tidak bisa lagi. Orang-orang di desa yang terisolir harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer lewat daratan di sebelah selatan. Seringkali pula mereka harus melewati pos-pos penjagaan. Pihak militer yang berada di pos penjagaan acapkali sengaja mempersulit penduduk yang pulang belanja dari daerah luar genangan.<sup>20</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kopi, gula, garam, atau pupuk tanaman dan genting, penduduk seringkali pergi membeli ke Pasar Legi, di Solo. Ketika penduduk yang membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari tersebut melewati pos penjagaan, biasanya para petugas dengan sengaja memeriksa dan membongkar barang-barang bawaan secara lama. Akibatnya penduduk seringkali harus menginap satu malam di pos penjagaan.<sup>21</sup>

Rumah penduduk banyak yang tenggelam dan tidak sempat diselamatkan. Sampai tanggal 17 Maret 1989 air telah menenggelamkan 35 rumah penduduk.<sup>22</sup> Orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan rumahnya hanya mampu bersikap pasrah. Sebagaimana yang ditunjukan oleh gambar 9, air waduk menenggelamkan

 $<sup>^{19}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Wawancara dengan Jaswadi pada 25 Juli 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>"Menunggu Sang Air Menyentuh", *Tempo*, 25 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.

rumah penduduk sampai setinggi genteng. Akibatnya banyak pula rumah-rumah yang tidak sempat terselamatkan oleh pemiliknya.



Gambar 9: Rumah-Rumah yang Tenggelam Oleh Air Waduk yang Semakin Meninggi 1990 Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi

Air yang menggenangi bekas hutan, dimana banyak tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan, menjadi daerah baru yang berbahaya. Di bawah permukaan air yang tampak tenang, terdapat cabang dan ranting pohon yang siap mengait apa saja yang lewat di atasnya. Hingga bulan Maret 1989 telah ada dua warga Sumberharjo dan Wonoharjo mati tenggelam. Seorang meninggal karena terjeblos ke dalam parit hutan jati yang sudah tak terlihat lagi. Seorang lagi terpeleset ketika sedang mandi.<sup>23</sup>

-

 $<sup>^{23}</sup>$  "Korban Tewas Di Kedung Ombo 15 Orang",  $\it Suara Merdeka$ 12 Januari 1996.

Beberapa diantara penduduk yang nyalinya menciut melihat air memporakporandakan tempat tinggal dan desa mereka. Sebagian memilih menerima tawaran
pemerintah untuk bertransmigrasi. Pada akhir Maret 1989 sebanyak 64 KK atau
302 jiwa penduduk dari kawasan yang terkena Proyek Waduk Kedung Ombo
berangkat bertransmigrasi ke Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara.
Para transmigran yang mendapat bantuan dana dari Banpres dan Yayasan Dharwis,
serta Yayasan Sosial Soegyapranata diberangkatkan dengan pesawat Hercules dari
bandar udara Adi Sumarmo, Solo. Ke-64 KK tersebut diantaranya berasal dari 8
KK Desa Bawu, 29 KK dari Desa Kemusu, 11 KK dari Desa genengsari, 12 dari
Desa Nglanji, 3 KK dari Desa Klewor dan 1 KK dari Desa Sarimulyo.<sup>24</sup>

Dari 3.006 KK di Kecamatan Kemusu yang harus pindah akibat terkena proyek Waduk Kedung Ombo, sebanyak 983 KK atau 32,70 % telah pindah ke sekitar waduk di luar daerah genangan. Sebanyak 193 KK atau 6,42 % memilih untuk mengikuti program pemerintah yakni bertransmigrasi. Memilih untuk tinggal di rumah sanak saudara yang tak terkena waduk juga menjadi salah satu alternatif pilihan warga, sejumlah 193 KK atau 13,2 %. Sebagian warga juga mulai menerima tawaran pemerintah untuk menempati Kayen, sebanyak 31 KK atau 1,03 % pindah. Data jumlah penduduk di Kemusu yang memutuskan untuk melakukan perpindahan secara lengkap per masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel 5 di bawah ini.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Menurut versi Warga Kedung Ombo, sebagian besar orang-orang yang berangkat bertransmigrasi adalah sanak keluarga pamong desa yang justru tidak memiliki rumah atau tanah di daerah genangan. Mereka mendaftarkan diri ikut bertransmigrasi untuk mendapatkan tanah seluas 2 hektar di daerah transmigrasi. Lihat Stanley, *op. cit*, hlm. 30-31.

Tabel 5: Jumlah KK dan arah perpindahan Penduduk Kecamatan Kemusu dan wilayah Waduk Kedung Ombo lain sampai dengan 23 Maret 1989

Kecamatan		Jumlah KK yg	Jumlah KK yang pindah keluar wilayah genangan					
		harus pindah	Ke sekitar waduk	Trans- migrasi	Ke wi layah lain	Ke Kayen	Jumlah KK	%
Kec. Kemusu								
1.	Wonoharjo	185	144	14	27	-	185	100
2.	Nglanji	717	180	76	232	6	494	69,90
3.	Kemusu	621	244	9	19	-	272	43,80
4.	Genengsari	606	224	71	71	13	379	62,54
5.	Ngrakum	482	51	11	28	12	102	21,16
6.	Watugede	27	21	-	-	-	21	77,77
7.	Klewor	218	62	2	12	-	76	34, 86
8.	Bawu	124	33	10	8	-	51	41,13
9.	Sarimulyo	26	24	-	-	-	24	92,31
Sub total		3.006	983	193	397	31	1.604	53,36

Sumber: LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo

Di Kecamatan Kemusu yang belum keluar dari wilayah genangan, umunya menempati tanah-tanah yang berada pada elevasi 85-95 meter. Penduduk yang telah menggeser rumah sebagian masih tinggal di daerah yang ada di bawah elevasi 95 meter. Artinya mereka masih berada di wilayah yang bakal tergenang.<sup>25</sup>

Usaha penggeseran yang dilakukan penduduk, selain menuju ke arah yang lebih tinggi, mereka juga berusaha untuk berada sedekat mungkin dengan wilayah asal mereka yang diperhitungkan tidak bakal tenggelam. Dengan demikian, di daerah sekitar sabuk hijau (*green belt*)<sup>26</sup> mereka bertahan hidup dengan mengolah

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>"Menunggu Sang Air Menyentuh", *Tempo*, 25 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>"Recent Experience With Involuntary Resettlement (Indonesia-Kedung Ombo)", *Operatioan Evaluatioan Departement* report No. 17540 document of world bank, hlm. 7. Kawasan sabuk hijau adalah sebuah areal dengan ketinggian air (elevasi) 90-95 meter, yang sebenarnya tidak boleh dijadikan hunian. Kawasan

lahan Perhutani di kawasan Kedung Ombo yang dekat dengan tempat tinggal mereka di wilayah sabuk hijau. Pada waktu elevasi air waduk turun, mereka pun nekat turun ke waduk yang tanahnya mengering dan menanaminya dengan padi. Meskipun demikian, panen yang cuma sekali dalam setahun, karena lahan pasangsurut hanya bisa ditanami ketika air waduk menyusut masih bisa membuat mereka bertahan.<sup>27</sup>

Ada juga warga yang memanfaatkan tanah-tanah "tidak bertuan" diluar lahan pasang surut, yaitu tanah proyek yang tidak tergenangi air waduk. karena disana merupakan tanah kering, maka warga yang bertahan dan memanfaatkan tanah ini harus bekerja keras untuk mengolahnya, baru kemudian mereka menanaminya dengan jagung atau ketela. Celakanya, beberapa komoditas tani yang dulu hampir tidak pernah dibeli warga, kini harus dicari sampai di pasar. Bayam, misalnya, dulu tinggal memetik di tanah pekarangan rumah. Namun, semenjak mereka digusur oleh pembangunan waduk serta memilih bertahan di lokasi sabuk hijau mereka tak lagi bisa mendapatkan sayur-sayuran seperti dulu lagi, terkecuali harus pergi ke pasar.<sup>28</sup>

Di daerah Kecamatan Kemusu, selain masih banyaknya warga yang memilih bertahan dan tidak mau pindah ataupun transmigrasi, masih banyak pula

ini dijadikan tempat sebagai cadangan air, ketika air waduk mengalami pasang akibat curah hujan yang tinggi. Jadi, sangat berbahaya jika warga tetap bertahan di sini, karena pada musim huujan air waduk pasti menjadi pasang, yang sewaktuwaktu bisa menenggelamkan mereka. Tapi inilah wujud protes yang dipilih rakyat.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Isdiyanto, *op. cit.*, hlm 68.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Wawancara dengan Tulus, 17 Juli 2018

warga yang tidak mau menerima uang ganti rugi. Dari jumlah 1.402 KK yang bertahan, terdapat 669 KK atau 57 % yang tetap menolak uang ganti rugi.

Tabel 6: Jumlah KK yang bertahan dan tidak bersedia menerima ganti rugi uang, sampai dengan 23 Maret 1989

Kecamatan/Desa		Juml. KK hrs keluar wilayah	Jumlah KK yang masih bertahan dan belum keluar dari wilayah genangan			
		genangan	Jumlah % Y		Yang bertahan dan tidak	
					mau menerima ganti ru	
					Jumlah	%
17	17					
Kec. Kemusu			_	_	_	
1.	Wonoharjo	185	0	0	0	0,00
2.	Nglanji	717	223	31,00	149	20,78
3.	Kemusu	621	349	56,20	147	23,67
4.	Genengsari	606	227	37,46	48	7,92
5.	Ngrakum	482	380	78, 84	252	52,28
6.	Watugede	27	6	22,22	0	0,00
7.	Klewor	218	142	65,14	49	22,48
8.	Bawu	124	73	58,87	24	19,25
9.	Sarimulyo	26	2	7,69	0	0,00
	Total	3. 006	1.402	46,64	669	22,25

Sumber: LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo

Selain menolak untuk pindah dan juga tidak bersedianya mereka menerima uang ganti rugi, perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan waduk juga dilakukan secara simbolik dengan menolak mengambil ikan dari perairan waduk. Menurut penuturan Parno, mengambil ikan di lokasi waduk sama dengan halnya mereka mengamini tindakan pemerintah yang telah menggusur mereka secara paksa dari tanah dan rumah yang mereka miliki.<sup>29</sup> Tak hanya itu, Parno, Jaswadi,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Dalam proses awal poembebasan tanah, pemerintah memang mengingimingi mereka denghan potensi perikanan yang menjanjikan. Perikanan dapat dikembangkan dengan berbagi cara, antara lain dengan membudidayakannya dalam karamba jaring apung atau ditangkap langsung ditengah perairan waduk. namun

Darsono, Senen, Tulus bersama warga yang bertahan menyuarakan gerakan golput di setiap pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang abai terhadap hak-hak mereka. Mereka tidak peduli siapapun yang terpilih, karena toh nasib mereka tetap sama saja. <sup>30</sup>

#### B. Kepedulian Ormas hingga LSM

Simpati masyarakat terhadap rakyat Kedung Ombo sepertinya terakumulasi di saat menjelang penggenangan waduk, dimana masih ada puluhan ribu manusia yang belum meninggalkan lokasi genangan. Apalagi berbagai media massa dengan gencar memberitakan permasalahan yang terjadi di daerah genangan beserta ganjalan-ganjalan yang tersisa menjelang peresmian genangan.<sup>31</sup>

Tidak berselang lama setelah proses peresmian penggenangan dan diberlakukannya Kedung Ombo sebagai daerah tertutup, muncul berbagai kelompok yang ingin mendampingi, membantu dan membela rakyat Kedung Ombo yang telah menderita selama bertahun-tahun. Kelompok yang bermunculan ini sangat heterogen, meliputi berbagai profesi, dan kedudukan sosial dalam masyarakat.<sup>32</sup> Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga

warga yang bertahan di lokasi sabuk hijau ini tidak berminat atas bantuan tersebut. Penolakan ini bukan cuma sekedar simbol protes perlawanan terhadap kehadiran waduk, tetapi juga karena warga masih asing dengan bidang pekerjaan seperti itu.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>"Golput Ala Warga Kedung Ombo, "Palang Sepur Dilumpati, Ajur Mumur Dilakoni", *Bernas* 1 Juni 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>George J. Aditjondro, "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia", dalam Philip Hirsch and Carol Warren (eds.), *The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources and Resistance*, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

kelompok besar. Yaitu kelompok mahasiswa dan masyarakat umum yang tergabung dalam KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo), Kelompok Romo YB. Mangunwijaya dan kelompok LSM.<sup>33</sup>

Ketiga kelompok tersebut lewat aksi-aksinya yang dilakukan secara terpisah nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah. Khususnya yang menyangkut cara penanganan terhadap orang-orang yang mencoba terus bertahan di daerah genangan waduk Kedung Ombo.

### **KSKPKO** (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo)

Dimotori oleh beberapa aktivis mahasiswa dan masyarakat secara umum dari Salatiga, Yogyakarta dan Surabaya yang merasa prihatin dengan nasib orang-orang di daerah genangan waduk Kedung Ombo, yang terancam tenggelam karena waduk akan segera digenangi, dilakukan serangkaian pertemuan. Mereka melakukan investigasi mengumpulkan data dan informasi. Sekaligus mendiskusikan persoalan yang terjadi di Kedung Ombo. Kelompok ini kemudian bertambah banyak setelah bergabungnya belasan mahasiswa dari Yogya dan Semarang, sehingga akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang kemudian diberi nama KSKPKO.

Salatiga dipilih sebagai sekertariat kerja, kota yang dianggap paling dekat dengan lokasi genangan. Kelompok ini kemudian mendapat dukungan dari para aktivis mahasiswa dan simpatisan di Jakarta, Bandung, Bogor dan beberapa kota lain.<sup>34</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Stanley, op.cit., hlm 135.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

Pada 6 Februari 1989 ketika persiapan dianggap cukup matang, KSKPKO mengirimkan surat pernyataan kepada Ketua DPR/MPR, Kharis Suhud yang ditembuskan ke Presiden Soeharto, Menko Polkam, Mendagri, Menteri PU, Ketua DPRD Tingkat I, Gubernur Jateng, rakyat di daerah genangan, lembaga kemahasiswaan di seluruh Indonesia dan media massa. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 961 orang. Diantaranya adalah mahasiswa dari 45 perguruan tinggi di Jawa dan Lombok, agamawan, seniman, pekerja sosial, dosen, birawan, buruh, ibu rumah tangga dan sebagainya.<sup>35</sup>

Selain mengirimkan surat pernyataan, KSKPKO yang diwakili oleh komponen mahasiswa, membikin aksi solidaritas secara serentak di tiga tempat pada hari yang serupa, Senin 6 Februari 1989. Di Jakarta, sekitar 100 orang mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta dan Bogor datang ke kantor Depdagri di Jl Merdeka Selatan Jakarta. Mereka membawa poster. Kepada petugas yang mencegat di kantor Depdagri, rombongan KSKPKO menyatakan keinginan untuk bertemu dengan meteri Rudini guna menyampaikan surat pernyataan dan semua permasalahan yang terjadi di Kedung Ombo. Namun keinginan tersebut gagal karena Menteri Rudini tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan. Sedangkan 70 mahasiswa berasal dari Salatiga, Yogya dan Semarang yang juga tergabung KSKPKO mengadakan aksi solidaritas dengan mendatangi lokasi genangan di desa Kedung Cumpleng yang telah tenggelam

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Lihat "Mahasiswa Temui Ismail Bicarakan Kedung Ombo" *Kedaulatan Rakyat* 7 Februari 1989.

sebatas dada.<sup>36</sup> Aksi yang dilakukan di lokasi genangan waduk di datangi oleh aparat kepolisian yang berjaga dan mengawasi, sebagaimana yang ditunjukan oleh gambar 10 di bawah ini. Rombongan KSKPO membawa poster yang bertuliskan kata-kata seperti: "Hai Ismail, Kedung Ombo bukan tanah mbahmu!"; "Rakyat Kedung Ombo Ditipu"; "DPR dan Pemerintah Anjing Kapitalis".



Gambar 10. Aksi KSKPKO yang Diamankan Oleh Aparat 1989 Sumber: *Editor*, 11 Februari 1989

Buntut aksi yang pertama KSKPKO ini adalah dikepungnya sekretariat di Salatiga dan dijaga oleh aparat selama beberapa hari. Para penghuni rumah yang dijadikan sekretariat KSKPKO merasa khawatir dengan perkembangan situasi setempat. Para mahasiswa terpaksa mengungsi dan mengosongkan rumah mereka

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>"Oalah, Kedung Ombo", *Editor* 11 Februari 1989.

selama lebih kurang dua minggu. Beberapa aktivis KSKPKO dicari-cari oleh aparat kepolisian dan militer. Mereka dituduh telah melakukan rapat gelap pada tengah malam 5 Februari 1989 di sebuah rumah di Dukuh Cemara, salatiga sebelum mengadakan aksi ke lokasi genangan Waduk Kedung Ombo. Salah seorang aktivis kemudian mendapat panggilan dari Polres Salatiga untuk di dengar kesaksiannya tentang rapat-rapat gelap dan rapat terselubung lainnya. Aksi KSKPKO kembali berlanjut pada tanggal 25 Maret 1989 di Semarang. Mahasiswa di Yogya dan Jakarta juga melakukan hal sama dengan waktu yang berbeda.

Selain aksi yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, mulai aksi pertama dan berikutnya, KSKPKO juga melakukan sebuah aksi yang sifatnya diamdiam. Dalam penyusunan skenario pertama kali, KSKPKO sengaja melakukan pemilahan antara aksi untuk membentuk opini dan aksi diam-diam yang sengaja dirahasiakan.<sup>38</sup>

Aksi diam-diam tersebut dilakukan dengan cara penyusupan menembus satgaspam secara berkala dan hanya melibatkan kelompok kecil. Dalam aksi tersebut dilakukan koordinasi pemantauan keadaan penduduk di daerah genangan dan penyampaian barang-barang yang dibutuhkan penduduk seperti tali-temali, makanan, pakaian dan obat-obatan serta vitamin. Barang dan uang yang berhasil dikumpulkan oleh KSKPKO di beberapa kota disampaikan kepada penduduk dengan cara yang sama atau lewat LSM di Solo.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Lihat: "Hari-hari Penting Menuju Kasasi", *Forum Keadilan* Nomor 8, 4 Agustus 1994. Juga Wawasan, 14 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Stanley, op.cit., hlm. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>"Yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat", *Tempo* 25 Maret 1989.

### Kelompok Romo YB Mangunijaya

Romo YB Mangunwijaya memulai aksinya dengan membuat sebuah surat pernyataan, yaitu hanya akan menolong anak-anak yang terdapat di lokasi penggenangan waduk Kedung Ombo yang masih bertahan dan tidak akan ikut campur dengan persoalan kasus Kedung Ombo. Ia membuat surat himbauan kepada pribadi-pribadi yang mungkin tertarik untuk membantu anak-anak di daerah genangan waduk Kedung Ombo. <sup>40</sup> Turut menandatangani surat himbauan itu antara lain, Abdul hakim G Nusantara dari YLBHI, Soemedi dari LBH Semarang.

Romo Mangunwijaya segera melakukan kunjungan ke daerah genangan Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu. Romo Mangun menyaksikan sendiri bagaimana blokade militer dan pemandangan menyayat di daerah genangan.<sup>41</sup> umah-rumah penduduk terisolasi oleh genangan air yang terus meninggi. Pengalaman Romo membuat niatnya ingin segera terealisasi dalam mengajar anakanak yang tak dapat melanjutkan sekolah, mengingat genangan air semakin meninggi.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Surat himbauan itu kemudian dimuat sebagai iklan oleh Harian Kedaulatan Rakyat pada 27 Februari 1989, yang segera mendapat tanggapann dari pihak aparat pemerintah antara lain dari Kaditsospol ABRI Letjen Harsudiono Hartas, Mendagri Rudini dan Menko Kesra, Soeparjo Rustam. Ketiganya menyatakan memberikan dukungan terhadap niat Romo Mangunwijaya untuk membantu orang Kedung Ombo, asalkan murni untuk kepentingan kemanusiaan dan tidak digunakan untuk manuver politik atau kepentingan yang lain. Lihat: *Suara Merdeka* 3 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 1989.

Banyak orang yang kemudian mencurigai niat Romo Mangun sebagai manuver politik yang sengaja dilakukan tatkala pemerintah berusaha mengosongkan daerah genangan. Bahkan kemudian muncul isu yang menyatakan bahwa niat Romo Mangun dipelopori keinginanya menyebarkan misi agama di Kedung Ombo. Romo Mangun sendiri menanggapi isu yang menyerang dirinya dengan mengibaratkan bahwa dirinya mendengar *ada sapi kecemplung sumur nyuwun tulung*. Ia hanya berniat membantu anak-anak yang mungkin cacingan, korengan atau kurang makan, hingga yang putus sekolah tanpa ada pretensi apapun.

"Saya dan teman-teman ke Kedung Ombo tidak ditunggangi oknum lain, atau bahkan unsur pewaris paham yang menentang pemerintah. Kali ini justru mau melaksanakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, mulai dari sila pertama hingga yang terakhir."<sup>42</sup>

Romo Mangun merasa bahwa langkahnya adalah legal, tidak subversif, ataupun aneh-aneh. Apa yang dilakukannya bahkan sangat sesuai dengan kehendak pemerintah. Juga merupakan konsekuensi dari semangat kesetiakawanan sosial yang diperingati setiap tanggal 20 Desember.<sup>43</sup>

Ajakan Romo Mangun mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Puluhan relawan-relawati mendaftarkan diri ke tempat-tempat seperti yang tercantum dalam iklan yang dipasang di koran. Hanya dalam beberapa hari saja telah terkumpul buku, alat tulis, makanan, obat, pakaian, tenda, tiker, selimut, uang dan lain-lain. Bahkan di pos Yayasan Palamarta Indonesia di Mangkunegaran Solo

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>"Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo", *Kompas* 6 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Aditjondro, op. cit., hlm. 70.

berhasil terkumpul tujuh ton beras, satu ton gula pasir, dan 12 pak pakaian. 44 Sebagian anggota KSKPKO juga menyatakan bergabung dengan kelompok Romo Mangun, bersamaan dengan bergabungnya sejumlah dosen-dosen Undip Semarang dan Pimpinan Pondok Pesantren Muntilan, Kyai Hamam Djafar. 45 Mereka bergabung mengatasnamakan pribadi tanpa menyangkutpautkan dengan posisi sebagai dosen, mahasiswa, dokter atau profesi lain dalam masyarakat. Gambar 11 menunjukan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah dengan membuat kelas-kelas darurat unuk pembelajaran dengan lokasi seadannya.



Gambar 11. Sekolah Yang dibentuk Oleh Para Relawan 1990 Sumber: Stanley, 1994

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>"Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo", *Kompas* 6 Maret 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Bergabungnya Kyai Hamam Djafar yang juga merupakan tokoh MUI Jateng tersebut, berhasil menetralisir isyu dan kecurigaan terhadap rencana kemanusian Romo Mangun. Lihat: "Menunggu Sang Air Menyentuh", *Tempo*, 25 Maret 1989.

### Kelompok LSM

Sikap awal keprihatinan LSM terhadap korban penggenangan Kedung Ombo ditunjukan oleh Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusi yang pada 28 Januari mengirimkan surat pernyataan kepada Mendagri Rudini. LPHAM menyatakan keprihatinan terhadap penggenangan Waduk Kedung Ombo. Penggenangan yang dilakukan merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan yang tidak secara arif memperhatikan kemungkinan jatuhnya korban fisik, sosial dan ekonomi di kalangan rakyat.

Sebagian LSM memilih meninggalkan kasus Kedung Ombo tatkala mereka mendapatkan tekanan dari aparat dan merasa kasus Kedung ombo menemui jalan buntu. Sebagian lagi tampil menjadi kekuatan pelobi. Sementara itu beberapa LSM yang bergerak di bidang hukum seperti LBH, YAPHI dan GPS terus mencoba mendampingi penduduk dalam urusan litigasi. 46

YLBHI mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap kasus yang terjadi di Kedung Ombo dengan mengadakan diskusi Panel. Diskusi bertemakan "Dimensi Sosial dan Kemanusiaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Studi Kasus Waduk Kedung Ombo" diselenggarakan pada 17 Maret 1989 di Jakarta. Diskusi tersebut mencoba membahas aspek-aspek hukum, sosial dan kemanusiaan pembangunan waduk Kedung Ombo. Serta merumuskan bentuk-bentuk partisipasi warga negara yang bisa dilakukan untuk membantu penduduk Kedung Ombo. <sup>47</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Stanley, op.cit., hlm. 189

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 190.

Peran LSM yang paling menonjol (yang tampak di permukaan) adalah dari kelompok International NGO Forum on Indonesia (INGI). Sebuah kelompok LSM yang merupakan forum komunikasi antara LSM Indonesia dan LSM luar negeri. Mayoritas anggotannya terdiri dari LSM negara-negara yang tergabung dalam Inter-Govermental Group on Indoneisa (IGGI). Forum komunikasi yang berdiri di tahun 1985 ini dalam konferensinya yang ke V di Nieport Belgia yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 April 1989, mengangkat kasus Kedung Ombo sebagai salah satu agenda. Dengan demikian kasus Kedung Ombo yang tadinya baru merupakan sebuah kasus nasional, diangkat INGI menjadi kasus internasional.

Dalam konferensi yang diikuti oleh delapan belas LSM dari Indonesia tersebut, dihasilkan sebuah *Aide Memoire* yang berisi lima belas buah rekomendasi untuk IGGI dan Bank Dunia. Di antara rekomendasi tersebut, diangkat masalah partisipasi masyarakat yang dilalaikan pemerintah dan terjadinya kemerosotan kondisi hak-hak asasi manusia seperti yang terjadi di Kedung Ombo. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Abdul Hakim G Nusantara dan Peter Kardoes yang dikirimkan kepada Presiden Bank Dunia, Barber Conable, INGI meminta agar Bank tetap konsisten pada kebijakannya sendiri mengenai pemukiman kembali penduduk. Serta lebih memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. INGI meminta agar Bank Dunia tidak mencoba menutup mata terhadap situasi yang terjadi di Kedung Ombo. Ada

<sup>48</sup>Dalam konferensi sebelumnya, yaitu Konferensi INGI ke IV yang berlangsung pada 25 sampai 28 April di Zeewolde Belanda sebetulnya Kedung Ombo juga termasuk dalam agenda pembicaraan sebagai sebuah studi kasus.

lima butir langkah penyelesaisn yang dianjurkan oleh INGI kepada Bank Dunia untuk menyelesaikan permasalahan di Kedung Ombo.<sup>49</sup>

Rekomendasi ini kemudian menjadi angin segar bagi warga Kedung Ombo.

Pemerintah kemudian mencoba menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi itu dalam rumusan kebijakan-kebijakan untuk lebih mengakomodir keinginan rakyat yang masih bertahan di lokasi penggenangan.<sup>50</sup>

### C. Kebijakan Pemerintah yang Melunak

Target penyelesaian pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang terhambat pada akhirnya berdampak pada dana pinjaman luar negeri dari Bank Exim Jepang, yang akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Vatikiotis, M. 1993. *Indonesian Politics Under Suharto, Order, Development and Pressure to Change*. London: Routledge. hlm 34.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Lima rekomendasi tersebut berisi, 1. Menetapkan dan menerapkan rencana pemukiman kembali dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap 900 lebih KK yang tetap bertahan sekaligus mencakup langkah pemulihan pendapatan keluarga melalui pertanian dan perikanan, kompensasi untuk properti yang hancur, identifikasi atu oemukiman kembali yang setara dengan nilai tanah yang hilang begitupula aset-aset lainnya. Serta menyediakan anggaran untuk pemukiman kembali. 2. Mengalokasikan kompensasi yang memadai dan menyiapkan pemukiman kembali untuk semua warga yang masih bertahan dan juga mereka yang belum mendapatakan kompensasi dengan nilai yang setara. 3. Membentuk forum monitoring dan evaluasi untuk pengawasi jalannya pemukiman kembali dan rehabilitasi di Kedung Ombo dan proyek irigasi lainnya di Jawa. 4. Mengadakan diskusi dengan pemerintah Indonesia mengenai pemukiman kembali di Kedung Ombo dan meminta adanya peninjaun penuh atas pembebasan lahan dan pemukiman kembali di Indonesia sebelum mendanai proyek-proyek lebih lanjut yang menggusur pemukiman warga. 5. Melengkapi perencanaa Analisi Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pembangunan yang dijalankan. Rekomendasi ini dilayangkan oleh INGI kepada presiden Bank Dunia pada 26 April 1989.

pembebasan lahan apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.<sup>51</sup> Pemerintah Indonesia diharuskan segera menyelesaikan kasus Kedung Ombo, sehingga pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan yang akomodatif.

Pemda Jateng yang tadinya keras kepala menolak dialog dengan warga pada akhirnya menyatakan kesediannya untuk memenuhi permintaan warga Kedung Ombo. Mereka bersedia untuk berdialog dan mengakomodir masukan warga yang masih bertahan.<sup>52</sup> Bupati Boyolali M Hasbi tiba-tiba memberi tawaran baru kepada penduduk yang bersedia pindah dan tinggal di Kayen, berupa tanah seluas 1.000 meter persegi untuk tiap KK.

Tawaran baru M Hasbi tersebut disampaikan kepada warga di Kemusu yang masih berada di genangan lewat selebaran yang disebar pada 6 April 1989. Selebaran tersebut dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan nomor 593.8/00784 dan 500/00794 dan langsung ditandatangani oleh Bupati Boyolali M Hasbi. Tawaran Bupati Boyolali ini sebelumnya tidak mendapat

<sup>51</sup>Pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama. Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988. "Warga Masih Tolak Ganti Rugi", *Suara Merdeka* 22 Juni 1988. Namun kenyataannya batas waktu tersebut diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan sistem konsinyayi.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Perubahan sikap Gubernur Jateng disebabkan tekanan dari presiden yang memberikan waktu dua bulan kepada HM Ismail untuk mernuntaskan permasalahan Kedung Ombo, atau tidak akan dipilih menjadi Gubernur kembali. Sebelum Gubernur HM Ismail menyatakan kesediannya menerima perwakilan rakyat Kedung Ombo, pada 28 Maret 1989 Jaswadi mewakili penduduk Kedung Ombo mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng yang berisi tentang keinginan mereka terhadap suartu musyawarah yang mungkin bisa menyelesaikan persoalan di Kedung Ombo. Kutipan wawancara dengan Jaswadi.

respon karena warga merasa tanah yang di Desa Kayen, Kecamatan Juwangi Boyolali adalah tanah lahan kritis.

Pada akhirnya ada 7 KK yang bersedia menerima tawaran Bupati. Sadi Dwijowiyoto yang menjadi salah satu pelopornya. Ia menuturkan bahwa, keinginannya pindah sebenarnya karena ada intimidasi terhadap dirinya. Jabatannya sebagai PNS guru akan dicabut bila dirinya tidak bersedia menerima tawaran tersebut. Sadi juga disuruh untuk mengajak warga yang masih bertahan untuk mengikuti dirinya pindah ke Kayen.<sup>53</sup>

Sadi membujuk beberapa warga yang masih bertahan untuk mengikuti pilihannya dalam menerima tawaran pemukiman di Kayen. Setelah berhasil membujuk 6 KK yang ikut pindah bersama dirinya, sampai bulan Februari 1990 warga Kedung Ombo yang bertahan dan memilih pindah ke Kayen Ada 31 KK.<sup>54</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Wawancara dengan Sadi Dwijowiyoto 13 Juli 2018. Sadi kemudian berdiskusi bersama sang istri, Widarti, sebelum mereka memutuskan untuk pindah ke Kayen. Menurut Darwati, mereka harus memilih ke Kayen agar suaminya tetap bisa bekerja sebagai PNS untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Sebagai seorang pedagang, menurut Darwati pendapatannya tak seberapa, sehingga mereka juga masih mengandalkan hasil pertanian dari lahan seluas 2 ha. Dengan adanya waduk, lahan mereka harus tenggelam. Dalam kondisi lahan sudah tenggelam, ancaman pencabutan status PNS, maka pilihan paling realistis adalah menerima tawaran pindah ke Kayen. Sekaipun keputusan ini akhirnya banyak dicaci oleh teman-teman seperjuangannya kala melawan pembangunan waduk. Sadi dianggap malah berkompromi dan tidak berkomitmen untuk tetap melakukan perjuangan mempertahankan tanah kelahiran dari pembangunan waduk. Menyikapi hal demikian Sadi dan Darwati tidak mau ambil pusing dan tetap percaya pilihannya adalah benar sekalipun sedikit ada penyesalan tatkala mereka ternyata harus membayar lahan di Kayen. Semula mereka merasa lahan di Kayen bisa didapatkan secara gratis sebagai ganti rugi lahan yang telah tenggelam. Namun pada kenyataannya mereka harus membayar lahan Rp 160/m2.

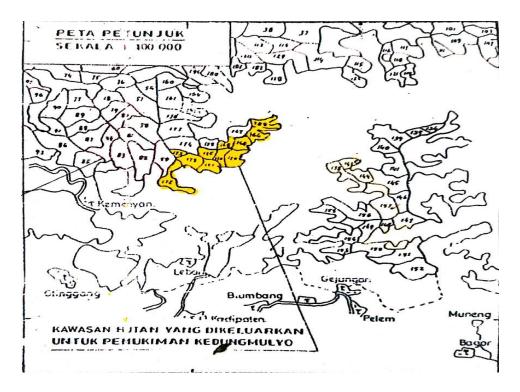
<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>"Seorang Guru Ajak Warga Pindah ke Kayen", *Suara Merdeka* 5 Februari 1990. Dalam berita di Suara Merdeka disebutkan bahwa sorang guru bernama Sadi menjadi pahlawan karena berhasil mengajak warga Kedung Ombo yang Bertahan

Pemerintah merasa jumlah warga yang pindah ke Kayen belum seberapa bila dibandingkan dengan mereka yang masih bertahan. Hingga pada akhirnya pemerintah mengabulkan isi permohonan surat warga yang diwakili oleh Jaswadi, dimana warga tidak ingin pindah dari wilayah genangan terkecuali mereka diizinkan untuk menempati wilayah sabuk hijau dan membuka pemukiman di area hutan. Menurut Jaswadi, selain soal ganti rugi lahan yang rendah warga ngotot bertahan karena ingin memperjuangkan tanah kelahiran dan warisan nenek moyang mereka.

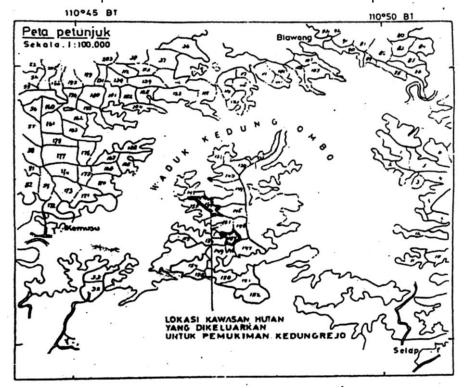
Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991 dilepaslah tanah kawasan hutan seluas 58, 2550 Ha yang terletak di petak 143, 144, 157 dan 158 RPH Grenjengan, Desa Ngrakum dan seluas 249, 1615 Ha di petak 189, 165, 168, 170, 175, 171, 172, dan 173 RPH Kemusu, Desa Genengsari, BKPH Kedung Cumpleng, KPH Telawa, Kabupaten Boyolali untuk digunakan sebagai pemukiman penduduk yang tanahnya terkena proyek Waduk Kedung Ombo yang masih bertahan di lokasi genangan. Wilayah-wilayah inilah yang kemudian menjadi sebuah desa baru. Kedua lokasi pemukiman tersebut kemudian menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Kedungmulyo dan Desa Kedungrejo. Sayangnya wilayah ini dianggap warga sebagai wilayah yang kritis dan sangat jauh bila dibandingkan dengan kesuburan tanah mereka yang ditenggelamkan oleh air waduk.

untuk pindah ke Kayen sebagai upaya penyelesaian masalah yang selama ini gagal diatasi oleh Pemda.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Keputusan Menteri ini selengkapnya dapat di lihat di lampiran.



Gambar 12. Peta kawasan Perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungmulyo 1991 Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991



Gambar 13. Peta Kawasan Perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungrejo 1991. Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991

Tawaran pemukiman baru ini pun akhirnya tidak serta merta membuat para korban yang bertahan pindah begitu saja. Sebanyak 34 orang warga di Kedungpring masih tetap berjuang untuk menggugat dua instansi pemerintah, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Direktur Jendral Pimpinan proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna. Pada tanggal 13 Juni 1990 gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Substansi gugatan adalah gubernur mengeluarkan SK. No. 593.8/105/1988 tentang pedoman penetapan nilai ganti rugi. Surat Keputusan yang terbitkan tertanggal 2 Mei 1988 itu dianggap tanpa sepengetahuan para penggugat. Padahal, ketika itu belum ada persetujuan ganti rugi antara tergugat dan para penggugat. Tetapi sayangnya Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 20 Desember 1990 mengambil putusan menolak permohonan pihak penggugat. Semarang diajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang pun juga tak membuahkan hasil. Dalam putusan tertanggal 19 April 1991, PT Semarang justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Upaya warga untuk terus menempuh jalur hukum tidak berhenti disitu, kegagalan di PN dan PT mereka lanjutkan dengan mengajukan kasasi ke MA. Gugatan itu membuahkan hasil tatkala pada 28 Juli 1993 Majelis Hakim Kasasi MA melalui putusan Reg. No. 2263 K/Pdt/1991 yang terdiri dari Prof. Asikin Kusuma Atmadja, M. AM Manrapi, RL Tobing mengabulkan gugatan warga

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Nusantara op cit, hlm. 19.

Kedungpring.<sup>57</sup> Melalui putusan ini Pemda Jateng harus membayar ganti rugi Rp 50.000 per meter persegi. Tanaman sebesar Rp 30.000 per meter persegi.<sup>58</sup>

Keberhasilan perlawanan warga Kedungpring melalui jalur hukum ini sayangnya tidak pernah ditindaklanjuti. Putusan Asikin hanya berlaku diatas kertas. Belum sampai eksekusi dijalankan, Ketua MA Purwoto menangguhkan eksekusi, dan melalui Peninjauan Kembali (PK) kemudian membatalkan putusan Asikin melalui putusan Reg no 650 PK/Pdt/1994.<sup>59</sup> Dalam putusan ini menyatakan bahwa kasasi warga Kedungpring tidak dapat diterima.<sup>60</sup>

Meskipun secara hukum persoalan Kedung Ombo dianggap pemerintah telah selesai dengan dibatalkannya putusan MA melalui PK, warga dan banyak pihak terkait tetap meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Kedung Ombo secara lebih substantif, mengingat banyaknya warga yang masih bertahan dan tetap menolak relokasi. Sikap warga yang menolak relokasi ini sebenarnya cukup beralasan, sebagaimana penuturan Jaswadi, ini terkait dengan biaya dan sarana pra sarana umum di lokasi pemukiman baru. Mereka tak mungkin bisa pindah sendiri karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memindah rumah dan perabotannya. Di lokasi pemukiman baru, mereka juga membutuhkan fasilitas

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>"MA Menangkan Warga Kedungombo, Ganti Rugi dari Rp. 250 Menjadi Rp. 50 Ribu", *Jawa Pos*, 7 Juli 1994.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Nusantara op cit, hlm. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>PK ini dituding akibat desakan Soeharto yang tidak terima atas kemenangan warga Kedungpring di MA. Lihat: "Presiden Tanyakan Kasus Kedungombo, Pemerintah Cari Upaya Hukum, Ketua MA: Pengadilan Bebas", *Suara Merdeka*, 26 Juli 1994.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>"Presiden Soeharto Tanyakan Putusan MA Soal Kedungombo", *Kompas*, 26 Juli 1997.

umum semacam sekolah, tempat ibadah, saluran air dan hal lain yang harusnya terlebih dahulu dibangun sebagai fasilitas penunjang kehidupan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri terus mendapat desakan dari Bank Dunia dan Exim Bank untuk segera menyelesaikan kasus Kedung Ombo hingga pada akhirnya diambillah kebijakan yang akomodatif. Kesulitan pemerintah dalam melakukan relokasi warga yang bertahan ke wilayah perhutani yang sudah dilepas akhirnya disikapi dengan kebijakan yang lebih manusiawi. Dimulai dengan membuka dialog dengan warga, pemerintah pusat menggagas program sebagai upaya rehabilitasi kehidupan bagi warga yang bertahan dan terutama mengupayakan mereka untuk mau direlokasi.<sup>61</sup>

Program aksi kemudian dibuat dan dilaksanakan di Kedung Ombo selama 4 tahun (tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002). Program ini menghabiskan dana sebesar Rp 41.470.259.125. Hal ini ditempuh karena tidak lepas dari upaya pemerintah pusat yang kala itu dipimpin oleh Gus Dur yang menginginkan kasus ini diselesaikan dengan musyawarah.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Kebijakan pemerintah Indonesia ini tidak terlepas dari keluarnya kebijakan dan pedoman Bank Dunia yang dirancang untuk melindungi masyarakat adat termasuk: No. Kertas Teknis Bank Dunia 80/1988 menyatakan bahwa populasi pengungsi dan masyarakat tuan rumah harus terlibat dalam tahap perencanaan pemukiman kembali rudapaksa; Petunjuk Operasional 4.00 yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan untuk proyek bendungan dan reservoir; dan Petunjuk Operasional 4.20 tahun 1991 yang dirancang untuk melindungi masyarakat adat warisan budaya dan memastikan mereka tidak lebih buruk untuk proyek-proyek Bank Dunia. Kebijakan Bank Dunia juga tidka terlepas dari desakan berbagai LSM dan media yang banyak menyoroti kasus-kasus pembangunan bendungan yang bermasalah, seperti di Kedung Ombo. Lihat: Bernadette Whitelum. 2003. "Rhetoric And Reality in the World Bank's Relations with NGOs: an Indonesia Case Study", *A thesis* submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Australian National University, hlm 288.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>"Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang", *Suara Pembaruan*, 5 April 2000.

Tabel 7. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan di Kedung Ombo Tahun 1998-2002

Tahun	APBN	APBD	APBD	Intruksi	Bantuan	Bantuan Luar	Jumlah
Anggaran		Provinsi	Kabupaten	Gubernur	Gubernur	Negeri	
1998/1999	1.091.838.000	108.985.000	439.500.000	0	32.500.000	0	1.672.823.000
1999/2000	2.616.882.000	711.823.500	737.845.000	0	126.901.500	0	4.193.452.000
2000	2.137.196.000	5.070.387.500	0	0	336.038.000	0	7.543.621.500
2001	2.678.001.000	2.066.617.000	2.148.666.000	626.500.000	254.440.000	1.270.690.000	9.044.914.000
2002	8.126.922.800	7.421.907.500	2.039.868.325	0	1.426.750.000	0	19.015.448.625
Jumlah	16.650.839.800	15.379.720.500	5.365.879.325	626.500.000	2.176.629.500	1.270.6900.000	41.470.259.125

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2002)

Pemerintah yang diwakili oleh pihak provinsi, yang kala itu dipimpin oleh Gubernur Mardiyanto (1998-2003) diutus untuk menyusun beberapa langkah untuk fokus pada pemberdayaan warga Kedung Ombo dengan fokus utama memerangi belenggu 3K (kemiskinan, keterbelangan, dan keterisolasian). <sup>63</sup>

Sejak 1998, persoalan Kedung Ombo disikapi pemerintah dengan menaruh perhatian untuk merelokasi warga yang masih bertahan di kawasan sabuk hijau, serta rehabilitasi kehidupan warga. Pemerintah yang semula melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan mulai berbenah, akhirnya pemerintah mengakomodir pendapat warga untuk diadakan musyawarah dan pertemuan dengan warga yang masih bertahan pada pertengahan Oktober 1998 di Kecamatan Kemusu, Boyolali yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati, diantaranya, pemerintah akan membangun jalan dan jembatan sekitar waduk, penyedian air bersih, pembangunan sarana pendidikan, terutama SMU, penyedian sarana listrik bagi masyarakat. Selain itu, Gubernur Mardiyanto mulai melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Isdiyanto, op. cit., hlm. 84.

pendekatan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk menggali aspirasi warga guna membicarakan kemungkinan adanya relokasi bagi mereka yang masih bertahan.<sup>64</sup>

Semenjak dilantik menjadi gubernur pada 24 Agustus 1998 gubernur Mardiyanto melakukan kunjungan beberapa kali ke Kedung Ombo berikut napak tilas dan beberapa hasil pertemuan antara Gubernur Mardiyanto dan warga Kedungombo.

### 1. Tanggal 13-14 Oktober 1998

Pertemuan pertama ini berlangsung di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali. <sup>65</sup> Agenda pertemuan ini adalah kunjungan kerja dan dialog dengan warga. Hasil pertemuan ini menghendaki agar pemerintah melakukan hal-hal berikut,

- a. Pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan
- b. Pengadaan sarana air bersih
- c. Sertifikasi tanah
- d. Pemasangan jaringan listrik
- e. Pembangunan SMU di Kemusu

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Bagi pemerintah pertemuan ini sebagai bentuk awal komitmen untuk melakukan program aksi bagi warga yang bertahan. Sedangkan bagi warga yang bertahan, pertemuan ini minimal membuat pemerintah sadar bahwa, mereka yang bertahan hanya ingin mendapatkan hak-hak mendsar dalam hidup mereka setelah kehidupannya ditenggelamkan oleh air waduk. Upaya mereka yang bertahan selama ini dan tidak mau direlokasi adalah bentuk protes kepada pemerintah. Mereka sebenarnya bisa saja menerima relokasi dengan syarat terpenuhinya sarana dan prasarana mendasar di lokasi relokasi yang semula adalah hutan. Sayangnya, jangankan membangun sarana, sebelum pertemuan itu diolakukan, pemerintah bahkan selalu menyalahkan warga yang tidak mau pindah.

### 2. Tanggal 31 Juli 1999

Kunjungan kembali ke Desa Klewor dan berlanjut ke Desa Kedungmulyo, Kemusu. Acara di Desa Klewor untuk meninjau sambungan listrik, meninjau calon lokasi SMU, temu wicara dengan siswa SMU Kemusu dan pemberian bantuan peralatan tulis. Sedangkan acara di Kedungmulyo yakni melakukan penyerahan sertifikat tanah kepada warga setempat, yang mencakup 367 lembar sertifikat. Sekaligus juga melakukan penyerahan bantuan dana untuk usaha, serta pengadaan sarana/peralatan untuk budidaya ikan dengan sistem karamba.<sup>66</sup>

# 3. Tanggal 23 Februari 2000

Kunjungan ini bertujuan untuk meresmikan SMU Kemusu, dan berdialog dengan warga di Desa Klewor, Kedungpring, dan Desa Kedungrejo, Kemusu.<sup>67</sup> Dalam pertemuan ini warga menyampaikan aspirasi sebagai berikut,

- a. Pengadaan air bersih di Dukuh Ngelaban dan Ngesikrejo di Desa Klewor
- b. Perbaikan jalan yang menghubungkan Desa Genengsari, Kedungmulyo,
   Kedungrejo, dan Desa Bawu
- c. Permohonan lampu-lampu penerangan jalan umum

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Dialog ini minimal menjadi ruang terbuka bagi masyarakat yang masih bertahan untuk mengutarakan apoa yang menjadi alsan mereka hingga saat itu tidak mau direlokasi. Mereka akhirnya menyampaikan aspirasi bahwa, pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas umum agar warga bisa menjalanmi aktivitas sebagaimana saat mereka belum digusur oleh waduk. warga berpikir bahwa mana mungkin mereka bisa hidup di lahan relokasi bila tak ada sarana seperti ketersedian air, jalan, jembatan, listrik dan fasilitas sekolah.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Isdiyanto, *op. cit.*, hlm. 98-99.

- d. Perlunya membangun jembatan yang menghubungkan Desa Genengsari dan
   Desa Klewor
- e. Warga menginginkan adanya dialog antara warga dan pemerintah secara rutin
- f. Gubernur meminta warga untuk lebih memikirkan masa depan

### 4. Tanggal 21 Maret 2000

Gubernur mengundang Paguyuban Warga Kedungombo (PWK) yang masih dipimpin oleh Darsono. Hasil pertemuan ini warga berharap mendapatkan kepercayaan untuk mengelola lahan pasang-surut di kawasan sabuk hijau. Dalam hal ini, Bapelda mengatakan daerah pasang-surut dapat digunakan untuk budidaya tanaman semusim, tetapi dengan resiko tergenang air jika volume air waduk meningkat. Warga Kedungpring pada prinsipnya juga bersedia untuk direlokasi.

### 5. Tanggal 3 April 2000

Pertemuan berlangsung di pendapa Kecamatan Kemusu, yang bertepatan dengan kunjungan presiden (Abdurrahman Wahid) ke Kedung Ombo. 68 Dalam acara ini Gubernur melaporkan berbagai upaya pemerintah dalam rangka rehabilitasi maupun pemberdayaan warga. Gubernur mengakui bahwa masalah Kedungombo belum tuntas. Hasil musyawarah ini menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>"Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang", *Suara Pembaruan*, 5 April 2000.

- Mengharapkan agar kawasan hutan yang sudah dijadikan lahan permukiman warga Kedung Ombo (sebelum relokasi warga Kedungpring) agar dijadikan hak milik
- Menuntut rehabilitasi (pemulihan) nama baik sejumlah warga, terutama mereka yang dicap sebagai PKI atau mereka yang dalam KTP nya dibubuhi kode ET
- c. Mengharap adanya jembatan di Desa Genengsari, sarana perhubungan antara
   Genengsari dan Guwo, pembangunan Masjid dan pengadaan air bersih.

## 6. Tanggal 1 Februari 2001

Gubernur mengunjungi warga desa yang sedang panen. Gubernur meninjau pembangunan TK di Desa Kedungrejo. Kunjungan Gubernur yakni ke wilayah sabuk hijau, dusun Kedungpring, Desa Kedungrejo, Kemusu. Ia meyaksikan sendiri panen Padi yang terendam air waduk, kemudian menyerahkan bantuan alat pengering gabah kepada warga.<sup>69</sup>

Perjuangan warga yang masih bertahan di lokasi genangan waduk tetap berlanjut. Mereka yang hidup di area sabuk hijau dengan tetap bercocok tanam di area surutan air waduk sempat juga berhasil mengintervensi pemerintah untuk menunda penutupan pintu waduk di tahun 2001. Warga Kedungpring berkirim surat ke Gubernur H Mardiyanto. Dalam surat itu disampaikan bahwa warga sebentar lagi akan memasuki musim panen padi. Rata-rata setiap warga menanam padi di

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>"Pintu Waduk Kedung Ombo Jangan Ditutup", *Suara Merdeka* 18 Januari 2001.

lahan sekitar 1 ha. Setiap tahun warga Kedungpring hanya satu kali bisa menanam padi di daerah yang mengering itu. Hal serupa dilakukan oleh warga di Mlangi, Klewor dan wilayah lainnya.<sup>70</sup> Upaya ini berhasil dikabulkan pemerintah dan akhirnya warga bisa panen padi.

Melalui berbagai kebijakan semacam ini akhirnya upaya relokasi dapat berjalan dan diterima oleh warga. Beberapa warga akhirnya mau untuk direlokasi. Dari semula pada Maret 1989 yang masih terdapat 1.407 KK yang masih bertahan di lokasi genangan dan sabuk hijau akhirnya melalui kebijakan akomodatif seperti pelepasan lahan perhutani untuk pemukiman, hingga berbagai upaya rehabilitasi warga membuahkan hasil berupa kerelaan warga untuk mau meninggalkan wilayah pinggiran genangan dan sabuk hijau. Hingga akhir tahun 2002 warga yang mau untuk pindah ke wilayah yang telah dilepaskan perhutani sebanyak 795 KK. Relokasi dimulai dengan melakukan *landclearing* (membuldoser) tempat relokasi yang semula adalah hutan.<sup>71</sup>

Perpindahan ini baru mencapai 56% dari keseluruhan warga di Kecamatan Kemusu yang menolak ganti rugi, sebab sejumlah warga yang bertahan di kawasan sabuk hijau tercatat masih terdapat 612 KK.<sup>72</sup> Tapi langkah ini setidaknya dapat mengawali penyelesaian persoalan di Kedung Ombo di luar jalur hukum, dengan

'°Ibia

 $<sup>^{70}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>"Relokasi Bagi Warga: Titik Awal untuk Menatap Masa Depan", *Suara Merdeka*, 15 Februari 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Jumlah ini di dapat dari penuturan beberapa informan seperti Jaswadi dan Darsono. Wawancara dengan Darsono dilakukan pada 19 Juli 2018. Sedangkan sumber lain dalam *Menyelami Kedung Ombo* yang diterbitkan oleh Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah menyebut jumlahnya sekitar 526 KK. Lihat: Isdiyanto, *op. cit.*, hlm. 148.

mengedepankan perbaikan kualitas kehidupan di sana, termasuk memikirkan sertifikasi tanah sebagai tanda sah kepemilikan bagi warga di Kedungmulyo dan Kedungrejo.<sup>73</sup>

Menurut penuturan Jaswadi dan Darsono mereka yang bertahan di lokasi sabuk hijau memanfaatkan lahan-lahan genangan yang surut dari air waduk untuk bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu mereka yang bertahan memang jumlahnya mengalami perubahan. Hal ini karena beberapa warga kemudian memutuskan untuk bertrasnmigrasi hingga pindah ke rumah sanak saudara. Sedangkan bagi Jaswadi dan Darsono yang memilih untuk menerima tawaran pemerintah pindah ke Kedungmulyo dan Kedungrejo, pilihan ini tidak berdampak signifikan bagi kehidupan mereka. Secara ekonomi penghasilan mereka juga tidak mengalami peningkatan justru yang terjadi adalah kemerosotan.

Hal ini disebabkan karena lahan yang didapat di Kedungmulyo maupun di Kedungrejo tidak sebanding dengan lahan mereka yang ditenggelamkan oleh waduk. Bila di Kedungrejo dan Kedungmulyo mereka hanya mendapat lahan seluas 1.000 m2 sedangkan dahulu luasan lahan pertanian mereka saja mencapai 1 ha saat belum ditenggelamkan. Hal ini jauh berbeda ketika dahulu bisa mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan di Kedungmulyo dan Kedungrejo mereka harus bekerja serabutan. Beberapa warga bahkan memilih bekerja diluar daerah sebagai kuli bangunan. Sadi dan teman-temanya yang pindah

<sup>73</sup> "Sertifikat hingga Modal Usaha Dipikirkan", *Suara Merdeka*, 16 Februari 2002.

\_

ke Kayen ternyata dibebani biaya Rp 160 untuk setiap meter persegi tanah di Kayen. Padahal tanah di Kayen tidak sesubur sebagaimana tanah Sadi yang telah ditenggelamkan. Hal ini membuatnya kecewa mengingat harapan mereka adalah tanah di Kayen bisa di dapatkan secara cuma-cuma sebagai ganti rugi atas tanah mereka yang telah ditenggelamkan untuk kepentingan waduk.

## **BAB 5**

## KESIMPULAN

Munculnya perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo dari tahun 1985-2002 tidak terlepas dari arogansi pemerintah yang mengalienasi hak-hak warga setempat dalam proses pembangunan. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah yang sejak awal bertindak tidak kooperatif dengan tanpa melibatkan warga dalam perumusan kebijakan hingga tindakan represif dan intimidasi yang tak segan dilakukan aparat terhadap warga yang memilih bertahan di lokasi genangan waduk. Pada satu pihak, pemerintah memberi stigma mbalelo terhadap warga yang bertahan hingga secara serampangan membubuhan kode ET pada KTP warga tanpa alasan yang jelas, bahkan warga yang dipaksa agar mau menandatangi uang ganti rugi. Di lain pihak, warga tetap masih merasa enggan menerima besaran uang kompensasi ganti rugi lahan yang jauh dari harga tanah pada umumnya, ditambah dengan ketidakjelasan nasib masa depan kehidupan mereka yang digusur oleh waduk, menjadi alasan dominan untuk melakukan perlawanan. Latar belakang historis dan filosofi hidup masyarakat setempat yang sudah tertanam juga menjadi faktor yang membuat masyarakat bersikeras melakukan penolakan pembangunan.

Dominasi negara atas rakyat semakin tampak ketika proses penggenangan waduk berlangsung. Pada saat yang sama, merespon hal tersebut, masyarakat terpecah menjadi tiga kelompok. Pertama, warga yang memilih pasrah dan menyerah untuk di gusur, sehingga mereka mengikuti program transmigrasi pemerintah atau pindah secara swadaya ke lokasi lain diluar wilayah genangan.

Kedua, kelompok warga yang melakukan perlawanan secara pasif, yakni mereka yang memilih bertahan tinggal di pinggiran lokasi genangan dan sabuk hijau sebagai bentuk penolakan atas pembangunan waduk. Ketiga, kelompok warga yang melakukan perlawanan secara reaktif, yakni mereka yang selain bertahan di lokasi genangan juga sekaligus menggugat pemerintah melalui jalur hukum.

Penderitaan warga yang bertahan akhirnya menimbulkan simpati dari berbagai pihak seperti ormas hingga LSM. Kampanye menuntut pemerintah dan lembaga donor untuk bertanggung jawab dilakukan di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih kooperatif dengan menyiapkan pemukiman baru dan rehabilitasi kehidupan penduduk.

Menjelang akhir abad ke 20 dan memasuki abad 21, pemerintah pusat mulai menganggarkan dana untuk membangun sarana-prasarana di lokasi pemukiman yang baru. Hal ini cukup berhasil untuk membuat beberapa warga bersedia pindah dari lokasi genangan dan sabuk hijau ke lokasi pemukiman baru. Meskipun masih banyak pula warga yang bertahan, setidaknya kebijakan ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menerapkan pembangunan yang lebih manusiawi. Imajinasi soal kesejahteraan yang dibawa oleh proyek ini, bagi warga yang terkena dampak waduk merupakan sebuah jargon ilusi. Alih-alih membawa kesejahteraan, proyek ini justru lebih akrab dengan banyaknya protes dari berbagai pihak hingga penderitaan hidup warga yang terdampak.

Hingga detik ini berbagai persoalan dalam konteks pembangunan waduk ternyata masih berlangsung terus. Hal itu tampak dari sebagian warga yang tinggal di lokasi pinggiran genangan dan sabuk hijau. Dalam fenomena sosiologis, realitas tersebut menunjukan bahwa pembangunan waduk Kedung Ombo masih menyisakan persoalan, tidak sebatas psikologis, namun juga bisa jadi ekonomis. Kondisi ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## SURAT KABAR

- "Gubernur Akui Ada Oknum "Sunat" Uang Ganti Rugi", *Kedaulatan Rakyat* 28 November 1987.
- "Wong Cilik Kok Takon Surat Perintah, Jaluk Dibedil Pye?", Suara Merdeka, 19 April 1988.
- "Menteri PU Paksa Warga Pindah", Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 1988.
- "Menteri PU Intruksikan Warga Segera Pindah", Suara Merdeka, 19 Februari 1988
- "Warga Masih Tolak Ganti Rugi", Suara Merdeka, 22 Juni 1988
- "Penggenangan Waduk Kedung Ombo Diundur 1 Hari", *Suara Merdeka*, 13 Januari 1989.
- "Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo Capai 56,59 Meter", *Suara Merdeka*, 20 Januari 1989.
- "13 Dukuh Mulai Tergenang, Penduduk Membuat "Gethek", *Suara Merdeka*, 25 Januari 1989.
- "Mahasiswa Temui Ismail Bicarakan Kedung Ombo" *Kedaulatan Rakyat* 7 Februari 1989.
- "Oalah, Kedung Ombo", Editor, 11 Februari 1989.
- "Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 Meter" *Suara Merdeka*, 28 Februari 1989.
- "Soal Waduk Kedung Ombo Masih Hadapi Kesulitan", *Suara Merdeka*, 3 Maret 1989.
- "Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo", Kompas, 6 Maret 1989.
- "Genangan Air Makin Meninggi", Suara Merdeka, 25 Maret 1989
- "Sebuah Waduk Diatas 36 Buah Desa", Editor 25 maret 1989.
- "Kemelut Tragis Kedung Ombo", Editor, 25 Maret 1989.
- "Mereka Mencoba Tidak Menyerah", Tempo, 25 Maret 1989.

- "Menunggu Sang Air Menyentuh", Tempo, 25 Maret 1989.
- "Yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat", Tempo, 25 Maret 1989.
- "Selebaran di Kedung Ombo", Tempo, 15 April 1989.
- "Seorang Guru Ajak Warga Pindah ke Kayen", Suara Merdeka, 5 Februari 1990.
- "Kedung Ombo, di Hari-hari ini", Kompas, 24 Maret 1991.
- "Mendagri Minta Bupati Boyolali Turun ke Lapangan di Kedung Ombo", *Kompas*, 24 Maret 1991.
- "Tak Perlu Kekerasan untuk Tangani Kedung Ombo", *Suara Merdeka*, 25 Januari 1993.
- "MA Menangkan Warga Kedungombo, Ganti Rugi dari Rp. 250 Menjadi Rp. 50 Ribu", *Jawa Pos*, 7 Juli 1994.
- "Presiden Tanyakan Kasus Kedungombo, Pemerintah Cari Upaya Hukum, Ketua MA: Pengadilan Bebas", *Suara Merdeka*, 26 Juli 1994.
- "Hari-hari Penting Menuju Kasasi", Forum Keadilan, 4 Agustus 1994.
- "Menggapai Keadilan di Kedung Ombo", *Forum Keadilan* Nomor 8, Tahun III, 4 Agustus 1994.
- "Korban Tewas Di Kedung Ombo 15 Orang", Suara Merdeka 12 Januari 1996.
- "Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang", Suara Pembaruan, 5 April 2000.
- "Pintu Waduk Kedung Ombo Jangan Ditutup", Suara Merdeka 18 Januari 2001.
- "Relokasi Bagi Warga: Titik Awal untuk Menatap Masa Depan", *Suara Merdeka*, 15 Februari 2002.
- "Sertifikat hingga Modal Usaha Dipikirkan", Suara Merdeka, 16 Februari 2002.

## **BUKU DAN JURNAL**

- Adam, Asvi Warman dkk. 2006. Soeharto Sehat. Yogyakarta: Galang Press.
- Aditjondro, G. J. 1993. "The Media as Development "Textbook": A Case Study on Information Distortion in The Debate about the Soscial Impact of an Indonesian Dam" dalam *Cornel University*.
- ----- 1998. "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia", dalam Philip Hirsch and Carol Warren (eds.), *The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources and Resistance*, London dan New York: Routledge.
- Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas. 2001. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: KPG bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation.
- Cipta, Herman Dwi. 2013. Kontroversi G 30 S. Jakarta: Palapa.
- Fakih, Mansour. 2011. Runtuhnya Teori Pembangunan. Yogyakarta: Insist Press.
- Goodland, Robert. 2010. "The world Bank Versus The Commission On Dams", dalam *Water Alternatif* volume 3.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Understanding History: a primer of historical method*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto dengan judul *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press
- Gultom, Samuel. 2003. *Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara*. Jakarta: ELSAM.
- Gustiana, Phil IM. 2012. Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam. Jakarta: RM books.
- Hadi, Syamsul dkk. 2012. Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Hadiprayitno, Irene. 2009. "Hazard Or Right? The dialectics Of Development Practice and The Internationally Declared Right to Development, With Special Reference to Indonesia", dalam *School of Human Rights Research Series*, volume 31.
- Hasanah, Hasyim. 2016. "Implikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru (Tinjaun Filsafat Sejarah Pragmatis)", dalam *Wahana Akademika*. Volume 3. Nomor 2

- Isdiyando, dkk. 2002. *Menyelami Kedungombo: Investigasi Wartawan*. Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan Jawa Tengah.
- Isnaeni, Hendri F. 2012. *Reforma Agraria: Konflik Agraria Terjadi Karena UUPA Tidak Dijalankan*. Jakarta: Historia.
- Karmono. 2005. "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)", *Tesis* pada jurnal penelitian di Universitas Diponegoro.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Mulder, N. 1985. *Pribadi Dan Masyarakat Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Muntholib, Abdul. 2016. "From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of Kedung Ombo Reservoir For Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia" dalam *Sosial Science*, 13 November 2016.
- Najib, Emha Ainun. 2015. Gelandangan Di Kampung sendiri: Pengaduan Orang orang Pinggiran . Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Novandi, Ardhi Setyawan. 2019. "Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten Grobogan Tahun 1989-1998", dalam *Skripsi* di jurnal penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, Wahyu Budi. 2018. "Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru", dalam *Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness*, Volume 12, Nomor 1.
- Nusantara, Abdul Hakim dan Budiman Tanuredjo. 1995. Dua Kado Hakim Agung buat Kedung Ombo: Tinjauan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo. Jakarta: ELSAM.
- Pakpahan, Mochtar. 1990. Myth and Ideology Of Development Case Study Kedung Ombo Dam. Tesis, Faculty Of Arts And Cultur, (Gajah Mada University, Yogyakarta,)
- Prasetyohadi. *Democratic Actor in The Kedung Ombo Land Right Struggle* (2004), http://democracyandpeace.blogspot.com/2004/11/democratic-actors-in kedung-ombo-land.html (diakses 9 Juli 2019).

- Rahman, Imron Rosyid Taufikkur. 1998. "Protes Petani di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (1985-1993)", *Skripsi* pada jurnal penelitian di Universitas Sebelas Maret.
- Rossa, John dan Ayu Ratih. 2008. "Sejarah Lisan di Indonesia dan Kajian Subyektivitas" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna saptari (eds). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITL
- Rumansara A. 1998. "The Struggle of the People of Kedung Ombo", *The Struggle for Accountability: the World Bank, NGOs, and grassroots movements*, Fox & Brown (eds.), Cambridge, Mass: MIT Press.
- Salim, Emil. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LP3S.
- Schoengold, Karina dan David Ziberman. 2014. "Creating a Policy Environment for Sustainble Water Use", artikel ini dipublikasikan dalam *Research Gate* pada 2 juni 2014.
- Smith, Neil. 1991. *Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space*. Oxford: Ideas Basil Blackwell.
- Soedargo. 1976. "Hukum Agraria Dalam Era Pembangunan", dalam *Prisma*, No.6.
- Stanley, Adi Prasetya. 1994. Seputar Kedung Ombo. Jakarta: ELSAM.
- Sulastomo. 2008. Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru. Jakarta: Kompas.
- Vatikiotis, M. 1993. *Indonesian Politics Under Suharto, Order, Development and Pressure to Change*. London: Routledge.
- Wardaya, Baskara T. 2006. "Menengok Kembali Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Secara Kritis", dalam Asvi Warman Adam, *Soeharto Sehat*, Yogyakarta: Galang Press.
- ----- 2009. Membongkar Supersemar Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno. Yogyakarta: Galang Press.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Panitia Pengadaan Buku Ajar Gugus Pengembangan Mutu Akademik Pusat Penjamin Mutu Universitas Negeri Semarang dan Penerbit Unnes Press.

- Whitelum, Bernadette. 2003. "Rhetoric And Reality in the World Bank's Relations with NGOs: an Indonesia Case Study", *A thesis* submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Australian National University.
- Wibowo, Guntur Arie Wibowo. 2014. "Pemberontakan Petani di Kecamatan Kemusu-Boyolali 1985-1993", dalam *Journal Seunneubok Lada*, Volume 1, Nomor 1.
- Wijayati, Putri Agus. 2008. "Pemilikan dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur)", Forum Ilmu Sosial, Volume 13, Nomor 1.
- -----, "Semarang dan Surabaya dalam Perspektif Historis dan Ekonomi Kota: Sebuah Pemikiran Historiografis" dalam *Sasdaya, Gadjah Mada Journal of Humanities* Volume. 2, Nomor. 1.
- World Bank. 1998. Recent Experience With Involuntary Resettlement Indonesia Kedung Ombo. Report No. 17540.
- ----- 2000. "Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience", dalam *Precis*, Operation Evaluation Departementy (OED), number. 194.
- Yulianto, Dhani, dkk. 2017. "Police Implementation Management Of Kedung Ombo Reservoir In Central Java Province Towards Continuity Development Perspective", *IJSER*, Volume 8.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat No. 181.1/002438 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali Kepada Camat Kemusu Perihal Pendataan Tanah Penduduk Yang Terkena Proyek Waduk Kedung Ombo yang dimulai pada 1985



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I

## BOYOLALI

Nomor: 181.1/002438.

Tumb. 1: ---

Hall : Pendataan tanah ponduduk yang, torkena proyok waduk Kodung Ombo Boxolall, 28-8-1985

Rogador With :

gdr. Camat Kopala Wilayah Kecamatar

D1

K.E M U B U .

matan kamunu yang akan terkena genangan proyok waduk kedung omboyang sampak saab ini masih ada beberapa penduduk yang tidak mau manandatangank kebenaran data y milikan tanah belerta Bangunan dan karang kitrinya, hal tersebut jelas akan menghambak pelaksansan proyok waduk Kedung Ombo.

untuk hal itu harap paudara memberi, penjelanan kepada penduduk dik wilayah paudara bahwa, pendataan tanah terpebut bukan untuk senen tukan gantih rugi, tanah secara langang.

penanda tanganan warga masyarakat terhadap hasil pendahain dark petugas perektorat Agreria path I Jawa Tengah pada hakokatnya un tuk menentukan kebenaran pemilihan yang dipunyan dari masing - me sing warga masyarakat yang berina tanah, banguana serta karang kil tuh.

gedang penentuan besarnya gantimugh tanah dari masing - masing Dosa akan ditentukan kemudian oleh panitya Tingkat kabupaten setelah mendapat kesepakatan antara warga masyarakat yang bersang kutan dengan Pimpinan proyek waduk kedung Orko. Untuk memperlancar tugas - tugas tersebut kami harap saudara dapat memberikan pengarahan kepada warga manyarakat untuk bersedia menan datangani hasil pendataan Jari masing -masing tanah miliknya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilakcanakan.

BUPATI KEPALA DABBAU TINGKAT II

CL. III A B D I

TEMBUSAN :: dikirim kepada yth

<sup>1.</sup> Ka. Kgrarija Kab. Boyolali.

<sup>2.</sup> Ka. SOSPOL Kab. Boyolali.

<sup>3.</sup> pombanta Bupati untuk wilayah Kerda

Wonosegoro di Karanggodo. 1- Kopala Desa Bawu, Lemahireng, Mgianji, Komusu, Ganonguari, Klewor, Sarimulyo

dan Ngrakum.

5. A r o 1 p.

Lampiran 2: SK No. 593.8/105/88 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Tengah Tentang Besaran Ketetapan Ganti Rugi tanah, Bangunan, Tegalan dan lain Sebagainya dalam Pelaksanaan Pembebasan Tanah Proyek Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, Sragen, dan Boyolali



## UBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MOMOR : 593.8/105/88:

PERCEPTAPAN BESARIYA GAUTI RUGI TAMAH, BANGUNAN, PAREEM DAN LAIN SEBAGAINYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN LELENEN BASAN TAMAH PROYEK WADUK KEDUNGOMBO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN, SRAGEN DAN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

UBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

tanggal 20 September 1983 Nomor: 593.8/290/1983 ten tanggal 20 September 1983 Nomor: 593.8/290/1983 ten tang Pedoman Penetapan Basarnya Ganti Rugi Tanah, Bagngunan, Tanaman dan lain sebagainya dalam rangka pelak
sanaan Pembebasan Tanah P. oyek Waduk Kedungombo diskabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyololi dan Suret Guberner Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Juni 1984 Nomor: 593.8/16950 perahal
Pedoman Besarnya Ganti Rugi Tanah untuk Waduk Kedung ombo Talan 1994/1985.

regetheren Guternur Kepal: Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Marcel 13 april 1985 Homor: 593.8/133/1985 tentang redoman Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tenamen dan lein sebagainya dalam rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Proyek Waduk Kedungombo di Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyolali Tahun Anggaran 1985/1986.

Keputusan Gubernur Kepala Daerek Tingkat I Jawa Tengeh tanggal 25 Agustus 1986 Nomor: 592.2/232/1986 tentang Fedoman Penetapan Besernya Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Janamen dan Lain Lebagginyi dalam rangka Pelaksanaan - Pembebasan Tanah Proyek Waduk Kedungombo di Kabupatan Daerah Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyolali Tahun anggaran 1986/1987.

4. Keputusan .....

- 4. Keputuaan Gubermur Kepala Daerch Tingkat I Jewa Tengah tanggal 2 Mei 1987 Nomor: 593.8/135/1987 tentang Pedo men Penetapan Benornya Ganti Rugi Tonah, Bengunen, Tenaman dan Tala nabagainya dalam rangka Pelaksanaan Pem bebasen Tanah Proyek Waduk Kedungombo di Kebupaten Dae rah Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyolali Tahun Anggeren 1987/1988.
- . Hesil Rop: t Koordinasi mengensi Proyek Waduk Kedungombo tanggal 31 Maret 1988 di Ruang Kerja Wakil Gubernur Bidang I.
- a teng : a. Bahwa dalam rangka pelaksansan pembebasan tenah untuk Prayek Washak Kedungombo di Kabupaten Daerah Tingket II Grobogan, Seegen dan Boyoluli Tahun Inggaran 1988/1989 perlu adenya Pedoman Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tenah, Bangunan, Tanaman dan sebagainya yang terkena pro yek dimaksud.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu me notepkon Fedoman Besarnya Ganti Rugi Tanch, Bangunan , Tanaman den sebagainya delom Koputusan.

- ngingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;
  - 3. Undang-undang Homor 5 Tahun 1960;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;
  - 7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggul 23 Pebruari 1976 Nomor : Huk.16/1976;
  - 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daorah Tingkat I Jawa Tengen tanggal 3 April 1978 Nomor : Ag. 15/1978.

## MEMUTUSKAN

metopkan :

MATE

: Pedomen Penetepun Besornyt Genti Rugi Tanah, Bengunan, Ta naman dan lain sebagainya dalam rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Proyek Waduk Fudungombo di Kabupaten Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyolali Tahun Anggaran -1988/1989, sebagaimana daftar terlampir.

e D U k : Menginstruksikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkut Grobogen, Sregen den Boyoleli selaku Ketua Panitia Pelakaunaan Pembabasan Tanah Proyek Waduk Kacungombo untuk wilayahnya masing-masing, dalam na natapkan basarnya

rugi ......

- 3 -

rugi tenoh, benguner, taneman den lein sebegeinya dalem Tehun Anggeren 1988/1989 berpedomen pade defter terlempir Suret Keputusen ini.

TIGI

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apuhila dikamudian hari ternyata ter dapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetopkan di : Semorang Pada tanggal : 2 MEI 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

IMAN Surat Keputusan ini disempaikan ada Yth.:

denteri Sekretaria Negara di Jakorta;

Wenko EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta;

ienteri'Dalam Negeri di Jakarta;

Genteri Pekerjaan Umum di Jakarta;

enteri Kendngan di Jakarta;

irektur Jenderal Agraria Depdagri di Jakarta;

rirektur Jenderal Pengairun Departeman Pakerjaan -

"irektur Jenderal Anggoron Departemen Kewongon di ekerta:

Pirektur Jenderal ATRDAS pade Departemen Pekerjaan Pomus di Jakerta;

. can DPR! Tingket I Jewe Tengah di Semerang;

. cun BAPPEDA Tingkat I Jawe Tengah of Semarang;

Semno Asiaten Sekwilds Tingkot I Java Tengah di Se

actual ITVIL Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

re. Santu Gubernur Jawa Tengeh untuk Wilayeh Sema - reng 61 Semerong;

.ameantu Gubernur Jawa Tengah untuk Milayah Sura -

. cela Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah di

onti Kenolo Doorek Tingkat II Srugen di Srogen;

soti Regale Doeroh Tingkot II Grobegon di Purwo-

pari Espala Daeroh Mingkat II Boyoleli di Boyoleli

20. Anggota .....

PEDCULA PERETAPAR PRANCKYA GERTI RUGI TARAH, BALGUNAR, TANAHAN DAL LATA DEBARAKA DALAK CARUKA PELAKAMIAAN PERBERADAH TAHAH PACYAR MADUK REDURACI EC DI KARUPATEK DAERAH TIRUKAT II GROBO MAL, ORAJER DAE BOYCLALI.

```
a. denti hugi Tarah
                            (D1, D2, P) - Rp. 805,-/H2
   a. Panah Pekarangan
   h. Tanah Sawah Klas I
                            (31)
                                     - Rp. 483, -/h2
                                      - Kp. 402,5,-/N2
   e. Innch Sawah Klas II (32)
                            (13, 14, T) - 12p. 402, 5, -/12
   d. Panal. Pegal Klas I
   e. ranch Tegal Klas II (D5 dst) - Rp. 322,-/M2
   Gatatan :
   - ienti rugi tanuh khucus untuk Desa agandul, Pendem, Kecamatan
      Sumber Lawang, Dene boke, Kecamatan Miri, Kabupaten Daerah -
      Pingkat II Bragen dan Desa Blewor, Genengsari Kecamatan Kemu-
      su, Kabupaten Daerah Pingkat II Boyolali :
                               (D1, D2, P) - Rp. 839, 5, -/12-
      a. Panah Pekaren, an
                                       - kp. 505,-/M2
      b. Canah Sawah blas I
                               (11)
      c. Pageh Sawah Klas II (S2)
                                          - Rp. 414, -/M2 v
                              (D3, D4, T) - Rp. 414,-/12
      d. Panah Terul Klas I
    e. Tanah Tegal Elas Il (D5 dat)
                                         - lip. 333,5,-/MP
     - Tenah Sawah Klas 1 (31) : adalah sawah yang mendapat pengair
                                  ar teknis.
     - Ponch Jawah Blas II (J2) : adolah sawah tacah hujan, bukan pe
                                  ngairan teknis.
  r. Janti mici Bangunan
     a. Bangunan Permanen
                                - Mr. 8487 ,-/112
     b. bangunan Semi Formanen - Rp. 3542 ,-/N2
                                - Rp. 2472,5,-/M2
     c. Dengunan Sementara
     Catatan :
      - Bangunan Permanen :
       kerungka
                        : hayu jat.
        Dinding
                         : Tembok/knyu jati
        Jenting
                      : Vlams
        Lantoi
                          : bukan tanah (tegel, plasteran dan lainela
                            in)
      Baura ... Semi Permanan :
      ... roreks
                          : Kayu juti
```

dinding ......

Lanjutan: Dinding. : gedek kenting : Vlams Lantai : tunah - <u>Banganan</u> Cementara : Kerangka : bukan kayu jati Dinding : gedek lenting. : welit Lantai : tanah J. Ganti Rugi Bangunan lain-lain o. Summer nomps (Dragon dan lain-lain) - Rp. 7.072,5,-/per bush h. Jumur basan can - Rp.14.145,- /per buah c. joron -gorong - kp. 3.542,-/N2 d. Pagar pasangan batu - ·Rp. 713,-/M2 e. Pagar hidup - Rp. 138,-/M2 f. Jamban permanen - Rp. 1.414,5,-/112 g. Kuburan - Rp. 7.072,5,-/M2. h. Kolam ikan 356,5,-/M2 - Rp. D. Canti Rugi Bangunan Khusus (misalnya : SD, Masjid, Puskesmas, lai Desa dan lain-luin) Dibicarakan khusus oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Wila yah Sun zi. Jratunseluna dengan Panitia Pembebasan Tanah setempat. E. Ganti Rugi Tanaman JAMANIAT CINLL a. Tanaman Lahan Bangunan 1391,5 34,5 1. Jati 11,5 ! 1391:,5 690,-1 2. Enyu tahun 23,- 17 69,-138,-3. Emphi beser 23,- ! 46,-4. Sambu kecil b. Tanaman perdugangan/ lodustri ! 414.- ! .1391,5 1. Cen keh ! 276,-! 1391,5 2. Kelupa 7. !linjo, mete, randu ! 138,- ! 276,-483,-276,-23,-138,-1 4. heyu putih

69,-

. 276,-

c. Tenaman .....

! 11,5 !

. Puri/kenus

V. 7.	a 1
c. Tungan Bugh book	
i	
2. Such-bushen Jenie ke	1 ! 138,- ! 690,- ! 1391.5
2. Such-bushen jenis ke 3. di ang, pepaga	11 ! 23,- ! 138,- ! 276
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	23,- 1 66
Tansman lain-lain :	138,-
1. Tammen ternserin-	1 11,5 1 34.5
2. Leyn bakar jemie :	! 23 ! 222
3. Kepu bekar jenis 13	
	23,- ! 138,- ! 276,-
<u>Jatatan</u> :	
tovu tonur	
	: Sengon, trembesi, waru, sono, asem,
•	manoni garahi
	dendono Juhan dendono
. Cariba negati	omerativa.
	nengon, den gelen, petung, jewa, la
	nongon, den cebegainya.
tunh-backen jenis ke I	: Hangles
	: Hangka, sawo, mangga, kedondong, ke
	kluwih, potai, rambutan, duku dan sebagainyo.
· Buth-buthen jenis he II	
	: sirsat/wulwo, sarikoyo, jambu klu -
they be becausing	The schulet
	· marmangan/lamtoro, waterness
Laye toder Jenia ke I	ondra, dan sebagainya,
	Rentos, adam oti lelamid
Kayu bakar jenis ke II	a coegarity d.
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	: Senu, ward, kelor, lerak, dadap, ka
high - cheka mati mas as	
neden flan Rp. 5, - kentan a	owah An. 5,- libulatkan namb
mp. 805 mondos	as ri
Ry. 483, - menind	ur Kp. 810,-
i da, jan	di Rp. 480,- dan seteruanya.
. 19	
	GUBERING TENGAH TINGKAT T
4 1	TENGAH TINGKAT T

Lampiran 3: SK No. 419/Kpts-II/1991 Menteri Kehutanan Tentang Pelepasan Lahan Perhutani untuk Permukiman di Kedungmulyo dan Kedungrejo



## MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: 419/Kpts-II/1991.

### TENTANG

PELEPASAN TAMAH KAMASAN HUTAN SELUAS 58,2550 (LIMA PULUH PELEFFEAN TANAH KAMASAN HUTAN SELUAS 58,2550 (LIMA PULUH DELAPAN, DUA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH PER SEPULUH RIBU) HA TERLETAK DI PETAK 143, 144, 157 DAN 158 RPH GRENJENGAN-DESA NGRAKU!, DAN SELUAS 249,1615 (DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN, SERIBU ENAM RATUS LIMA BELAS PER SEPULUH RIBU) HA DI PETAK 189, 165, 168, 170, 175, 171, 172 DAN 173 RPH KEMUSU - DESA GENENG SARI, BEKPH KEDUNG CUMPLENG, KPH TELAWA, KABUPATEN BOYOLALI, PROPINSI JAWA TENGAH UNTUK DIGUNAKAN SERBAGAT DEMINITANAH DEMINININI YANG TANAHAWA TERGAHA PROPUNCI SEBAGAI PEMUKIMAN PENDUDUK YANG TANAHNYA TERKENA PROYEK WADUK KEDUNG OMBO

## MENTERI KEHUPANAN,

## Meninbang

- a. bahwa Montori Kehutankun dengan surat tgl. 27 Juli 1989 No. 958/ Menhut-II/1989, tgl. 3 Pebruari 1990 No. 179/Menhut-VII/1990 dan tgl. 18 December 1990 No. 2173/Menhut-I/1990 telah menyetujui permohonan tukar menukar tanah kawasan hutan oleh Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna;
- b. behwa berdasarkan persetujuan tersebut diatas, telah dilaksana-kan pengukuran bersama antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proginsi Jawa Tengah dan Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna atas tanah kawasan hutan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Bersama tgl. 1 April 1991;
- c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk melepas-kan tanah kawasan hutan seluas 307,4165 (tiga ratus tujuh, em-pat ribu seratus enam puluh lima per sepuluh ribu) ha sebagai-mana tersebut dalam Berita Acara Pengukuran Bersama tgl. 1 April 1991 untuk digunakan sebagai areal pemukiman penduduk yang tanahnya terkena Proyek Kedung Onto.

## Hengingat

- : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960;
- Undang-Undang No. 5 tahun 1960;
   Undang-Undang No. 5 Tahun 1967;
   Feraturan Penerintah No. 33 tahun 1970;
   Kegatusan Premiden No. 64/M tahun 1968;
   Keputusan Presiden No. 25 tahun 1990;
   Kegutusan Penerintah No. 178/Epts-II/tm/4/1975;
   Kegutusan Menteri Pertanian No. 399/Epts-II/1990.
   Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Epts-II/1990.

- perhatikan : 1. Surat Menteri Pekerjaan Umum No. TN.01.01.MA/484 tgl. 11 Desam 2. Surat Menteri Kehutanan No. 1143/Menhut-VII/1990 tgl. 23 Juni
  - 1990. 3. Barita Acara Pengukuran Bersama tgl. 1 April 1991.
    - MENUTUSKAN : .....

# MERUTUSKAN:

# enetapkan

- : (1) Melepaskan tanah kawasan hutan seluas 58,2550 (lima puluh delapan dua ribu lima ratus lima puluh persepuluh ribu) hektar yang terletak di petak 143, 144, 157 dan 158 di RPH Grejengan, Desa Ngrakum dan seluas 249,1615 (dua ratus empat puluh sembilan seribu enamratus limabelas persepuluh ribu) hektar di petak 189, 165, 168, 170, 175, 171, 172 dan 173 di RPH Kemusu, Desa Geneng Sari BKPH Kedung Cumpleng, KPH Telawa, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Bersama tanggal I April 1991 untuk digunakan sebagai pemukiman penduduk yang tanahnya terkena Prcyek Waduk Kedungombo.
  - (2) letak dan batas kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sebagaimana terlukis pada peta lampiran keputusan ini.
  - (3) Penyelesaian lebih lanjut terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EDUA

: Penggantian/penukaran tanah kawasan hutan seluas 307,4165 (tiga ratus tujih empat.ribu seratus enam puluh lima persepuluh ribu) hektar oleh Departemen Pekerjaan Unum cq. Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna diselesaikan bersama dengan penyelesaian penggantian kawasan hutan yang terkena Proyek Waduk Kedungombo secara kese luruhan.

KETTGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal 4: 19 Juli 1991.

MENTERY KEYUTANAN,

## S. L.INAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang FKUTN dan Pengawasan Pembangunan.

?, Sdr. Menteri Dalam Negeri.

.. ödr. Menteri Pekerjaan Umm.

1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional.

5. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

6. Sdr. Oubernur Kepala Duerah Tingkat I Jawa Tengah.

. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani. 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan

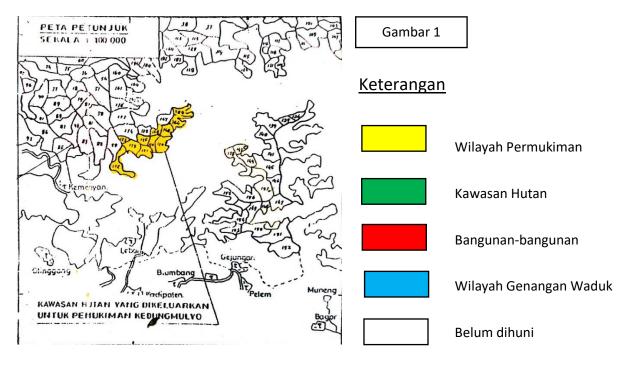
Propinsi Jawa Tengah. M. Salr. Kepala Mantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Tengah.

7. Sir. Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah. 1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali.

2. Bdr. Camat Kemusu.

Lampiran 4: Peta Wilayah Permukiman di Kedungmulyo Tahun 2002



Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991

PETA PEMUKIMAN KEDUNGMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH

HUTAN

WADUK KEDUNGOMBO

WADUK KEDUNGOMBO

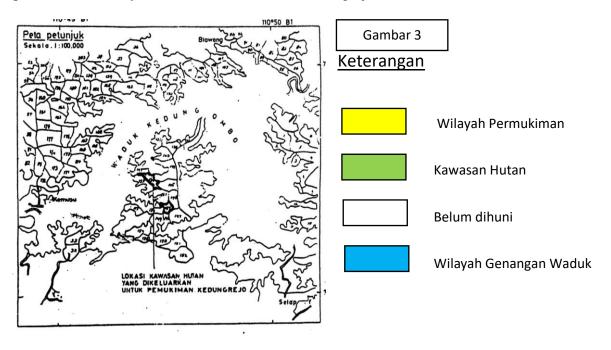
WADUK KEDUNGOMBO

WADUK KEDUNGOMBO

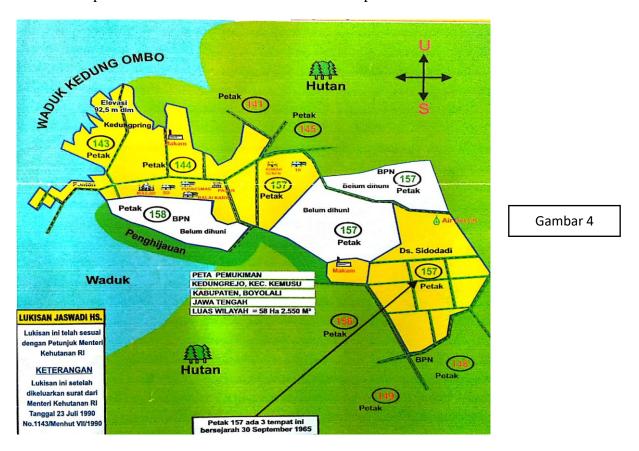
WADUK KEDUNGOMBO

Sumber: Kelompok Solidaritas Korban penggusuran Kedung Ombo

Lampiran 5: Peta Wilayah untuk Permukiman di Kedungrejo Tahun 2002



Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1991



Sumber: Lukisan Djaswadi

Lampiran 6: Keprihatinan Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo



# LEMBAGA PEMBELA HAK-HAK ASASI MANUSIA INSTITUTE FOR THE DEFENCE OF HUMAN RIGHTS

JALAN MENTENG KECIL 10 TELP. 342608 -

Jakarta, 28 Januari:1989.

No. 1 22/LPHAM/1/89.

H & 1 : WADUK KEDUNG OMBO.

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI.

di -JAKARTA.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya penggenangan air Waduk Kedung (Imbo, Boyolali, Jawa. Tengah yang terjadi baru-baru ini, sementara proses ganti rugi belum berlangsung sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka kami meresa perlu menyatakan keprihatinan atas masih terjadinya pembangunan-pembangunan proyek yang tidak mengindahkan hak-hak azasi manusia dan hukum yang berlaku.

Peristiwa Kedung Ombo adalah peristiwa yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan pencerminan suatu policy pembangunan yang tidak secara arif memperhatikan kemungkinan jatuhnya kurban fisik, sosial dan ekonomi dikalangan rakyat.

Kami memohon Bapak mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

t kami, la Hak-hak Azasi

RINCEN.

Tembusan kepada :

- Yth. Bepek Gubernur Jawa Tengah.
   Yth. Bapak Menteri Pekerjaan Umum RI.
   LBH Yogjakarta.
   LBH Jakarta dan YLBH Indonesia.
   Hedia Massa.
   A r s i p.

HJCP/mi.

## Lampiran 7: Daftar Informan

A. Nama Informan : Sadi Dwiyowiyoto

Alamat : Dusun Kayen, Kecamatan Juwangi, Boyolali

Umur : 70 tahun (10 Februari 1949)

Pekerjaan : Pensiunan PNS Guru

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2018

B. Nama Informan : Widarti (Istri Sadi Dwiyowiyoto)

Alamat : Dusun Kayen, Kecamatan Juwangi Boyolali

Umur : 70 tahun (19 September 1949)

Pekerjaan : Pedagang Tanggal Wawancara : 13 Juli 2018

C. Nama Informan : Jaswadi

Alamat : Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu Boyolali

Umur : 72 tahun (6 September 1947)

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 15 Juli dan 25 Juli 2018

D. Nama Informan : Jimin (Anak dari Jaswadi)

Alamat : Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu Boyolali

Umur : 41 tahun (7 Maret 1978)

Pekerjaan : Petani Tanggal Wawancara : 18 Juli 2018

E. Nama Informan : Darsono

Alamat : Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Umur : 69 tahun Pekerjaan : Petani Tanggal Wawancara : 19 Juli 2018

F. Nama Informan : Karmono

Alamat : Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Pegawai BPN Boyolali

Tanggal Wawancara : 22 Juli 2018

G. Nama Informan : Senen

Alamat : Desa Ngrakum, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Umur : 70 tahun Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 16 Juli dan 20 Juli 2018

H. Nama Informan : Tulus

Alamat : Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Umur : 69 tahun Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 17 Juli 2018

I. Nama Informan : Suroto

Alamat : Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Umur : 74 tahun Pekerjaan : Petani Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018

J. Nama Informan : Parno

Alamat : Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Umur : 70 tahun Pekerjaan : Petani Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018 Lampiran 8: Bukti KTP Penduduk yang dibubuhi ET Karena Menolak Pembangunan Waduk Kedung Ombo





Lampiran 9: Foto-foto



Ketika permukaan air dengan cepat meninggi, warga tak bisa lagi saling membantu. Semua orang sibuk menyelamatkan rumah masing-masing. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi)



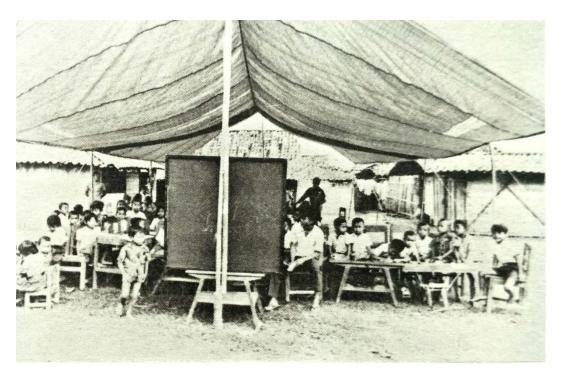
Sementara para orang tua cemas, anak-anak dengan ceria belajar berenang dengan memanfaatkan genangan air yang sebentar lagi akan menenggelamkan rumah-rumah mereka. (Sumber: Stanley, *Seputar Kedung Ombo*, hlm. 361)



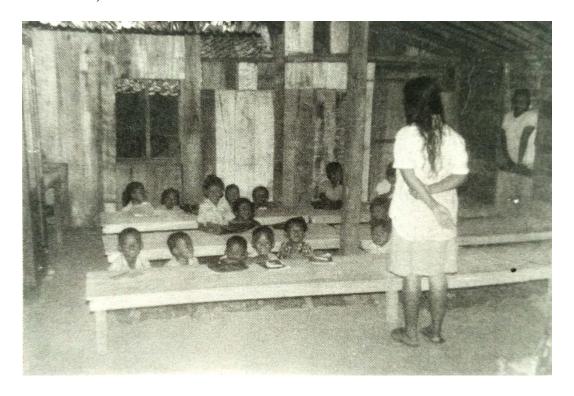
Makam-makam ikut tenggelam oleh air waduk. Ada beberapa makam leluhur yang dikeramatkan ikut tenggelam. Kaum tua merasa terhina dengan keadaan ini. (Sumber: Koleksi Pribadi Sadi)



Energi penduduk habis buat membongkar dan membangun rumah-rumah di tanah yang lebih tinggi. Mereka tak sempat memikirkan persedian pangan. (Sumber: *Suara Merdeka*, 25 Januari 1989)



Papan tulis dan deklet penahan panas ini sumbangan Romo Mangun untuk anakanak terlantar di daerah genangan waduk Kedung Ombo. (Sumber: *Kompas*, 6 Maret 1989)



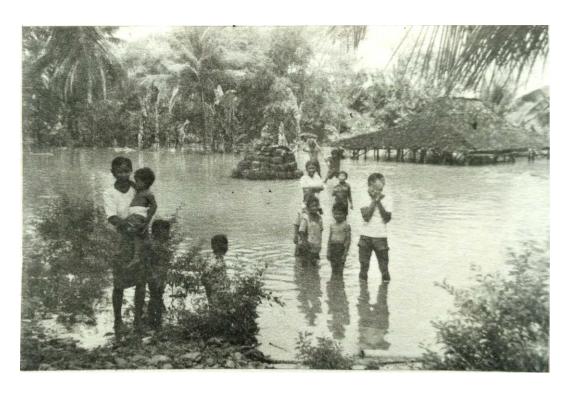
Untuk mengatasi anak-anak usia sekolah yang terlantar, penduduk mendirikan sekolah-sekolah darurat. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi)



Pembangunan seperti puting-beliung, yang sanggup memporak-porandakan apa saja. Warga Kedung Ombo menyebutnya sebagai bencana pembangunan. (Sumber: Koleksi Pribadi Darsono)



Rombongan KSKPKO menggunakan poster-poster yang menunjukan kekecewaan terhadap pemerintah waktu itu saat melakukan demonstrasi. (Sumber: Stanley, *Seputar Kedung Ombo*, hlm. 374)



Sebagian anak-anak usia sekolah yang terlantar, namun ditutup-tutupi oleh pihak Dinas Pendidikan. Selain jalan menuju sekolah telah terputus dan membuat mereka tidak sekolah, mereka juga harus membantu orang tua menyelamatkan puing-puing bangunan untuk dipakai kembali. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi)



Selain bermain-main dan memanfaatkan air waduk untuk berenang, anak-anak terkadang juga memancing di genangan air waduk. (Sumber: Koleksi Pribadi Darsono)



Air waduk bahkan menenggelamkan pohon-pohon yang tinggi menjulang seperti pohon kelapa. Menurut warga ini adalah bukti adanya *wader mangan manggar* sebagaimana mitologi yang mereka percayai. ((Sumber: Stanley, *Seputar Kedung Ombo*, hlm. 399)



Warga memanfaatkan lahan pasang surut untuk bercocok tanam. Mereka menanami padi. Sementara untuk lahan yang kering di areal perhutani mereka menanami jagung atau palawija lainnya. (Koleksi Pribadi Jaswadi)

# Penggenangan Kedungombo Diundur 1 Hari

PENGGENANGAN Waduk Kedungombo, yang sedianya dijadwalkan 12 Januari 1988 atau Kamis lusa diundur sehari menjadi hari Jumat, karena Menteri PU (Pekerjaan Umun) Ir. Radinal Moochtar yang sedianya melakukan penggenangan Bendungan tersebut pada tanggal 12 Januari ada acara di Pemalang. Di daerah itu menteri akan meninjau fasilitas umum seperti jembatan dan irigasi yang rusak karena banjir tanggal 18 Desember lalu.

Persiapan penggenangan waduk yang cuma kurang empat hari itu, terus dilakukan. Terutama persiapan pengungsian penduduk yang diperkirakann akan membandel enggan pindah rumah sewaktu bendungan digenangi air. Persiapan lain diantaranya tim penjinak bahan peledak sudah pula siap-siap. Demikian penjelasann Kepala Biro Humas Setwilda Prop. Jateng Drs Suparman menjawab pertanyaan Suara Merdeka Senin kemarin di ruang kerjanya. (S6 / C26)

# Ketinggian Air Waduk Kedungombo Capai 56,59 Meter

BOYOLALI — Sejak dilakukan ri elevasi itu, untuk Kalnipaten bengsiaan air proyek waduk Kebungarombo oleh Menteri Pekerjanu unsum. Ir Radinal Moochtar betu 15 Januari laiu, elevasi gebetu 15 Januari laiu, elevasi gebangan waduk sampai Kamis keanrin sekitar pukul 04.0 WIB bendah mencapai 56,95 meter. Damis kemarin.

## Belum Semua Siswa PGAN Masuk

MAGELANG — Sampai hari Kamis (19-1) belum semua siswa sendidikan Guru Agama Negeri PGAN) Kodya Magelang kembake bangku sekolah. Tercatat selikinya 40 murid masih tidak assuk tanpa memberikan alasan ang jelas. Tub saru untuk siswa alas tiga. Kalau ditambah kelas pasti jumlahnya lebih banyak", ita beberapa guru yang tidak resedia disebutkan namanya.

rsedia disebutkan namanya,
Meski masih ada yang memboi, tapi jumlahnya semakin
ngedi dibanding sebari sebanya (Rabu 18'1), dimana sisnya (Rabu 18'1), dimana sisyang tidak masuk sekolah
ncapai 300 orang. Ada beberdugaan terhadap mereka
ni, karena tidak mendengarpengumuman bahwa libur
ya dua hari, mereka takut dikan dalam peristiwa itu.

kan dalam peristiwa itu.
mun sejauh ini PGAN, meit sumber itu, belum menean sanksi bagi mereka yang
masuk. Tapi nantinya pasi, karena lembaga pendidini ada peraturan tata tertibtandasnya. Para guru bahnenilai timbulnya aksi deasi tanggal 16 Januari
lalu yang merusak rumah
kepala sekolah berikut gePGAN, merupakan bukti
alan mereka dalam mendiwa.

Berjaga rtinya jerih payah kami ik mereka selama tiga ta-hapus dengan aksi unjuk napus cengan aksi unjuk aari", ungkap mereka. Se-i itu petugas keamanan ampak berjaga - Jaga di pendidikan itu siang am kemarin. "Penarikan dari lokasi itu menung-si benar-benar sudah a-ta seorang petugas.

BP3 PGAN Drs Zuhdi yang ditemui terpisah ii kantornya meng-n, pihaknya meren-ikan memberi ganti ru-a H Darussalam atas kan barang - barang adi. "Sedangkan untuk ilik pemerintah yang dirusak para siswa, ia u agar pemerintah gganti".

pula dengan sepeda Dulkodir, Koordinag ikut menjadi sasar-akan, BP3 akan berggantinya. Namun beri ganti rugi atau beri ganti rugi atau tung dari hasil rapat gtua / wali murid segera dilangsung-ira sangat manusia-igtua / walimurid erikan ganti rugi k barang milik pri-anak - anak kita nerusaknya", tam-

Boneka duhan bahwa dirisebagai "boneka" colah PGAN, Zuhdi engan tegas. "Tu-ta sekali tidak be-n kepala sekolah temang harus deHasilnya Juga bisa dilihat seperti gedung aula PGAN, penambahan ruang - ruang kelas dan
sebagainya. Ia juga membantah
jika H Darussalam selama menjabata sebagai kepala sekolah telah
melakukan korupsi, seperti
yang ditulis dalam poster-poster
ketika aksi unjuk rasa Senin lalu. "Pak Darus tidak mungkin
melakukan perbuatan itu, karena ia tidak memegang uang. Semua masalah keuangan ditangapada bagian lain dijelaskan.

Pada bagian lain dijelaskan.

ni oleh bendahara", ujarnya
Pada bagian lain dijelaskan,
mengenai besarnya uang program pengahaman lapangan (PPL)
Rp 35 ribu, bukan kepala sekolah
yang menentukkan, tapi hasil
musyawarah guru mata pelajaran sejenis (MGMPS) yang berlaku untuk semua PGAN se Jateng. "Bila di PGAN Salatiga hanya Rp 17-500 mungkin kekurangannya disubsidi sekolah atau
ada sponsor yang berani menanggung".

Dia jura membanala

nanggung".

Dia juga membenarkan informasi yang diperoleh siswa dari sebuah majalah terbitan Departemen Agama bahwa ujian PGAN tidak membayar. Namun yang menjadi masalah bantuan dari Departemen Agama tidak mencukupi, sehingga terpaksa dicarikan tambahan melalui orang tua murid. Dan ini dibenarkan karena ada klausul yang mengatur mengenai hal itu.

Untuk mencegah terulangnya

Untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa unjuk rasa, menurut Zuhdi Syarbini BP3 a-kan lebih aktif lagi mengadakan koordinasi dengan semua pihak, koordinasi dengan semua pihak, terutama yang bersangkutan de-ngan pencarian dana. (P.60/Pr)

Menurut sumber tersebut, kerasikide devasi (ketitaggian air nakara devasi (ketitaggian air nya berkinar antara 10 asmpai 35 meter Bampai akhir bulan Mare 1980 mendatang, ekwasi nencapai 95 meter sepuluh desa yang terkena proyek Waduk hampir dipastikan seudah terganang air Dijelaskan, untuk mengamaran pengamanan yang dipimpir oleh Komandan Kodim O'224 Boyolali, Letkol Drajat Budi Santosa kini terus bekerja keras menyelamatkan penduduk dan genanganir.

nerjunkan pawang unawang unawang unawang unawang selain itu sejak hari Sabtu lalu, tim pengamanan telah menancapkan bendera di lokasi yang tidak tergenang air. Lokasi ini memang disediakan bagi mereka yang "membandel", meninggalkan tempat tinggalnya. Jika air memasuki rumah diperkirakan para penduduk lari tunggang langgang. Dalam keadaan semacan tu mereka diminta untuk menuju ke lokasi yang terdapat kibaran bendera. "Pokoknya kami tidak meninggalkan cara - cara ti diga meninggalkan cara - cara mi tidak meninggalkan cara - ca ra manusiawi, sebab bagaimana pun juga mereka sendiri," katanya. mereka bangsa kita

Ganti Rugi

Sementara itu Panitera Kepala Pengadilan Negeri Boyolali Soe-narman, SH mengemukakan, da-ri 1.829 pemilik tanah, sampai

## Perkara Tabrakan Sedan Vs KA

## Drs BM Dituntut 1 Tahun Penjara

kan dengan KA (Kereta Api), di-tuntut hukuman 1 tahun penjara potong masa tahanan. Selain itu dibebani biaya sidang sebesar Rp 1.000, semua barang bukti di-kembalikan kepada pemiliknya. Demikian tuntutan Jaksa Slamet Abu Naim, SH dalam sidang lan-jutan di Pengadilan Negeri Ba-tang, Kamis 19 Januari 1989 la-lu. lu

Pada tuntutannya setebal 32 Pada tuntutannya setebal 32 halaman, jaksa berpendapat ada beberapa hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Antara lain terdakwa belum pernah dihukum, tidak mempersulit jalannya persidangan, tertib sopan dalam persidangan. Kecuali itu, terdakwa yang bertitel sarjana ekonomi tersahut tenganya sakonomi tersahut tenganya sa konomi tersebut tenaganya sangat dibutuhkan oleh perusahaan dimana ia bekerja.

Dalam perkara itu, Drs BM, pengemudi sedan putih B - 2137 -AR didakwa melakukan kealpa-Ak didakwa melakukan kesupa-an saat menjalankan mobilnya, hingga mengakibatkan tabra-kan dengan KA, di persimpang-an dukuh Matangan, Desa Kase-puhan Kecamatan Batang. Peris-

BATANG — Terdakwa Drs BM, mobil yang dikendarai terdakwa engemudi sedan yang bertabra-an dengan KA (Kereta Api), di-Mengakibatkan kendaraan ringmooli yang dikendarai terdakwa terlempar sejauh 10 meter. Mengakibatkan kendaraan ringsek, semua kaca sedan pecah, kerugian seluruhnya sekitar Rp 10 juta. Dalam peristiwa itu BM menderita luka di bagian kening dan dijahit. untuk menyembuhkan luka tersebut, terdakwa melanjutkan pengobatan ke Bandung dung.

dung.

Berdasarkan keterangan terdakwa dalam sidang, kata Jaksa, ketika peristiwa terjadi, Angelina Ardiana Kumara dan MM Susilowati Wijaya, sudah keluar dari mobil yang mogok akibat terperosok pada jalan berlobang di atas rel tersebut. Dari hasil visum dokter, kedua korban tewas mengalami patah tulang. Pada lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara), tidak terdapat tanda stop. Namun rambu - rambu bertuliskan "Awas Kereta Api Satu Sepur" masih terpasang.

Terhadap perkara itu, jaksa berpendapat terdakwa telah me-lakukan kealpaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 359 KUHP. Fakta yang dibuktikan jaksa menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi di iah, peristiwa

le letkel Drajat Budi Santosa kini terus bekerja keras menyelamatkan penduduk dari genangan air Beberapa penduduk tampaknya kini mulai menyadari dan bersiap-siap meningalkan tempat tinggalnya. "Namun demikian memang ada satu dua penduduk yang menyatakan baru akan pindah, Jika air mulai memasuki rumah," ujarnya.

Pawang Ular Selanjutnya sumber itu menambahkan, guna menyelematkan penduduk dari binatang buas tim pengamanan juga menerjunkan pawang ular sebanyak lima orang.

Selanjutnya sumber itu menerjukan penduduk dari binatang buas tim pengamanan juga menerjunkan pawang ular sebanyak lima orang.

Selanjutnya sumber itu menerjukan pawang ular sebanyak lima orang.

Selanjutnya sumber itu menerjukan pengamalan juga menerjunkan pawang ular sebanyak lima orang.

Selanjutnya sumber itu menerjukan pengamikan uang ganti rugi disan uang ganti rugi, dengan uang ganti rugi, maka dalam pengambilan tugi, maka dalam pengambilan rugi, maka dalam pengamban pangambilan rugi, maka dalam pengamban rugi, bangan uang ganti rugi, bangan uang ganti rugi, bangan uang ganti rugi, bangan uang gangan pengamban rugi, bangan uang



## Yosie Lucl

LADY Rocker Yosie Lucky sukses ketika pentas di GOR W dalam acara "Surya Kharisma F ri" dan "Cuap-cuap" mempera setempat. Penampilan penyann kota Magelang, yakni "Jet Voic Menurut pimpinan Selection E diselenggarakan bersama PT sempatan masyarakat Purwor-dang digandrungi kawala musik dang digandrungi kawula mud

## Banyak Izin

PURWOKERTO - Izin tra PURWOKERTO — Izin tra Angkutan Kota (Angkota) Purwokerto dan Purbalingg khir - akhir ini banyak yani perjualbelikan di bawah tan Jualbeli tersebut biasanya be dok jual beli kendaraan ang tersebut. Tetapi sebenarnya, ga izin trayek jauh lebih m dibandingkan dengan h



## Bantuan Pangan untuk Kabul

PIHAK militer Soviet mengata kan telah meningkatkan peng-iriman bantuan pangan melalui udara ke ibukota Afghanistan, uara se iotawa kigiminaan Kabel, untuk mengatasi keku-rangan pangan yang dikutakan isebahkan karena penimbunan yang dilakukan oleh para peda-yang dan ketidakensienan Peme-

resish Afghanistan Sorang jenderal Soviet di Ka-bri mengatakan, sampai seba-nyak 500 ton gandum tiba setiap arinya dengan 12 sampai 15 pe-sebangan dari beberapa kota Sovietyang terletak dekat perbatas-

Dizatakannya, terdapat cukup burak persediaan pangan di Ka-bul dan apabila ada kekurangan angan, maka hal tersebut dise-ankan oleh kurangnya peren-anan oleh pihak berwenang se-

(Bersambung Him XII kol 8 - 9)

SIAP PINDAH: Hingga kini 13 dukuh mulai digenangi air sejak Kedungombo diairi. Tampak beberapa penduduk di Desa Nglanji yang sudah mulai dikepung air, bersiap-siap pindah dengan membuat "gethek", untuk mengang-kut barang-barangnya menuju tempat pemukimannya yang baru. (Foto: Suara Merdeka Shj)

Sejak Pengisian Kedungombo

# 13 Dukuh Mulai Tergenang; Penduduk Membuat

atau delapan hari setelah dila-itukan pengisian air proyek Wa-duk Kedungombo oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir Radinal Moochtar, tiga belas Dukuh di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boxolali, mulai terrepanya air Boyolali, mulai tergenang air. Dari tiga belas Dukuh yang sudah berubah menjadi genangan itu, ketinggian air dari permukaan laut (elevasi) mencapai 59,10 me-ter. Demikian hasil pemantauan carran oleh kurangnya perencarran oleh pihak berwenang secarran dan banyaknya tukang
carran dan banyaknya tukang
carran dan banyaknya tukang
carran dan banyaknya tukang
Senin lalu jenderal itu membantah Soviet telah mulai lagi
bantah Soviet telah mulai lagi
Bersanbaran Hara VII. kela sa

Tiga belas Dukuh yang dinva-

SAMPAI hari Senin (23/1/1988) takan tergenang air tersebut takan tergenang air terseout diantaranya Dukuh, Platar, Dombang, Seberang Lor, Paing-an, Bulu, Nguter, Susukan, Batal Panjang, Sembiran, Sendang Nongko, Kedokan, semuanya masuk Desa Wonoharjo, Sedang-kan untuk dua Dukuh lainnya ya-tu. Cerran dan Samak Desa itu Cerme dan Semak Nglanji.

Ngianji.

Komandan Kodim 0724 Boyo-lali, Letkol Drajat Budi Santosa yang juga ketua tim pengamanan menjelasikan, dengan banyalnya dukuh yang mulai tergenang air, beberapa penduduk mulai ber-siap-siap meninggulkan kampung halamannya. Selain itu sebagian penduduk juga sudah mulai membuat gethek/rakit,

guna menghadapi genangan air yang suatu saat bisa menyentuh rumah mereka. "Yang harapkan mereka sudah meninggalkan tempat tinggalnya, se-belum terkepung genangan air,"

Dijelaskan lebih lanjut, wila-yah Kecamatan Kemusu sebeyan kecamatan Kemusu sebe-narnya Udak dinyatakan daerah tertutup. Hanya saja bagi siapa saja yang bermaksud mengun-jungi lebih diperketat, tidak seperti blasanya. Ini dimaksud untuk menghindari adanya pihak tertentu yang tidak menutup kemungkinan akan menge-mbia sasana Sian saja saja keminganan akan menge-ruhkan suasana. Siapa saja yang masuk di lokasi diberi tanda pengenal yakni warna merah un-tuk Satgas (Safuan Tugas), Kuning tamu termasuk wartawan dan Putih kalangan pejabat misalnya, anggota dewan, atau pejabat lainnya.

Tak Bergeming Dari hasil pengamatan menun-

# Arseto Tak Mau Kekalahan di Rontang Terulang Lagi

Suara Merdeka, 25 Januari 1989

#### Pemda Terbelenggu Birokrasi:

### Soal Waduk Kedung Ombo Masih Hadapi Kesulitan

MASALAH penyelesaian ganti rugi bagi masyarakat yang ter-kena proyek Waduk Kedung Om-bo diperkirakan masih akan me-

be diperkirakan masih akan menemui banyak kesulitan - kesulitan di masa yang akan datang. Sementara elevasi (Ketinggian air dari permukaan air laut) terus merambat naik.

"Penyelesaian ganti rugi pada masyarakat di proyek Waduk yang amat besar dan mempunyai nilai yang sangat strategis itu, kemungkinan sangat sulit ditangani. Oleh karenanya hal tersebut perlu mendapat perhatian kita bersama," kata Wakil Gubernur Drs Soeparto serius ditengah-tengah sambutannya pada Lokakarya Rancangan Naskah Repelita V Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kamis kemarin di Gedung Bappeda (Badan Perencanaan Pembarangan Naskah (Badan Perencanaan Pemba-ngunan Daerah) Tingkat I Ja-teng. Mengapa tetap menemui kesu-

Mengapa tetap menemui kesulitan lanjut Soeparto, karena memang dari sejak semula sudah
menemui adanya hambatan hambatan. Di samping itu adahambatan. Di samping itu adanyaorang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ikut mempersoalkan dan memanfaatkan
kesempatan dalam masalah tersebut. Dia melihat dalam masalah tersebut ada orang - orang
yang pandai menggarap mereka,
sehingga masyarakat yang terkena proyek terpengaruh terutama dalam hal ganti rugi.

Dalam lokakarya yang akan
berlangsung selama dua hari tersebut dan diikuti oleh Bupati /
Walikota, Ketua Bappeda, kepala
Dinas / instansi / lembaga se Jawa
Tengah itu selanjutnya dikemukakan, harga tanah di daerah
Waduk hanya sebesar Rp 100.

mukakan, harga tanah di daerah Waduk hanya sebesar Rp 100. Totapi ternyata setelah akan dibangun waduk harga itu melonjak dan sekarang mereka memperkirakan sebesar Rp 5.000. "Jadi apa yang telah terjadi sekarang ini merupakan kesulitan kita bersama." ujar Wakil Gubernur yang suka bicara ceplas ceplos ini.

nur yang suka bicara ceplas ce-plos ini.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, menurut Wagub yang juga Ketua DPD Golkar Tingkat I Jateng ini, kita juga mengalami kesulitan. Di satu pihak ada o-rang yang pandai menggarap masyarakat dan di pihak lain, ki-ta (maksudnya Pemda - red) ter-belenggu oleh birokrasi - biro-krasi yang kurang mendukung. krasi yang kurang mendukung

Di Bawah Target Di Bawah Target
Sementara itu dalam bagian
lain sambutannya pada lokakarya yang akan berlangsung dua
hari dan diikuti oleh pembantu
gubernur, bupati / walikota dan
ketua Bappeda se Jawa Tengah
serta dinas / lembaga dan instansi, Wagub mengatakan selama
Pelita IV, sektor perdagangan
dan transportasi pertumbuhannya masih di bawah target. Sektor perdagangan hanya mencapai 4,16 persen di bawah target
Pelita IV sebesar enam persen.

Juga sektor transportasi baru mencapai 7.20 person dari target sebesar 11.6 persen.

Pada sektor perdagangan dan transportasi masih diperlukan suntikan - suntikan di masa yang akan datang. Dalam dua sektor ini Wagub nampaknya kurang puas atas apa yang telah dicapai. Padahal sekarang kendaraan - kendaruan semakin bertambah banyak. Demikian pula para pedagang yang mempunyai kegiatan di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjuni jamu dan sebagainya, juga semakin banyak.

Dikemukakan, dampak dari kemajuan pembangunan tidak

Dikemukakan, dampak dari kemajuan pembangunan tidak selalu menunjukkan hasil yang positif. Artinya dalam pembangunan ada dua sisi, yaitu di satu pihak menunjukkan adanya peningkatan kesajahteraan tetapi di lain pihak muncul tuntutan tuntutan seperti kemudahan akemudahan dan kelancaran - kelancaran di segala bidang "Misalnya perdagangan lancar, tetapi juga malingnya juga lancar," guraunya

Dari pengalaman selam

pi juga malingnya juga lancar," guraunya

Dari pengalaman selama ini lanjutnya, ada hal - hal yang memerlukan penanganan yang semakin mantap dari tahun ke tahun. Sehingga dalam menyusun Repelita V daerah, harus benarbenar dilakukan dengan cermat dan harus menunjukkan perpaduan antara harapan - harapan, keinginan - keinginan - keinginan realitas yang kita hadapi. "Sasaran - sasaran nasional yang telah tercermin harus diterjemahkan sesuai dengan situasi, kondisi maupun permasalahan yang ada di daerah Artinya harus memperhatikan tiga syarat yaitu potensi daerahnya, aparatur pemerintahnya dan mempercieh dukungan / partisipasi dari masyarakat. Ada potensi dan kemauan dari aparat, tetapi tidak mendapat dukungan ya. Jangan dilanjutkan," katanya. (C.14)

#### Gangguan Kecil Pesawat Garuda

PESAWAT Garuda dengan nomor penerbangan GA 410 tujuan Jakarta-Semarang Kamis kemarin mengalami gangguan kecil pada bagian mesinnya. Pesawat yang berangkat pukul 06.20 dari Jakarta itu setelah mengudara selama sekitar 15 menit, mendadak dibelokkan kembali ke arah Jakarta. Pada bagian mesin sebelah kanan tiba-tiba mengeluarkan bunyi keras. Namun sebagian penumpang

Namun sebagian perampang yang menjadi panik, bisa di-tenangkan oleh crew pesawat ter-sebut. Pesawat itu kemudian ber-hasil mendarat kembali dengan mulus. Memurut Suyatno Pedro, Kétna PKBI Jateng yang naik pe-sawat tersebut, para penumpang kemudian dialihkan ke pesawat berikutnya yang berangkat pukul 08.20. (\*).

Suara Merdeka, 3 Maret 1989



Editor, 25 Maret 1989



Editor, 25 Maret 1989

pembangunan Juga pembangunan PLTA Saguling di Jawa Ba-rat. Pada tahun 1982, lebih dari 3.000 KK yang mendiami lokasi waduk ci Cililin, Kabupaten Bandung itu pindah. Ada ribut-ribut, ta-pi tak seramai Kedungomo, meskipun sampai sekarang enam warga Cililin masih dalam proses menggugat Pemda Jawa Barat di pengadilan, karena menganggap uang ganti rugi yang diber ikan terlalu kecil.

Tak heran orang jika ada pertanyaan, seperti dikemukakan Menteri Rudini sendiri, kenapa kejadian-nya lain di Kedungombo. Dan mengapa pula dalam kasus ini, penduduk yang masih bertahan itu cuma di Kabupaten Boyolali, sementara di dua kabupaten lainnya, Grobogan dan Sragen, sudah beres.

Dari kaca matanya sebagai seorang ABRI, Rudini melihat Boyolalı dulu sebagai daerah basis PKI. Tapi benarkah daerah bekas PKI akan alot? Belum tentu. Wilayah Blitar Selatan dulu bahkan tempat yang dipilih oleh sisa-sisa PKI buat men-

coba bergerilya, tapi kini justru merupakan daerah yang patuh membangun.

Lagi pula, di kabupaten Boyolali ini sebenarnya daerah yang terkena proyek terdiri dari dua kecamatan: Andong dan Kemusu. Ternyata, desa yang bertahan semua terletak di Kecamatan Kemusu. Daerah ini memang paling belakang diserbir air. Tempatnya rada tinggi.

Boleh jadi, penduduk tak yakin tanahnya akan bisa dicapai air. Selain itu, pendekat an yang dilakukan panitia ganti rugi terhadap penduduk, bila diamati, memang kurang lancar. Setidaknya kalau laporan pen-duduk benar: "Petugas memaksa penduduk memberi cap jempol menerima ganti rugi dan tras smigrasi Jika tak mau, dibenbahka: oipukuli," kata Yatmo Suda-No, 52 tahun, penduduk Nglanji.

Cara ini kurang sukses. Maka, dipakailah cara lain. Camat memanggil. Bila penduduk tak datang, ia diancam dengan pasal 224 KUHP. Begitulah tertulis dalam surat panggilan Camat, meskipun sebenarnya Pasal itu dikenakan untuk saksi yang tak mematuhi panggilan pengadilan.

Keadaan bertan bah tegang setelah beberapa penduduk ditangkap dengan tuduhmencuri kayu Perhutani. Entah karena kebetulan, semua yang ditangkap adalah orang-orang yang menolak ganti rugi. Lalu belakangan KTP belasan penduduk diberi lode EL tanda buat beka PKI

Lindiatami, setidaknya, oteh Cipto Siming 60 tahun, penduduk Ngrakum yang diemui Tempo. Setelah ia menolah mem-



beri cap jempol ganti rugi itu, tiba-tiba KTP-nya yang diberikan kepala desa, 1 Januari 1986, pakai kode ET. "Padahal, sebelumnya KTP says tak pakai ET," katanya sembari memperlihatkan dua

KTP-nya yang lama, yang tanpa ET. . Bupati Boyolali Moh. Harbi membantah. Ia mengatakan bahwa kode ET itu bukan karangan belaka. "Itu data yang kami peroleh dari Laksusda ketika itu," kata bekas Komandan Kodim Yogya yang terkenal berhasil menumpas goll itu

Bagaimanapun nampak ada yang ku-rang lantar di sana. LBH Yegyakarta pernah meneliti mengapa pendus ak meno-lak bertrans,nigrasi. Jawahnya: sepapan besar sudah berusia lanjun Alasan lain, ada keyakinan dunuk

bahwa di pergantian abedi ini akan ada bader mangan nunggir (kan bilasa mangan kembang kelapa). Berarti korra kembang segera akan tiba.

Apa pun alasan dan idaman mere yang pasti mereka menghadapi kes alitar. Apalagi setelah wilayah iro ditump Halan masuk ke sana harus melintasi emi penjagaan polisi dan tentara. Penjagi 👸 🔯 juga dilengkapi pawang ular dari "Contempo", grup sirkus dari Semarang, sojumlah perahu karet, sejumlah truk, tak ketinggalan obat-obatan dan bahan makanan. Ada juga dokter puskesmas. Untuk menolong penduduk juga, nanti.

# Mereka Mencoba Tidal Menyerah

Orang-orang itu mencoba tak dirugikan. Lalu mereka bert

yang melunak dan bersedia menerima ganti rugi. Datanglat.

Perscalan pun kembali suht disepakati.



SAMPAN kecil itu 1 iga nyusup di tengah perumbul daun-daun kelapa, yang mulai menguning Si tukang perahu terus mendayung, mendekat ke dermaya, langan di-

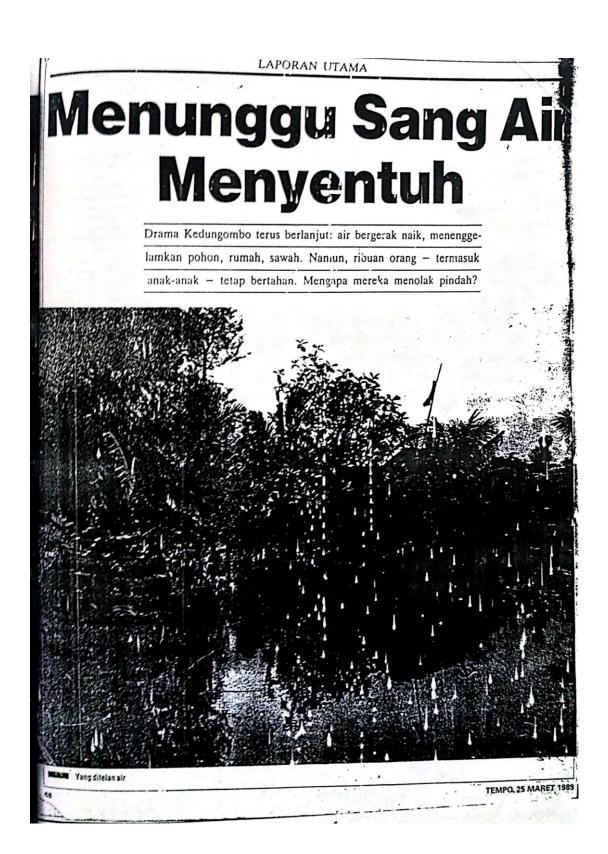
bayangkan dermaga itu sebu h pelabuhan tempat kapal-kapal besar berlapuh. Itu cuma berupa tanggul bekas fordasi ba-ngunan, 'Ini duli tanggul romat ketabat saya,' ular laki-laki 50 tahu i itu sembari membantu menu. nkan barang Lejanjaan

Seorang penumpung.

Paiman, tukang perahu itu, wa ga Du-kuh Ngrapah, Desa Nglanji. Kesamapel Kemusu, memang tak terlalu asing bengan

air. Suddingerang yang lebah ya 25 meter yang mengalir di punggo dosa adalah tempa nya Arman di grapa (basa dana). Di siri dia mphi mpogenai rakit, sampuni dan telajai terpologi Tapa, "Saya tak pernah membayangkan akan menjadi te-

TEMPO IN MARKET 1949



Tempo, 25 Maret 1989

6:

#### Lanjutan:



HARI baru terang tanah. Cuaca dingin menggigit kulit. Mardi memanjat sebatang pohon kelapa di tepi desa. Lelaki berusia 27 tahun itu tersentak ketika melihat

di kejauhan air sudah menggenangi beberapa tempat yang agak rendah.

apa tempat yang agak rendah.
Bergegas ia turun, lalu berlari ke sebuah pos keamanan. Tung ... tung ... tung.
Sebuah kentongan yang ada di sana dipukulnya bertalu-talu. Itulah pertanda bahaya sedang mendatangi. "Air datang ..." pekiknya.

Bunyi kentongan itu segera membangunkan penduduk. Tak tampak ada kekagetan atau kecemasan. Mereka tampaknya sudah siap. Laki-laki, perempuan, langsung sibuk menehangi pahan pisang, membang takit

menebangi pohon pisang, membuat rakit.
Di subuh 8 Maret 1989 itu, air mulai
menyentuh Ngrakum, sebuah dukuh yang
terletak di Desa Ngrakum, Kecamatan
Kemusu, Kabupaten
Boyolali, Jawa Te-

Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Mula-mula lidah air menjilat rumah Suriyem, yang berlokasi di tempat yang paling rendah. Semakin siang, perlahan-lahan permukaan air semakin naik. Hari itu saja, setidaknya 9 rumah sudah tergenang air.

Dengan sigap, penduduk beramai-ramai membongkar rumah-rumah itu. Genting, papan, kayu-kayu bekas tiang rumah, mereka tumpuk di tepi ja'an di tempat yang agak tinggi, agar tak dihanyutkan air.

agak tinggi, agar tak dihanyutkan air.
Lalu, penduduk yang rumahnva terendam air pindah ke rumah-rumah tetangganya yang belum terjamah air. Hingga dua pekan lalu, sekitar 70 kepala keluarga (KK), dengan 120-an anak-anak, masih ngotot tak mau meninggalkan kampung halaman mereka. Dulunya penduduk du-

kuh ini ada 137 KK.

Air Waduk Kedungombo memang terus merambat naik. Pada 8 Maret yang lalu ketinggian permukaan air berada pada sudut elevasi 79,5, dan menggenangi 9 rumah. Sembilan hari kemudian, Jumat pekan lalu, air sudah merendam 35 rumah. Sudut elevasinya sudah di atas 80. Sampai hari itu, masih ada 102 rumah di dukuh ini yang selamat dari pagutan air.

yang selamat dari pagutan air. Di Kedung Cemplang, dukuh tetangga Ngrakum, tampaknya air sudah lebih tinggi



■ Dialog mahasiswa di Kedungonibo



Dan air pun semakin meninggi

TEMPO, 25 MARFT 1989





Selamat linggal, para leluhur

lagi. Di beberapa tempat air bukan cuma mengge-nangi rumah-rumah, tapi tinggi permukaannya sudah mencapai ping-

sudah mencapai pinggang orang dewasa.
Penduduk kelihatan mengungsikan bermacam perabot rumah tangganya. Lemari, meja, tempat tidur, juga genting dan papan bekas rumah yang mereka bongkar. Ada yang membawa barang-barang itu dengan menggunakan rakit batang pisang, ada pula yang dengan

main panggul saja, bergotong-royong. Sampai di tempat yang tinggi, dengan bergotong-royong pula, mereka kembali mendirikan rumah dengan bahan-bahan

bekas bongkaran tadi.
"Cara ini tidak efektif. Bapak-bapak
mendirikan rumah di sini, padahal pada
waktunya tempat ini juga akan tenggelam,"
kata Letkol. (Pol.) Dai Bachtiar, Kapolres Boyolali, sembari menggeleng-gelengkan kepala melihat perbuatan penduduk itu. Tapi apa mau dikata. Beginilah peman-dangan sehari-hari di berbagai desa di

Kecamatan Kemusu, Kabupat in Boyolah sejak Menteri Pekerjaan Unium Radima Mochtar meresmikan Waduk Kedungon, bo, 14 Januari yang lalu. Sejak itulah pintu waduk ditutup. Laha air Sungai Serang serta beberapa anak sungai di sekitarnya segera terbendung dan paik perjah palahan 20 semeni Son seria

naik perlahan-lahan, 20 sampai 50 cm setiap hari.

Sesuai dengan rencana, kawasan ini nanti akan menjadi sebuah danau buatan yang mampu menyimpan 723 juta m<sup>3</sup> air. Oleh karena itulah sejak 1983, 6.000 ha Jebih



tanah di lokasi calon danau buatan itu meliputi 37 desa di tiga kabupaten: Boyolali, Grobogan,

dan Sragen, mulai dibebaskan.

Tentu tak ada kesulitan membebaskan 304 ha tanah negara dan 1.500 hutan milik Perhutani. Persoalan menjadi rumit ketika Pemda Jawa Tengah harus meng-gusur 4.363 ha perkampungan yang dihuni lebih dari 5.000 kepala keluarga.

Sebagian di antara mereka menolak pindah. Mereka memilih bertahan. Sampai saat peresmian waduk, kawasan yang akan digenangi air itu masih didiami 1.916 KK atau 8.844 jiwa - termasuk anak-anak dan orang jompo. Mereka yang bertahan adalah pen-duduk enam desa di Kecamatan Kemusu: Kemusu, Ngrakum, Nglanji, Klewot, Blawu, dan Ge-

nengsari. Memang ada yang kemudian menyerah setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana air sampai di bubungan rumahnya, Menurut pendataan terakhir yang dilakukan Pemda Jawa Tengah, 10 Maret yang lalu, jumlah yang masih bertahan tinggal 1.684 KK.

Tapi tak seluruh jumlah sekitar 7.500 jiwa itu terdiri dari orang yang menolak ganti rugi. Sebab. yang menolak ganti rugi. Sebab, menurut catatan Pengadilan Ne-

geri Boyolali – tempat uang anti rugi dititipkan – jumlah yang belum menerima ganti rugi tak sampai 1.500 KK.

Dengan kata lain, banyak yang sudah menerima uang tapi tetap ber-

tahan. Alasannya beragam. Ada yang solider pada teman-teman. Ada yang masih ingin memetik tanamannya sebelum di-

tenggelamkan air waduk. Ada pula alasan lain.

Misalnya, di sebuah rumah kosong di Desa Ngrakum, dua pekan lalu, beberapa lelaki malah sedang sibuk berjudi kartu. Seorang per-empuan muda merebus. singkong dan membuat kopi untuk mereka "Uang ganti ruginya ratusan ribu rupiah, jadi mereka main untuk membu-nuh waktu," kata kata seorang peniuda di rumah itu kepada TEMPO.

Di tempat lain, di desa itu, menjelang tengah hari Jumat



Anak Desa Ngrakum

pekan lalu, suara loudspeaker mengalun, menyerukan puji-pujian kepada Tuhan da-ri sebuah langgar kecil 6×8 meter, yang berhampiran dengan kuburan desa yang sudah terendam air. "Sedarg ada upacara nyadran, kata seorang penduduk. Rupanya, sekalipun kampung suduh nyaris tenggelam, penduduk mesih ingin membersih kan kuburan, menjelang Ranadan, da Selintas, kehidupan sehari-hari tampak

di diga kabupaté pintu waduk di I bo, Kecamatan luman air sudal meter lebih. eter lebih. 732 Memang 37 de-

gelam total Desa salnya, sampai ( rtergenang set berada di Lerouk ini memang bero karang men dan diceraikanio. selat-buatan, P yang didiami' per

Hubungan anarphal kan dengan rakif ta sha Cukup mendebarkan So beberapa tempa kedala sampai lima meter Dis bambu, akasia, mahoni, yang telah ditelah air menguning, layu, rontpk Dalam keadaan yang tak bayangi kelaparan itu pend

kut verjalan sejauh

itu untuk berseko-lah," kata gadis kecil signal kelastidus

a Tapi tak janyak

dia 'Lim

ARE

toh punya kesulitan besar cari air minum Di kawasan berbuki itu, sumber air munum selama ini mata air. Coba lihat Duruh Mba Desa Ngrakum: Sebuah mata ditelan air waduk, sedang sisany lagi, yang masih berfungsi; tingga

lagi dari jilatan air yang ker itu. Dalam situssi itu, Wassi Dalan situasi iru, Wasani a setiaf hari berjalan kasi memma biruse sala



**TEMPO, 25 MARET 1989** 

orangtua mereka yang tetap bertahani Mereka terserak di pulau-pulau, di enam desa (Ngrakum, Nglanji, Wanoharjo, Kles wor, Bawu, dan Kemusu); yang seluruh-nya masuk wilayah Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolai. Cuma di sinilah tinggal penduduk Kedungombo yang bertahan

Semua ini rupanya merisaukan hati Y.B., Mangunwijaya, 60 tahun, pastor dari Keuskupan Agung Semarang yang juga arsitek, novelis, dan penulis risalah di surat kabar itu. Ia amat khawatir pada nasib ribuan anak-anak yang sebenarnya tak tahu-menahu urusan orangtua mereka

Bukan saja sekolah mereka kocar-kacir. Bukan saja sekolan mereka kocar-kacii.
"Makan pun seadanya, sehingga mungkinmereka terserang penyakit cacing ataudisentri," kata tokoh yang biasa dipanggil Romo Mangun itu.

Maka, setelah berembuk dengan sejumlah tokoh lainnya seperti Kiai Hamam

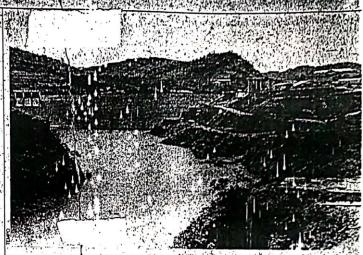


Hamam Dja'far

pimpinan Pesantren Pabelan; Prof. Slamet Rahardjo, Ketua Angkatan 45 Jawa Tengah; Soewarno, Ketua PMI Semarang; dan sejumlah tokoh lainnya yang bertindak atas nama pribadi, terben-tuklah Panitia Darmakarya Bagi Anak-Anak Kedungombo, yang disingkat jadi PDK-AKO.

Panitia ini bermaksud membantu anakanak Kedungombo "Kami akan mendo-ngeng, mengajak mereka menyanyi, menangeng, mengajak mereka menyanyi, menan, dan main kasti, agar anak-anak itu
gembira! Tak sepatutnya anak-anak menderita," kata pastor penulis novel Burung,
Burung Wanyar itu. Ia menegaskan bahwa,
kegit an ini sama sekali terlepas dari soal
ganti rugi atau soal gawat lain, termasuk
perkara orang-orang eks PKI yang dikatakan ada di Kedungombo.
Segera bantuan run herdatangan dari

Segera, bantuan pun berdatangan dari mana-mana. Sejumlah sukarélawan men-daftarkan diri siap membantu. Kalangan pemerintah mula-mula bersuara positif. Malah Menteri Dalam Negeri Rudini, ketika menjawah pertanyaan wartawan di Kla-



Waduk Sarjuling tak seramal Kedungombo

ten awal Maret yang lalu, mendukung rencana aksi sostal Romo Mangun itu.

Rudini mengalku belum tahu persis ren-Rudini mengaku belum tanu persis ren-cana Mangunwijaya di Kedungombo, tapi ia berkata, "Sejauh niatnya membantu anak-anak yang telantar, kurang mampu, itu bagus, dan saya dukung ...."

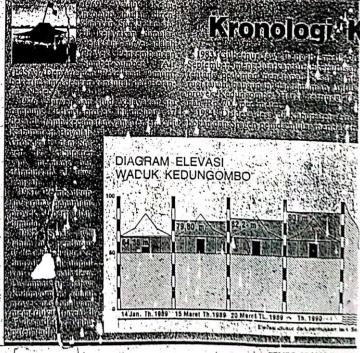
Tapi kemudian niat itu terkendala. Ini terjadi setelah Romo Mangun, didampingi

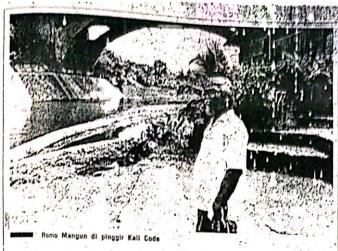
Prof. Slamet Rahardjo dan Soewarno, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah,

Jumat pekan lalu; Gubernur Ismail, tak setuju pada aksi sosial yang direncanakan Romo Mangun. Ia tak keberatan bila Romo Mangun ingin membantu anak-anak itu tapi seluruh sumbangan harus disalur-

kan melalui pemda (lihat wawancara dengan Gubernur Ismail).

Bagi Mangunwijaya, itu berar ("! Gubernur belum percaya bahwa tujuan panitia ini murni kemanusiaan." Keprihatinan yang sama menimpa Prof. Slamet Rahar-





djo, yang juga guru besar di Universitas Diponegoro, Semarang, "Kami bermak-sud biik, sesuai dengan anjuran pemerin-tah agar berpartisipasi dan peka terhadap masalah sosial, kok malah dicurigai?" katanya

Yang menarik ialah yang terjadi dengan Kiai Hamam Dja'tar. Ia urung menyertai rombongan ketika Mangunwijaya mengha-dap gubernur. Kenapa? Menurut Romo Mangun, kiai itu telah "diultimatum" Ko-

mandan Kodim Magelang, "Pilihlali, aetia pada negara intau kepada Mangunwijaya," begitu Mangunwijaya menirukan ucapan Komandan Kodim kepada pimpinan Pesantren Pabelan yang terkenal itu.
Tapi Komandan Kodim Magelang, Letkol. Sadim Putut, membantah cerita Mangunwijaya. "Kami hanya memberi wawasan kepada Kiai Hamam dalam kaitan dengan apa yang terjadi di Kedunjombo. Misalnya, kami katakan, mbok mikir, ka-

epa Pak (indepontyrak) plinsklik negata Kedungombo Jah, kardita larang siapaspon, katayyara SP , kijai Alamont Datar, sendiri in anday menerinat ajakan, Pombam sinday in charintat a jakan. Pomi Menjuni, untuk ni mbantu anak anak di Kadungoria bo. Menyantuni Yojaby yang lemah lan teranjaya adjah pangalangamik akana, kata pemimpin pesanten yang memenangkan penghaigaan The Asha Khail Award untuk assitéktur. 1980.
Sampai sekarang sikapnya untuk membela anak anak Kedungombo juga tak bergeser. Tapi ja sendir menganggap tindak ne Gubernur Ismai mekarang mese-

tindak in Gubernur Ismail melarang mereka ke Kedungombo harus ditaati (Selain karena ia ingin menjadi seorang warga negara yang baik, katanya, ia juga punya pegangan tersendiri. "Taatilah Allah dan rasulnya, serta pimpinan yang sudah kau pilih," kata kiai itu mengutip Quran Orang memang bisa bersik: p'untuk ti-



Mangun, kini itu telah "diulumatum" Ko
Misalnya, kami katakan, mbok mikis, ka
Kepudan dibemah langdan dawa "epah

Jengah dawa mangan kepah dawa mangan m

dak membangkang, bila dilihat sebuah pertimbangan lain: besarnya manfaat waduk ini untuk kawasan sekitar. Dari peng-amatan nampak jelas, daerah itu memang

duk ini untuk kawasan sekitar. Dari pengamatan nampak jelas, daerah itu memang miskin. Tanahnya kuning dari, berkapuri Tanpa sarana perairan teknis, produksi padi rendah, cuma sekitar 4 on perhektar. Pendud ik umumnya hanya punya tanama karas kelapa.

Tanaman keras yang lain, mahoni, akasia, jati, dan sonokeling, menuujukkan betapa tanah di situ memang tak subur. Sebagian boleh dikategorikan sebagai lahan kritis. Nah, waduk jinilah yang memang akan mengubah wajah kering melarat kawasan itu. Dan sepetti dikatakan Men eri Rudini kepada Tambor, Jusaha untuk melmakmurkan rakyat ini, betapapun membutuhkan pengorbanan.

Pengorbanan, dengan pindah tempat sebenarnya biasa dalam, seriap peribangunin bendungan. Ketika dibangunawa, duk. Gajahmungkur di. Wonogiri, Jawa Tengah, sekitar 45,000 jiwa dipindahkan dengan bedor desa ke proyek transmigrasi. Sitiung, Sumatera Harat.

Waku itu, 1978, tal alia problem Padahah, ganti rugi, kata sumber, pemeintah daerah setembat cum Ren 28 tanimeter.

Warti liu, 1776, tal ajia pipolojii casa-hal, gante riigi, kata sumber pemecintah daerah setempal, cumz Rp 28 tian metur. Kecil bila dibanding harga pasatan tanah setempat yang Rp 5007

TEMPO, 25 MARET 1989





KSKPKO itu macet di tengah jalan, lantaran Gubernur Jawa Tengah Ismail tak mengizinkan bantuan masuk. Pada-"Kami menunggu kedatangan Romo Ma-

ngun," kata Jaswadi pula. Apa boleh buat, anggota KSKPKO terpaksa masuk ke Kemusu secara diam-diam. Mereka terutama mengirim obat-obatan. "Permintaan yang paling banyak adalah salep kulit," tutur scorang anggota KSKPKO.

Keprihatinan Jaswadi adalah keprihatinan Cipto Simin pula. Laki-laki 52 tahun dari Dukuh Ngrakum, Kecamatan Kemusu ini telah kehilangan gantungan hidupnya, berupa sawah ¼ ha, tegal ¼ ha, dan tanah pekarangan seluas 800 m<sup>2</sup>. Cipto mengaku tak sempat mengungsikan rumahnya. "Air naik terlalu cepat," tutur Cipto, kesal. Cipto hanyalah satu dari sejumlah warga

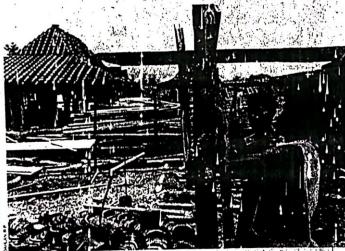
Ngrakum yang bertekad menampik ganti rugi. "Uang ganti rugi tidak cukup untuk membeli sawah atau tegal," katanya. Setiap setengah bahu (1/3 ha) sawah Cipto, hanya mendapat ganti rugi Rp 1,1 juta. Sementara itu, untuk memperoleh sawah dengan luas yang sama, di daerah pinggiran waduk, paling tidak diperlukan

Bapak lima anak ini sangat menyesalkan cara pemerintah melakukan pembebasan tanah. "Kami tidak pernah diajak mu-syawarah," ujarnya. Kalaupun ada pertemuan di Balai Desa, Kar er Kecamatan, atau Koramil, "Bapak-bapak itu hanya membujuk-bujuk atau menakut-nakuti as gar kami bersedia mene ima ganti rugi, tambahnya.

Harga tanah, kata Cipto, ditetapkan epihak. Menurut mereka yang bertahan ini, karena pemerintah yang mau membeli, mestinya "ya rakyatlah yang menentukan harganya."

Bagai jatuh tertimpa tangga, sementara

100 meter lan rumainya sebagai tempat pengungsian Badi sen in menyentuh Bani digi dari pemerintah, yang dianggap tak sebanding dengan nilai tanah yang sebenarnya. "Pemerintah hanya menentukah penthirugi secara global, tanaman tahaman or atasnya sama sekali tidak diperhitungkan, ujar-nya kesal. Maka, meski air waduk tinggal sepuluh langkah dari rumahnya, Badi behum juga menyingkir.



Membangun kembali di "Nglanji Baru"

peristiwa seperti di Kedungombo?

Sebenarnya masyarakat di sana lugu, mau mengikuti ajakan Pemerintah kalau tak ada oknum dari luar mempengaruhi mereka Kami tidak repot dan tidak ada nbui nbut. Yang membuat ribut itu kan malaikat pen elamat itu tadi. Sk MKajanya ada anak-anak sekolah telantar, sopo ngomong? Nggak ada. Katanya ada Orang yang dipukuli, omong kosong. Ada yang bilang ABRI memaksa terima ganti Nigi padahal nggak ada apa apa

Bagalmana pemotongan uang ganti rugi? Alupotongan resmi, misalnya untuk PPN atau PPH.

Kabarnya, ada penduduk yang sudah di-transmigrasikan tapi kembali ke Kedungombo karena kecewa?

Kami tak menutup mata. Begitu banyak orang yang ditransmigrasikan, tentu ada yang kecewa, tapi jumlahnya kecil. Itu pun kami pakai untuk mengoyeksi kelemahan. kami

Sampal kapan penduduk yang bertahan itu diperbolehkan tinggal?

Nanti pada elevasi 90, kami harapkan mereka sudah di atas sabu': hijan. Mereka tidak akan kami paksa, biar mereka merekayasa diri sendiri. Memang hasil ini kulang baik bila ada orang yang mengagitasi mereka.

Kita semua harus waspada. Jawa Tengah ini kan ibarat petasan sumbu pendek. Tidak menyala, tahu-tahu meledak.

keamanan dapur terancam, sejak 3 tahun lalu, KTP Cipto dibubuhi tanda ET. "Padahal, dua KTP saya sebelumnya bersih dari coretan seperti itu," tuturnya, sembari memperlihatkan dua lembar KTP lama. Dia mengaku tak pernah berurusan dengan PKI. "Saya ini weng bodo kepla-keplo, kok dituduh PKI," sambungnya. Isu PKI di desanya banı mencuat setelah penggusuran penduduk macet gara-gara

kesepakatan ganti rugi tak tercapai. Kini Cipto sekeluarga nebeng di rumah adiknya, masih di Dukuh Ngrakum. Dia mengaku tak mengantungi duit sepeser pun, sementara gabah dan singkong liasil panenannya menipis sudah. Di saat sulit ini, pekan lalu, dua anaknya terserang mencret. Dia merasa tak punya biaya untuk membawanya ke dokter, dan tak tahu bahwa di Posko Keamanan Kemusu tersedia tenaga medis.

"Saya puasu ngrowot (tidak makan nasi) tiga hari, untuk kesembuhan anak saya,

katanya.

Terpisah oleh genangan air sekitar 400 meter dari rumah Cipto, Subadi juga tengah masygul dengan gerukan air waduk yang kian meninggi itu. Ketua RT 1 Dukuh, Mbanger ini telah pula bersiaga. Dindiags dinding kamar, dalam rumah kayunya, telah dia bongkar, papan-papan kayu dia juga agar sewaktu waktu gampang diikat, agar sewaktu-waktu gampang di-ungsikan. Badi, 34 tahun, telah menyiapkan sepetak kapling di lereng bukit, sekitar

Bagi Badi, ganti rugi Rp 805 untuk setiap m² pekarangannya terlalu rendah. "Sebab, di situ ada 13 pohon kelapa," tuturnya, Menurut pengalamar nya, sebatang pohon kelapa yang berumur 7-15 tahun bisa menghasilkan Rp 12,000 setahun, kata Badi sambil menunjuk ke pohon kelapanya yang tumbuh doyong yang kini

mulai terendam air. Subadi telah bulat tekadnya merelakan 0,7 ha tegal dan sebahu sawahnyay yang kini belum tersentuh air – menjadi penghuni dasar waduk hantinya Pilihan itu ja jatuhkan ketimbang harus menerima harga yang dianggapnya kurang pantas, Biarlah saya tak punya sawah dan tegalan, tapi sebagai gantinya saya punya segoro (laut), ujar Badi

Lelaki yang hanya punya ijazah SD ini sudah punya rencana, Bila nanti sawah dan tegal nya tenggelam, dia akan menjual sapinya untuk menyamoung hidup, sambil memburuh di sawah orang, d iuar kompleks waduk. Tidak khawatir digusur paksa? "Lha, masak pemerintah nau ingkar dari dasar negara Pancasila," jawabnya Sementara itu, di Dukuh Rejosari, Desa

Klayen, Kecamatan Juwangi, Boyolali, tempat penampungan untuk bekas penghuni Kemusu — Sopawiro Karsan 60 tahun, tampak bersemangat mengayun an cangkul & kebunnya, li belakang rumah. "Mumpung hujan masih turunt saya m menanam padi," kata penghuni Kaj

yang baru satu bulan itu. Dulunya, laki-laki buta huruf itu tinggal di Dukuh Ngrakum. Karsan mengaku

mulai menyukai Rejosari yang berbukit-bukit itu. "Di sini airnya mudah, gali ta-nah 5 meter airnya nah 5 meter airnya sodah muncrat," tuturnya. Ketika tingdi gal di Ngrakum, Karsan harus berjalan sejauh 500 meter ke tepi Kali Serang, untuk bisa ketemu "Mandi, dan buang hajat, ya di kali itu," ceritanya. Tanah jatah se-luas 1.000 m<sup>2</sup> diterimany: dengan la-pang. Pokoknya, di



menanam

Keikhlasan Karsan pindah desa karena, "Saya berutang budi pa-da pemerintah." Seo-rang anaknya mendapat

npatan kuliah program diploma kesempatan kuliah program diploma di IKIP Negen Semarang, sedangkan seorang lainnya bisa sekolah di SMP Negeri. "Bayarannya murah," tutur Karsan. "Saya tidak ingin menjadi orang yang tak tahu lerima kasih," katanya lagi. Ganti rugi pun dia ambil. "Tidak dipotong sedikit pun," njar Karsan, yang kini menjabat ketua RT di Rejusar. d Rejosari

Di depan rumah Karsan, adalah sebuah rumah yang tampak paling bersih di selu-ruh Rejosan. Rumah itu punya jendela mako yang menghadap ke jalan. Halaman nya ditumbuhi tanaman tumpang

sari. Ada kacang merah, kedelai, terung, jagung, dan gambas. "Ini hanya coba-coba, kok. Ternyata tananun itu tumbuh bagus," ujar Saadi, si pemilik rumah.

Leight 40 tahun ini hijrah ke Kayen 3 bulan lala. Dia orang pertama yang menghu u Rejosa-Sama hatoya dengan Karsan, Saadi bermal die Deu Ngrakum Seyang, orang Ngra-kom pada tidak mau da-tang metihai ke uni, dan tetap menyangka Kayen tak subjut

tak subur " ujarbya. Somi intun yang banya I (6), mi isa dirinaukan Sands yang guru SD ani Apalagi tugannya acha-gui guru diyamin kelangtampanay a Schulat lamanya. SD Ngrasam,

New Charles お子世の歌句は古典

Perintah meminggalkan calon vraduk

dirobohkan beberapa bulan lalu. Ia lalu dipindahkan ke SD Wonc ejo, tak jauh dari Rejosari. Istrinya kini membuka warung kelontong dan tampak laris.

Bila Saadi tampak bersyukur, itu juga Bila Saadi tampak bersyiikur, itu juga karena ia bisa m-inkmati pe bagai fasilitas' yang tak ada di Ngrakum atau Nglanji. Di tempat barunya ada puskesmas, pasar, balai desa, dan masjid ang megah. Dan hingga pekan ini Pak Guru ini masih mendapatkan jatah bantuan berupa ikan asin, minyak goreng, supermi, gula pasir, kecap, benih palawija. Juga, seekor babon dan jago.

Tapi lain Saadi lain pula Yatmo Suda-ryo. Bapak berusia 52 tahun itu mengangsemua inting-iming itu bak angin, Tokoh informal dari Dukuh Kedun, pring, Kelurahan Nglanji, Kemusu ini bersama 35 KK yang lain membangun permukiman "Kedungpring Baru" Ji lereng bukit gersang millk Perhiptent Desirys yang lama tudah menghalang di-telan air. 5

Yatmo, bernut te-tap be tahan, Keeusli pemerintah memberikan danah pengganti yeng sama luasnya. Sikapnya ini selalu dia kemukakan di berbagai forum pertemuan. A kibatnya, Yatmo sering dipanggil ke Ko-ramil, P-isek, Kan-tor Kecamatan, Ko-dim, Polites, dan Ka-

dim, Possen, bupaten. Tapi Yatmo tak goyah "Hidup di reman mendeka. kok, seperti di zaman Jepang; brang.dipak-

miliknya tropa' memperoleh penggantian yang layak," ujarnya.

ing layak," ujarnya. Sementara itu, dalam upaya menaklukkan keteguahn sikap Yatmo dan kawan-kawannya, setugas sering mengadalkan pendekatan dari rumah ke rumah, di ma-lam bari. Ini ternyata menimbulkan salah paham. Penduduk ketakutan, memilih tidur di togalan untuk menghindarkan tekanan petugas.

kanan petugas.
Ketika itulah Yatmo meminta bantuan hukum te LBH Yogya. Tak ada hasilnya.
Lalu dicabanya dengan beberapa kawasanya kedikkarta, meminta bantuan ke lemyaga bantuan hukum yang dipimpin ciloti Bambang Sulistomo, putra Jalmashum Bung Tomo, Bersama Bameang, 23 November 1987a, Yatmo herhasil-menemui Menteri Dalam Negeri, kala itu masih

Soepard o Rustam.
Kali mi, alhamdulillah, ikhtiar Yatmo

tidak sia-sia. Ta-kanag berhadap dia, alah menga yang lain mulai mengendur. Tapi, totap, perunding-th mongalam sa-an bunca. Somestara inc.

air tafus bafgarak naik. "Mungkin, tami yang di momany sudah pe dak dipechankan orngonett, he memanufarit benden. 1404 barbara tembalte.

Admid such sang apat um sang dinham ba man bi main wal pa hajima Paris Ame burning



Alban.

TEMPO 25 MARET 1989

dungombo

### <sub>Sele</sub>baran <sub>di</sub> Kedungombo

Bupati Boyolali menawarkan jatah tanah yang lebih luas buat penduduk Kedungombo yang mau pinduh.

ELASA malam 4 April 1989 lalu, di Gereja Katolik Jetis, Yogyakarta, berlangsung suatu pertemuan menanik. Syaiful Sulun, Wakil Ketua DPR-MPR, datang menemui Y.B. Mangunwijaya. Romo Mangun memang tinggal di kompleks gereja itu. Kedatangan Syaiful Sulun kabarnya untuk minta pandangan Romo Mangun tentang masalah Kedungombo.

Pertemuan empat mata itu berlangsung selama satu jam, sejak pukul 8 malam. Kedatangan Syaiful Sulun ini dinilai Romo Mangun sebagai suatu itikad baik. "Saya bersyukur, ada seorang wakil rakyat dari pusat telah bersedia turun ke bawah. Dan ekstra-khusus datang ke tempat saya," katanya. Kepada tamunya ini, Ro-

Kepada tamunya ini, Romo Mangun mengaskan
bahwa yang dituntut oleh
warga Kedungombo hanyalah keadilan. "Para petani sudah berkorban, tapi
masih harus berkorban lagi," ujarnya. Artinya, tanah
warisan mereka hilang ditelan waduk, tapi mereka
masih harus berkorban lagi
untuk mendapatkan lahan

dengan biaya ganti rugi yang tidak sesuai.

Menurut Romo Mangun, untuk menyelesaikan kasus Kedungombo itu, gampang. Ada dua alternatif pokok yang bisa ditempuh. Pertama, beri mereka uang pesangon yang cukup agar mereka bisa buka warung. Kedua, sediakan lahan untuk permukiman di tempat lain; selain di Kayen. Selain alternatif pokok ini, menurut Romo Mangun, masih ada alternatif lain yang bisa ditempuh, yaitu: beri mereka tambahan ganti rugi dan beri mereka kesempatan untuk membuka usaha di waduk misaluna usaha perikanan.

duk, misalnya usaha perikanan.
Dalam pertemuan itu, Romo Mangun minta agar para dokter dan perawat, bisa masuk ke daerah genangan Waduk Kedungombo. "Kalau saya tidak diizinkan masuk tidak apa apa, asalkan para dokter dan perawat diperbolehkan masuk untuk menolong anak-anak di sana," pintanya. Menurut Romo Mangun, Syaiful Sulun menampik permintaannya itu.

pik permintaannya itu. Sementara itu, di Kedungombo sendiri

air waduk secara pelan-pelan teruk menapak naik. Sampai akhir pekan lalu, elevasi air sudah mencapai 82,40, dan sudah hampir menggenangi seluruh Desa Ngrakum, Di Desa Ngrakum, seperti yang disaksikan TEMPO, terjadi kesibukan luar biasa. Penduduk sibuk merabongkar rumah mereka, lalu ramai-ramai pindah ke Jokasi yang belum terjamah air. Di lapangan Guyungan, selitar 1 kin dari desa itu, kim elah berdiri 30 buah rumah darurat, pindahan dari Ngrakum.

Di tengah kesibukan ini, pemerintah terus mengimbau penduduk agar meninggalkan lokasi waduk dan pindah ke tempat yang telah disediakan. Kamis siang pekan lalu, sebuah helikopter nilik PT Mantrust menderu-deru di atas lokasi waduk, menebarkan selebaran. Ada 15 ribu selebaran dijatuhkan.

Selebaran berukuran folio itu dibuat tiga warna: biru, kuning, dan jingga, ditandatangani oleh Bupati Boyolali Haji Muhammad Hasbi. Ditulis dalam dua bahasa, Jawa rli, warga PGRI Jawa Tenguhi delium menggunakan Isilah "bakti againi" menghibur masyarakat Kayen dengan musik dangdut, serti memberi bantuan sebuah pesawat televisi 16 inci dan 32 kotak berisi antara lain kecap, superni, dan ikan asin Masih banyak lagi bantuan yang diteruna para pemukim baru itu Ada bibit tanaman

Masih banyak lagi bantuan yang diterinar para pemukim baru itu. Ada bibit tanamana jambu dan mangga, berpuluh puluh ekorayam dan kambing, serta kebutuhan sebanghari lainnya. Semua itu membuat Desa Kayen seolah-olah dimanjakan sementara, penduduk yang masih membandel disektatar waduk tetap kucing-kucingan dengan-

air Namun, Kayen ternyata tetap belum menarik untuk sebagian besar pe duduk Kedungombo, Para "pembelot" tetap ngo tot. Sampai awal April ini hanya da tambahan 8 KK yang pindah ke Kayen hingga jumlah pen ukim di sana menjadi 40 KK. Di bidang transmigrasi sampai akhis pekan lalu cuma ada tambahan 15 KK yang pendafta, an diri hingga jumlah peserta

pekan lalu cuma da tambahan mendafta, can diri, 'bingga jumlah peserta trunsmigrasi Mimer jadi trunsmigrasi Mimer jadi khir pekan lalu, mereka yang mi sih tetap bertah an di wilayah Kedu ngombo terca at 1 471 KK (6.807 jiwa).

Tawaran Presiden Soeharto, bulan a lalin, yang memberi kesempatan pada pendiduk agar tinggal di kawasan hutan milik Perhutani di sekitar Kedung mbo yang kanya merupi kan pilih an yang paling menanki "Kami memang mengharapkan tir sgal di kawasan hutan Perhutani ujar Djaswe di (seorang tokoh nasyarakat Kedungombo Kami) memunggi saatnya bisa pindah kanyasan hutan Perhutani ujar Djaswe di (seorang tokoh nasyarakat Kedungombo Kami) memunggi saatnya bisa pindah kanyasan hutan pendangan menggi saatnya bisa pindah kanyasan menggi saatnya bisa pindangan menggi saatnya bisa pindangan menggi saatnya bisa pindangan menggi saatnya bisa pindangan menggi saatnya kanyasan hutan menggi saatnya menggi saatn

nunggu saatnya bisa pindah ke kawasan bukit itu. Di sana kami ak n memulai hidup baru,' tuturnya

itu. Di sana kami akt nepienuka baru, tuturnya Na nun, tampaknya realisasinya masih memakan waktu yang cukup lama Kami baru melakukan pendataan terhadan tajah yang cocok untuk permukiman, ujar trugudono Radianto, Kabag Humas Perun Perhutani Ja-Teng, kepada Heddy Lugito dari TEMPO.

Kalau penduduk ini tidak cepat dipindahkan, akan timbul persoalan baru. Terutama menghidapi, musim keringrini. Denga berkurangnya curah hujan, sangat mungkin air, waduk akan surut. Bupatu Boyolali Hasbi khawatir penduduk akan kembali ke tempat semula.

berkurangnya curah hujan, sangai mungkin air, waduk akan surut. Bupati Boyolali Hasbi khawati penduduk akan kembali ke tempat semula.

Tapi kekakhawatiran ini dijay ab oleh Sutarman, oenduduk Sgrakum. Kani idak akan kembali mendirikan rumah di tempat semula Sudah capek, dijarnya Tapi, "Untuk tanah sawah "etap akan kami garap."

Kastoyo Ramejan, Slamet Subayyo, dan Sjahrii i



MEMBANGUN KEMBALI DI LAHAN BARU

dan Indonesia. Isinya: penjelasan bahwa pembangunan Waduk. Keddingombo semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sama sekali bukan untuk menyengsarakan rakyat, sama sekali bukan untuk Masyarakat di Kecamatan Kemusu, de-

Masyarakat'di Kecamatan Kemusu, demikian bunyi selebaran itu, agar segera mengambil uang ganti'rugi dan sigera meninggalkan tempat. Yang berminat bertransmigrasi agar cepat-tepat mendaftarkan diri. Yang terpentingi tanah permukiman Kayen tetap terbuka untuk mereka yang belum mau pindah Dan jatah tanah untuk setiap kepala keluarga yang 1.000 m². kini ditambah menjadi 2.00. m². Yaitu: 1.000 m² untuk rumah dan pekarangan dan 1.000 m² lagi untuk tanah pertanian. Harganya cukup miring, Rp. 160 per meter, persegi, termasuk blaya ertitikat.

1,000 m lagi untuk tanah pertanian. Harganya cukup miring, Rp. 150 per meter,
persegi, termasuk biaya eritikat.
"Kampanye" di permuliman Kayen inj.
akhir-akhir ini memang cukup gencar,
Bantuan terus mengalir ke permukinianbaru, yang baru dihuni 40 KK dari 400 KK
yang direncanakan, Terakhir, Rabu J.Ap.

TEMPO, 15 APRIL 1989

# Tak Perlu Kekerasan untuk Tangani Kedungombo

dak perlu menggunakan kekerasan ada yang mengganjal untuk menyelesaikan masalah itu. Ngapain pakai kekerasan, wong mereka rakyat kita sendiri," katanya menjawah pertanyaan Sugra Menteka scusai pelantikan Gubernur Jateng, kemarin

SEMARANG - Pangdam IV/ laskan, pihaknya tidak tidak pernah yang mereka tempati sekarang me-Diponegoro, Mayjen TNI Socyono menghalangi kemginan warga Keberpendapat, untuk mengatasi masas dungombo yang ingin meneadu ke lah warga Kedungombo, tidak perlu DPR RI, Jika pengaduan ke tingkat menggunakan kekerasan atau ben-yang lebih tinggi itu dianggap efektuk intimidasi lainnya. Tetapi cukup tif dan menyelesaikan masalah. melalui ajakan, imbauan dan cara - silakan saja. Begiru pula kalau ingin cara yang persuasif. "Saya pikir, ti- menempuh prosedur hukum, tidak

> Keduanya ditanya tentang sikap sejumlah warga Kedungombo yang ingin mengadu ke DPR RI, berkuitan dengan usahanya memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempati, setelah usahanya di tingkat Boyola-

mang merupakan sabuk hijau waduk, dan untuk memperoleh sertifikarbarus seizin Menteri Pekerjaan Umum (Saara Merdeka, 24 Agus-

Menurut Pangdam, rasanya anch jika dalam kasus Kedungombo, tidak ada pihak yang menunggangi. Kalau menunggangi dalam arti positif, tidak ada masalah. Yang berbahaya adalah, bila pihak yang menunggangi itu bermaksud lain. Kadangkadang kedoknya saja membantu rakyat, tapi sebenarnya tidak. "O-Sementara, Kahag Humas Pem- li dan lateng tak membawa hasil, rang - orang macam itulah yang da Boyolali, Mudjianto, SE menje- Menurut pejabat setempat, tanah sering menyusahkan kita. Biasanya

situasi begitu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau politiknya," tandasnya.

Ditambahkan, kalau ada kecenderungan masalah Kedangombo dijadikan isu politik, hal itu wajar karena ujung pangkal negara Indonesia berndadalam kehidupan politik. Dia mengingatkan, kehidupan politik hingga kini beliim mantap, sehingga perlu dimantapkan supaya tertata. Sebelum tertata, masalah politik ini

Kita itu punya tatanan politik. Tetapi biasanya mereka yang bilang perorangan, ngakunya membawa

(Bersambung him XV kol 7-9)

Suara Merdeka, 25 Januari 1993

# Pintu Waduk Kedungombo Jangan Ditutup

Warga Kirim Surat ke Gubernur

ALA- Takut padi tak bisa dipanen, warga Kedungpring, pring hanya satu kali bisa menanan gombo, berkirim surat ke Gubernur H Mardiyanto. Mereka gombo, berkirim surat ke Gubernur H Mardiyanto. Mereka na pintu air waduk tak ditutup. Bila ditutup, padi mereka nga air dan bisa gagal disagama manami bekas geangan waduk itu dengan padi. ng air dan bisa gagal dipanen.

or ini pintu air Waduk mbo ditutup oleh proyek, ua minggu lagi padi warga en. Maka kami meminta nur agar pintu itu ditutup gu lagi," kata pendamping in Warga Kedungombo, n dari Sala kemarin.

nenyatakan saat ini elevasi k 7,7 m di atas permukaan dol). Warga menghendaki etap setinggi itu dan bila ir ditutup, ketinggian air kat sehingga bisa naik ke

mi sudah menemui pihak Waduk kedungombo dan dengan prosedur kami a penundaan penutupan tu ke Gubernur lewat surat. u ini (kemarin-Red) pula surat lewat faksimile." di Kedungpring saat ini 5 ha, milik sekitar 30 KK.

Daerah itu saat ini dihuni sekitar 70 KK, karena ada beberapa keluarga

kembali ke kawasan itu. Setiap warga, kata dia, menanam padi setidaknya di atas lahan sekitar 1 ha lebih. Bila padi mereka berhasil, hasil yang bisa diterima warga diperkirakan sekitar Rp 5

"Itu perkiraan warga, yang selama ini gagal panen karena tanaman mereka tergenang air,

Berjanji Membantu

Permintaan penutupan lewat surat itu diajukan setelah beberapa kali pertemuan dengan Gubernur. Dalam pertemuan itu, warga bisa meminta bantuan lewat surat. Kepada Gubernur, warga sering mengeluhkan persoalan kenaikan ketinggian permukaan air dan Mardiyanto berianii membantu.

Setiap tahun warga Kedung-

"Petani biasanya hanya menanam benih padi dan membuang tanaman pengganggu. Masa-lah lain tak dilakukan, seperti pemupukan, karena tanah sudah

Karena sekarang ini musim hujan, pihak proyek menutup pintu air. Kebiasaan itu dilakukan sejak dulu, sehingga petani yang tak tahu-menahu masalah itu kaget karena tiba-tiba padi mereka tertutup air.

"Petani tentu rugi banyak karena tanaman mereka di sabuk hijau tak bisa dipetik hasilnya," kata-

Kedungpring termasuk daerah paling rendah di antara daerah lain di kawasan Kedungombo. Bila warga Mlangi, Klewor, dan lain lain bisa menanam padi dua kali, warga di kawasan itu belum tentu bisa menanam satu kali. Karena itu mereka harus pandai-pandai memperkirakan musim.(bs-66g)



DITATA: Pemda Sukoharjo sudah saatnya menata Pasar Kota. becak yang mangkal di sanu. Akih Sebab, dasaran yang digelar puluhan PKL sudah menjorok ke tepi jalan. Kondisi itu semakin diperparah dengan banyaknya

Enom Anggota FPDI-P

Suara Merdeka, 18 Januari 2001

# Hari-hari Penting Menuju Kasasi

Kisah warga Kedungombo untuk mendapat hak-haknya bagaikan cerita mosaik kepahlawanan. Mereka tak mengenal lelah dan tak mengenal takut. Inilah kronologi hari-hari penting mereka.

1969: Perencanaan pembangunan waduk mulai dilakukan dengan survei dan studi kelayakan. Survei yang dilakukan Proyek Pengembangan Sumber-sumber Air Departeman Pekerjaan Umum dengan konsultan Nedeco dari Belanda itu baru selesai tuj ih tahun kemudian. Kesimpulannya, proyek waduk akan meliputi 37 desa di tujuh kecamatan di Boyolali, Sragen, dan Grobogan.

1981: Sarana penunjang proyek, seperti jalan raya, mulai dikeriakan.

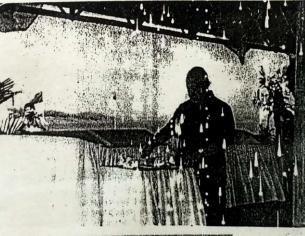
1982: Awal tahun ini, aparat kelurahan mulai menyampaikan informasi tentang rencana pembangunan waduk.

September 1983: Gubernur Java Tengah, H.M. Ismail, mengeluarkan keputusan tentang pedoman penetapan besar ganti rugi tanah, bangunan, dan tana nan. Konon, penetapan itu dilakukan tanpa musyawarah dengan penduduk.

1984: Beberapa aparat desa di Sragen dan Grobogan mulai mer dekati penduduk untuk membicarakan ganti rugi. Di Boyolali, warga Kelurahan Kemusu mengajukan permohonan sertifikat.

April 1985: Penduduk Kemusu diundang ke Balai Desa untuk mendengar penjelasan rencana pembangunan waduk. Di Ngrakum, Nglanji, dan Genengsari aparat desa langsung melakukan pendataan tanpa Penjelasan lebih dulu. Di Desa Kedungcemplung dan Kedunglele, penduduk langsung disuruh membubuhkan tanda tangan atau cap jempol dan dipaksa menerima

Januari 1986: Camat Kemusu mengundang warganya untuk mendapat peng-arahan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan setempat. Dalam undangan dicantumkan, bila tidak hadir dikenai ancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 224 mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Para bekas tahanan politik (tapol) yang datang dimintai persetujuan un-



tuk transmigraci. Bulan-bulan berikutnya, beberapa kepala desa mengundang warganya untuk mendapat pengarahan. Buntutnya, mereka dimintai tanda tangan. Warga yang mulai menolak, seperti Djaswadi di Kemusu, dilaporkan kepada Camat karena dianggap meresahaan musyarakat.

Agustus 1986: Di koran terbitan Jawa Tengah mulai ramai Gbicarakan masalah ganti rugi yang menjar'i pelik. Djaswadi

ditangkap aparat karena membuat laporan ke kepala Kepolisian Daerah.

Oktober 1986: Aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Sragen mencari rama 28 warga yang telah mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Berikutnya, LBH Yogyakarta mulai turun ke lapangan.

Desember 1986: 299 penduduk De sa Suko, Kecamatan Miri, Sragen, menyata-

kan kesediaannya menerima ganti rugi. Januari 1987: Kepala Desa I Jewor memanggil 30 warga yang memberi cap jempol pemberian surat kuasa. Aparat menyatakan bahwa surat kuasa ke LBH Yogyakarta dianggap tidak sah meski sudah sampai ke pengadilan. Lurah setempat menyatakan bahwa pihaknya akan memukul warga yan, menolak ganti rugi. Enam warga Klewoi dipanggil ke Komando Rayon Militer setempat dan, berikutnya, di vajibkan apel harian, yang diprotes LBH. Begitu pula enam warga yang di-"eks tapol (ET)"kan di KTP-nya dipanggil lurah ditawari transmigrasi ke Maluku kalau status "ET"nya mau dihapus.

Februari 1987: Djaswadi dan Aat S. mengadu ke DPRD menyampaikan masalah gunti rugi. Langkah itu disusul sembilan orang lainnya.

Maret 1987: Dua warga Kedungpring dan Ngrapah mengadu ke DPR, juga soal ganti rugi.

April 1987: Dua orang yang sudah ikut transmigrasi pulang ke Desa Bawu. Keduanya mengeluh, di daerah transmigrasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah. Juni 1987: Warga

Kemusu dipanggil aparat untuk mendapat pengarahan. Ternyata, tanda tangan di daftar hadir diubah sebagai daftar persetujuan menerima ganti rugi. Selain itu, 25 orang melarikan diri ke hutan karena dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Koran-koran Jakarta mulai melansir berita itu secara besar-besaran, termasuk tentang KTP penduduk yang di-"ET". kan Langkah lainnya, 164 kepala keluarga warga Kecamatan Miri, Sragen, mengadu ke LBH Yogyakarta.

Juli 1987: Aparat mengadakan pertemuan dengan warga Desa Genengsari. Me-

FUTUM KLAURIAN: NOMOR 8, TAHUN III, 4 AGUSTUS 1994

# Menggapai Keadilan di Kedungombo

Harapan bagi keadilan tak bisa ditenggelamkan. Tuntutan ganti rugi 34 warga Kedungombo di tingkat kasasi dimenangkan Muhkamah. Agung. Inilah proses perjuangan mereka menempuh upaya hukum.

rang di Waduk Kedungombo yang menelan biaya Rp 131,853 miliar itu, seorang warga terdengar meratap. "Sembilan miliar rupiah tidak akan mampu mengembalikan apa yang selama ini kami miliki, yang telah terbenam ke dasar air. Uang itu tak akan mampu mengembalikan luka nati kami," kata Mbah Wito, 65 tahun, salah seorang warga yang bertahan tinggal di sabuk hijau waduk di daerah Kedungpring.

Mbah Wito lantas termangu. Ia mungkin

tak bisa membayangkan berapa besarnya uang yang harus dibayarkan pemerintah kepada warga mbalelo itu. Angka Rp 9,1 miliar menurut keputusan Mahkamah Agung itu pasti sama tak terukurnya dengan penderitaan yang dialaminya. Tapi, yang jelas, hari-harinya tak lagi dipenuhi tawa. Ia sudah kehilangan sawah, rumah, hewan piaraan, dan tanaman yang dicintainya. Ia bahkan harus menjual 10 ekor sapi kesayangannya untuk bisa sekadar

Kesengsaraan tak hanya milik Mbah Wito. Citro, 55 tahun, misalnya, juga harus merelakan tujuh ekor sapi miliknya. Yang lebih parah, kerabat mereka sudah 14 orang meninggal dunia karena frustrasi. Bahkan, Mitrorejo, sebelum menemui ajal, telah kehilangan kewarasan jiwanya. "Kalaupun kami masih tetap waras dan belum mati, itu hanya karunia Tuhan saja," kata Mbah Wito, at ik Pak Kanjeng. Nama yang terakhir ini telah diabadi-kan Emha Ainun Nadjib dalam dramanya yang ternyata tak boleh di-

pentaskan itu. Barangkali, hanya harga dirilah yang membuat penduduk masih tetap nekat hi-dup di kawasan bibir danau di Mlangi (96

i antara kecipak air sungai Se, keluarga), ataupun di Kedungpring (54 keluarga), tanpa menghiraukan bahaya yang siap menelan mereka. Warga di Kedungpring itu, semula, men jajukan gugatan secara serempak. Tetapi, 19 orang di antaranya kemudian menarik gugatan, seorang meninggal dunia, dan 34 sisanya meneruskan sampai tingkat kasasi yang akhirnya menang itu. Walau masih untuk se-

Kondisi para "pembangkang' itu me-mang amat menyedihkan. Rumah mereka yang berdinding bambu, tergenang air bila

waduk pasang. Dan kehidupan mereka pun tetap nestapa saat menyambut keme nangan hukum itu. "Bagi karri, kemenangan itu masih tanda tanya. Belum pasti," kata Bejo, 29 tihun, anak Pak Jenggot, tokoh warga Kedungpring yang kini bekerja sebagai buruh di Jakarta. Karena itu, mereka tak merasa senang, apalagi punya rençana muluk untuk memanfaatkan uang ganti rugi tersebut.

Mereka memang tetap tak yakin al an kemenangan yang sudah dicatat di a, as kertas itu. Iau tentu wajar, mengingat penjuangan mereka sudah berlangsung enam

Enam tahun lalu itu, keadaan ketiga puluh empat warga itu seperti warga lainnya tak jelas, ketika proyek waduk itu, yang diproyeksikan bisa mengairi 10.000 hektare sawah dan memberi tenaga listrik 2,5 MW, mulai dibangun pada 1984. Waduk itu memakan tanah seluas 6.1667 hektare, dan 5.000 hektare digunakan untuk genangan air. Seluruhnya terletak di Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Grobogan.

Proses ganti rugi, sebenarnya, pada awalnya berjalan lancar. Tapi mulai 1985, berbagai persoalan muncul. Banyak warga yang

kecewa, terutama karena nilai ganti ruginya yang terlalu rendah, garagara Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ismail, mematok harga secara sepi-

Tanah rakyat hanya dihargai Rp 400 per meter persegi untuk sawah, Rp 350 untuk lahan kering, Rp 730 untuk pekarangan, Rp 2.150 sampai Rp 7.380 untuk per meter persegi rumah, dan Rp 30 sampai Rp 2,000 untuk tiap batang pohon, Padahal, Menteri Dalam Negeri, saat itu Soepardjo Roes-tum, dalam dengar pendapat dengan Lomisi II DPR, menetapkan ganti nigi Rp 3,000 per meter.

Akibatnya, keresahan melanda masyarakat. Pada April 1985, pendudi k Desa Kemusu, Kabupaten Boyolali, dikumpulkan dan diberi tahu rencana pembangunan proyek itu. Tanpa dičuga, warga langsung dimintai cap iempol dan menerima ganti rugi. Bisa diduga, protes pun bermunculania.

Jalan seperti itu memang terpoksa dilakukan pemerintah karena penyelesaian ganti rugi berjalan rambat Aparat yang bertangg ing jawab membebaskan tanah malah sudah tak sabar. Jalan musyawarah pun tak per-

nah terlaksana. Bahkan, warga diintimida Akibatiya, ada beberapa warga yang ter-

FORUM KEADILAN: NOMOR B, TAHUN III, 4 AGUSTUS 1994

# Korban Tewas di Kedungombo 15 Orang



## Tujuan Semula ke Makam Ibu Kartini

#### Suara Merdeka, 12 Januari 1996



Lampiran 7: Bukti Sertifikat Tanah Hak Milik Warga

a) HAK Milik	D	NAMA PEMEGANG HAK
No. 3/2		SADI DWIJOWIYOTO
Desa Kayen		A CONTRACTOR AND THE CONTRACTOR
LEGET CONTROL OF A BELLEVA BELLEVA DE PARENTE DE LA PROPERTO DE LEGET DE LE	Dk	. Kayenbaru . Ds. Kayen
b) NAMA JALAN/PERSIL P. Dukuh Kayenbaru Untuk Perumahan .		
c) ASAL PERSIL	g) РЕМВИКЦА	N
1, -Konversi		BOYOLALI Tgl. /3 - 2 - /990
2. Pemberian hak Atas Tanah		Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
Negara Blok Kayenbaru	ACLANDON A SECULIAR DO SECULIAR A	Recupation returning
3. Pemisahan Patok. 40 .		
4. Penggabungan	AND	<del>tě</del> d
THE TANK OF THE STREET BADANCE TO A SECOND STREET, AS A SECOND STR		The same of the sa
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	The state of the s	HARTONO.BA.
AND THE PARTY OF T	Separation of the second	AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA
d) SURAT KEPUTUSAN	h) PENERBITA	AN SERTIPIKAT
MANUAL MANUAL PROPINS	Spiriting.	BOXOLALI Tgl. /3-2-/996
801/900/48/00	MIBHAKT	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ <del>Kotamadya</del>
10990	S TO SERVICE STATE OF THE SERV	BOXOLALL
ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR		m
Uang pemasukan/biaya administrasi	The second secon	
Lamanya hak berlaku	13	
Berakhirnya hak	y	HARTONO BA
Tgl.	AND REPORT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	NIP NIP: 010 024 610. 1/
	n PENUNJUE	Warkah, no. 170 1208/ X/X 19
e) —SURAT UKUR GAMBAR SITUASI		
Tgl. 4-9-1980	Application of the party of the	
No. 5324 /1990.	A DATE OF UNITED AND ADDRESS OF THE PARTY OF	
Luas : 1000 m .	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

a) HAK MILIK	0 NAMA PEMEGANG HAK
1200	
No.	TOTOK MARWOTO.
Desa KAYEN	De. Kayen. Kec. Jurangi.
b) NAMA JALAN/PERSIL P. De. Jawanei	
P.Ds. Juwangi Untuk Perumahan.	
e) ASAL PERSIL	g) PEMBUKUAN
1- Konversi	BOYOLALI Tgl. 2 5 JUN 1990
THE RESIDENCE OF THE ASSESSMENT OF THE PARTY	Tgl
2. Pemberian hak milik atas tanah Negara.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ <del>Kotamadya</del>
	BOYOLALI
3. Pemisahan	tta.
4 Penggabungan	
	Drs. SUPROBO HADIKUSUMO
The state of the s	NIP. NIP. 010,853,524
d) SURAT KEPUTUSAN	h) PENERBITAN SERTIPIKAT
KEFALA KANTOR WILAYAH BADAN	BOYOLALI Tgl. 25 JUN 1998
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI	Kepala Kantor Pertanahan
JAW A-TENGAH TGL 10-6-1998.	Kabupaten/Kotamadya
NC.SK.520.1/506/1/5350/33/1998.	SHAKTI ROM PRATINGEN PLALI
Dans seemanban (blans askelicing at	
Uang pemasukan/biaya administrasi  Rn_10_000_= vdl Rn_5_000_=	
Rp. 10.000, - val Rp. 5.000, - (24/44 Cond)	Colored Towns
Lamanya nak periaku	INDON.
Berakhirnya hak	NIP. 010,053,524
Tgl.	NIP NIP
	i) PENUNJUK
e) SURAT-UKUR GAMBAR SITUASI	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Tgl. 31 - 12 - 1997.	
No. 23297 / 1997.	
Luas ± 1.000 M2.	
Luas -	

HAK : Milik	
No. 37 SID  Desa: Mglanji  KEDUNG MULYU	nama pemegang hak  Pajiyem isteri Darmapeimin  Dk: Kedungmulyo  De: Hglenji
b) NAMA JALAN/PERST D Kedungmulyo Untuk Pertanian	
c) ASAL PERSIL  1. Konversi	8) PEMBUKUAN Bejolali Tgl 10.00 1990
2. Pemberian hak milik atas Tanah Negara bekas Perhutani Blok A. 3. Pemisahan Patik 71	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotemedya Boyolail
4, Penggabungan	ttd
	NIP NP. 016 024616
d) SURAT KEPUTUSAN  (EPALA KANTOR WILAYAH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI  JAWA-TENGAH. TGL. 7 - 7 - 90  JOSK. S. 20 1 27 7 10 1409  Jang gomasukan/biaya administrasi  Lamanya hak berlaku  Jerakhirnya hak  gl.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  BOY 01 a 11  NIP NIP 010 024610
SURAT UKUR GAMBAR SITUASI	i) PENUNJUK Warkah. no. 493 /2081 Am 19 10 -
28 JUN 1990	
. 4138/90	the same of the desired
o. 4138/90 1138: 3898 m 21 "-	

n :	
a) HAK Milik  No. 126  Desa Nglonji  KEDUNG MULTU.	n NAMA PEMEGANG HAK Jimen Pesopewiro Dk Kedung Mulya De Nglenjr.
b) NAMA JALAN/PERSIL  Kedung Mulya Untuk Laji  Perumahan.	
c) ASAL PERSIL	8) PEMBUKUAN
1. Konversi	Boyolall Tgl 6-7-1990
2. Pemberian hak atas tanah- gara bekas Perhutani- 3. Pemikahan Blok A Patok 114	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ <del>Ketamadya</del>
4. Penggebungan	Hd.
	MARTONO+ BA NIP NIP. 010 024 610.
d) SURAT KEPUTUSAN	h) PENERBITAN SERTIPIKAT
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANJAN MASIONAL PROPINSI JULA TENENG TOLZ 7-90 NG. SK. SKO 1/076/124/24/24/24/24/24/24/24/24/24/24/24/24/2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Koramadya  A Politika Kantor Pertanahan  Kabupaten Koramadya  A Politika Kantor Pertanahan  Kabupaten Koramadya  A Politika Kantor Pertanahan  Kabupaten Koramadya
Lamanya hak berlaku	HARTONO, BA
Berakhirnya hak Tgl.	NIP NIP. CIO UZA SIO.
SURAT UKUR GAMBAR SITUASI	1) PENUNJUK Washah 409/208/41×190
rgl. 28 - 6 - 1990 No. 4334 /90	
uas : 1000 m	